

**Pengaruh *Financial Accountability, Accountability and Transparency* serta
Finance Management sebagai Variabel Moderasi terhadap Penerapan
Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) *Financial Management*
Information System (FMIS) SIMDA F-MIS**



Disusun oleh:

Valeria Flora Seran

(122100789)

Dosen Pembimbing:

Dr. Rusmawan Wahyu Anggoro, M.S.A., C.M.A., Ak., CA.

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA
YOGYAKARTA
2023**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur bagi Tuhan yang Maha Kuasa karena atas berkat dan anugerah-Nya yang Kudus, serta kemurahan hati dan kasih-Nya yang begitu besar sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan tesis dengan judul **“Pengaruh *Financial Accountability, Accountability and Transparency* serta *Finance Management* sebagai Variabel Moderasi terhadap Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) *Financial Management Information System (FMIS) SIMDA F-MIS*”**. Tujuan dari penulisan tesis ini adalah sebagai salah satu syarat tugas akhir untuk mencapai gelar Magister Akuntansi pada Program Studi Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya dalam proses penulisan tesis ini masih jauh dari kata sempurna karena menyadari segala keterbatasan yang ada. Untuk itu dengan menyempurnakan hasil penulisan tesis ini, penulis sangat membutuhkan bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan tepat waktu.

Dengan tersusunnya tesis ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua Lambertus Seran (†) dan Eritha Hoar yang telah memberikan kasih sayang, nasihat, semangat dan dukungan lahir dan batin serta doa yang tak henti-hentinya kepada penulis, dan **Bapak Dr. Rusmawan Wahyu Anggoro, M.S.A., C.M.A., Ak., CA** selaku dosen pembimbing yang memberikan bimbingan dan arahan secara menyeluruh dari awal hingga akhir proses penyusunan dan penulisan tesis ini, serta pihak-pihak yang telah memberikan dukungan kepada penulis diantaranya yang terhormat:

1. Bapak, Prof. Dr. Baldric Siregar, MBA.,CMA., Ak., CA. Selaku Direktur Program Pascasarjana dan sekaligus Ketua Program Studi Magister Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta;

2. Bapak, Dr. Miswanto, M.Si. Selaku Sekretaris Pelaksana Program Pascasarjana dan sekaligus Ketua Program Studi Magister Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta;
3. Bapak, Dr. Wisnu Prajogo, S.E., M.B.A. Selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta;
4. Sebagai penguji yang memberikan kontribusi besar terhadap perbaikan dan penyelesaian penulisan tesis ini;
5. Segenap Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta, khususnya Bapak dan Ibu Dosen Pascasarjana Akuntansi yang dengan sabar dan tanpa pamrih memberikan ilmunya kepada penulis agar penulis mempunyai masa depan dan visi yang lebih dalam;
6. Seluruh staf Prodi Magister Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta dengan segala bentuk bantuan dan kerjasama untuk menunjang keutuhan dan proses administrasi penyelesaian studi;
7. Seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah meluangkan waktunya dalam pengisian kuesioner yang telah dibagikan oleh peneliti;
8. Kedua orang tua tercinta dan tersayang yang senantiasa telah memberikan doa, dukungan dan kasih sayang selama proses pengerjaan dan penyelesaian laporan ini;
9. Kakak tersayang Alfonsa Ivoni Larys Seran, S. Kep., Ns., M.M.Kes yang senantiasa mendukung sarana dan prasarana penulis dalam penyelesaian laporan;
10. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dari awal hingga akhir proses penyelesaian laporan tesis ini.
11. *The holy spirit of Jesus' invisible power*, sumber segala inspirasi pada saat tulisan ini dibuat, sumber utama ilmu pengetahuan, sumber motivasi, sumber kekuatan, sumber kegembiraan, kepada-Nya Yesus dan Bapa Surgawi, *God is the only source of wisdom, be glorious forever.*

Penulis memahami bahwa tesis ini mempunyai banyak kekurangan atau kelemahan dalam menganalisis materi, pengetahuan dan pengalaman dalam penelitian ini. Hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan penulis dan kurangnya ketelitian. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dan menjadi motivasi selanjutnya untuk membuat laporan yang lebih baik.

Akhir kata, semoga Tuhan yang Maha Esa senantiasa mencurahkan rahmat serta kuasa-Nya dan semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan bagi semua pihak yang memerlukan.

Yogyakarta, November 2023

Penulis

Valeria Flora Seran

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Kriteria Penilaian dengan skala likert	40
Tabel 3.2 Jenis-jenis Variabel Moderasi	43
Tabel 4. 1 Jenis Kelamin Responden.....	50
Tabel 4. 2 Distribusi Responden Berdasarkan Usia Responden.....	50
Tabel 4. 3 Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan	51
Tabel 4. 4 Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan	52
Tabel 4. 5 Distribusi Responden Berdasarkan Masa Kerja.....	52
Tabel 4. 6 Distribusi Responden Berdasarkan Instansi/ Lembaga	53
Tabel 4. 7 Distribusi Responden Berdasarkan Jabatan	54
Tabel 4. 8 Tanggapan Responden Mengenai Financial Accountability (FA) 55	55
Tabel 4. 9 Tanggapan Responden Mengenai Accountability (A)	59
Tabel 4. 10 Tanggapan Responden Mengenai Transparency (T)	62
Tabel 4. 11 Tanggapan Responden Mengenai Finance Management (FM) ..	65
Tabel 4. 12 Tanggapan Responden Mengenai SIMDA F-MIS (SMF)	68
Tabel 4. 13 Hasil Uji Statistik Deskriptif	72
Tabel 4. 14 Hasil Uji Validitas	74
Tabel 4. 15 Uji Reliabilitas Indikator Variabel	76
Tabel 4. 16 Hasil Uji Asumsi Klasik	77
Tabel 4. 17 Hasil Uji Multikolinearitas	78
Tabel 4. 18 Hasil Koefisien Regresi	81
Tabel 4. 19 Hasil Koefisien Moderated Regression Analysis (MRA)	83
Tabel 4. 20 Hasil Uji F	86
Tabel 4. 21 Hasil Uji t	86
Tabel 4. 22 Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R2).....	90

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir	30
Gambar 4. 1 Uji Normalitas P-P Plot.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4. 2 Hasil Uji Heteroskedastisitas	80

ABSTRAK

Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA F-MIS) mempunyai peran yang sangat penting bagi seluruh instansi pemerintahan di Indonesia untuk mempermudah dan memperlancar pengelolaan keuangan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji dan memberikan bukti empiris pengaruh *Financial Accountability, Accountability and Transparency* terhadap Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA F-MIS). Penelitian ini juga menambahkan satu variabel yaitu *Finance Management* sebagai variabel moderasi yang memperkuat dan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penerapan SIMDA F-MIS. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif dan jenis sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh jawaban responden dari pernyataan kuesioner melalui *google form* yang disebarluaskan secara *online*. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda (Multiple Regression Analysis). Data penelitian ini diolah dengan menggunakan program Statistical Package for the Social Sciences (SPSS).

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan peneliti menunjukkan bahwa adanya pengaruh *Financial Accountability, Accountability and Transparency* terhadap Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA F-MIS). Variabel moderasi yaitu *Finance Management* mampu memperkuat pengaruh antara *Financial Accountability, Accountability and Transparency* terhadap Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA F-MIS). Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem berbasis elektronik yaitu SIMDA F-MIS yang telah dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memberikan dampak yang positif bagi seluruh instansi pemerintahan di Indonesia mampu memperlancar dan mempermudah pengelolaan keuangan, menghasilkan suatu laporan pertanggungjawaban yang baik dan sesuai aturan, memperoleh suatu laporan yang akuntabel, efektif dan efisien, serta mewujudkan dokumen secara terbuka baik dalam informasi pencatatan yang wajar maupun mengontrol dan mengevaluasi anggaran.

Kata Kunci: *Financial Accountability, Accountability, Transparency, Finance Management, SIMDA-FMIS*

ABSTRACT

The Regional Management Information System (SIMDA F-MIS) has a very important role for all government agencies in Indonesia to facilitate and expedite financial management. This study aims to test and provide empirical evidence of the effect of Financial Accountability, Accountability and Transparency on the Implementation of Regional Management Information Systems (SIMDA F-MIS). This study also adds one variable, namely Finance Management as a moderating variable that strengthens and has a significant effect on the application of SIMDA F-MIS. The type of research used in this study was conducted using quantitative methods and the type of data source used was primary data obtained by respondents' answers from questionnaire statements through google forms distributed online. The data analysis method in this study uses multiple linear regression analysis.

Based on the test results that have been carried out by researchers, it shows that there is an influence of Financial Accountability, Accountability and Transparency on the Implementation of Regional Management Information Systems (SIMDA F-MIS). The moderating variable, namely Finance Management, is able to strengthen the influence between Financial Accountability, Accountability and Transparency on the Implementation of Regional Management Information Systems (SIMDA F-MIS). This research shows that the electronic-based system, namely SIMDA F-MIS, which has been developed by the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) has a positive impact on all government agencies in Indonesia, which is able to facilitate and simplify financial management, produce a good and compliant accountability report, obtain an accountable, effective and efficient report, and realize open documents both in fair recording information and control and evaluate the budget.

Keywords: Financial Accountability, Accountability, Transparency, Finance Management, SIMDA-FMIS

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 mengatur pengelolaan keuangan daerah yang menerangkan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud Keuangan Daerah ialah segala hak dan kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Pemerintahan Daerah yang bisa dinilai dengan uang serta semua bentuk kekayaan yang bisa dijadikan milik Daerah terkait hak dan kewajiban Daerah tersebut. Pasal 1 ayat 2 dalam Peraturan Pemerintah ini tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.

Meningkatnya globalisasi memunculkan persaingan pada masing-masing negara juga menuntut adanya persaingan setiap pemerintah daerah, dengan demikian daya saing pemerintah tersebut diharapkan dapat dicapai dengan meningkatkan kemandirian pemerintahan (Damayanti, 2018). Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah memberi wewenang luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur sumber pendanaan, penentuan tujuan dan arah hingga menetapkan target pemakaian anggaran. Namun demikian, masih terdapat kendala dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan di daerah yang perlu ditingkatkan.

Pencapaian kinerja keuangan adalah tolak ukur keberhasilan daerah otonom dalam menjalankan otonomi mereka (Rahmatia & M.Irwan, 2020). Persoalan mengenai hasil perekonomian pemerintah daerah kini mengemuka di hadapan masyarakat, karena belum menunjukkan hasil maksimal dan juga masyarakat belum bisa merasakannya langsung. Masyarakat memerlukan hasil keuangan yang baik dari pemerintah daerah dalam memenuhi tugas dan tanggung jawabnya sebagai wujud konsep otonomi daerah (Inessa, 2018). Dapat dikatakan bahwa

apabila pemerintah mempunyai efisiensi keuangan yang optimal, apabila mempunyai kemampuan dalam mengelola pemerintahan maka dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kinerja keuangan yang baik diperlukan di semua pemerintah daerah (Adelia *et al.*, 2020).

Teknologi sektor publik semakin berkembang, terutama di Indonesia, karena reformasi implementasi kebijakan pemerintah, desentralisasi fiskal dan otonomi daerah yang mengutamakan pemerintah daerah (Ferdinant, 2021). Undang-undang (UU) No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi landasan hukum pemerintah daerah tentang desain dan pola aplikasi pertanggungjawaban keuangan daerah terkait reformasi regulasi keuangan Negara. Pesatnya perkembangan teknologi menjadi faktor penting sebagai latar belakang berkembangnya sistem informasi komputer (Rakhmawati, 2022).

Salah satu tahapan penting dalam reformasi tata kelola negara adalah diundangkannya Undang-Undang No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara dan Undang-Undang No.15 Tahun 2004 tentang Pertanggungjawaban Keuangan Negara. Dalam rangka meningkatkan tanggung jawab keuangan dan kinerja pemerintahan daerah, Deputi Pengawas Badan Administrasi Daerah telah mengembangkan sistem informasi administrasi daerah (SIMDA) sejak tahun 2003. Program aplikasi komputer SIMDA merupakan aplikasi untuk membantu memperlancar dan mempermudah pengelolaan keuangan pemerintah daerah (Meisy & Erinos, 2020).

Aplikasi yang dikembangkan oleh Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, juga dikenal sebagai BPKP, adalah Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemerintahan daerah dan sektor yang baik dengan memberikan akuntabilitas keuangan pemerintah yang tinggi. Tujuan dari SIMDA adalah untuk mencapai tanggung jawab (Angraini, 2021). Dalam membantu dan membangun pemerintah daerah yang baik dibutuhkan penerapan sistem informasi keuangan dan kinerja supaya mengoptimalkan tata

kelola pemerintahan, termasuk pengendalian yang memadai atas informasi dan transaksi yang lengkap (Ganevie, 2018 dalam Putu, *et.al.*, 2021).

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu yang sudah banyak diteliti, penerapan system informasi keuangan daerah dapat membantu pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan keuangan daerah (Dito, 2018). Faktor lainnya yang mempengaruhi implementasi sistem informasi keuangan daerah adalah pertanggungjawaban anggaran secara akuntabel dan transparansi (Fien, *et.al.*, 2023).

Sesuai dengan hal-hal yang sudah dijelaskan tersebut, maka penelitian ini menambahkan manajemen keuangan (*Finance Management*) dalam model implementasi system informasi keuangan daerah. Manajemen Keuangan (*Finance Management*) mencakup seluruh kegiatan usaha yang berkaitan dengan bagaimana modal suatu perusahaan digunakan, dikumpulkan, dan dikelola untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Secara umum pengelolaan keuangan daerah dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu pengelolaan pendapatan daerah dan pengelolaan belanja daerah (Maria, *et.al.*, 2023). Dalam hasil uji penelitian yang sudah dikemukakan Nasution (2018) yang menyimpulkan bahwa kinerja pemerintah harus maksimal dalam mempertanggungjawabkan anggaran daerah, agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel dengan menerapkan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). Dengan berbagai pendapat yang sudah disimpulkan, maka peneliti ingin melakukan penelitian tentang Sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) dengan menggunakan manajemen keuangan (*Finance Management*) sebagai variabel moderasi. Hal tersebut karena peneliti ingin melihat seberapa kuat hubungan Akuntabilitas Finansial (*financial accountability*) dapat mempengaruhi penerapan SIMDA.

SIMDA mempengaruhi kualitas atas laporan pertanggungjawaban keuangan secara efektif, akuntabel dan transparansi (Rahmatia & M.Irwan, 2020). Perubahan sistem akuntansi khususnya pada sektor publik terus mengalami perkembangan, peristiwa sektor publik di Indonesia ditandai semakin meningkatnya tuntutan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana publik (Inessa, 2018 dalam Adetya *et.al.*, 2021:25). Untuk mendukung

akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara, perlu dibuatkan pengembangan melalui kebijakan akuntansi pemerintah, seperti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Hal tersebut dapat diartikan pertanggungjawaban keuangan (*financial accountability*) daerah dilaksanakan secara sistematis, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab, dalam memperlancar kegiatan pertanggungjawaban badan pengawas keuangan dan pembangunan (BPKP) menerapkan SIMDA dalam organisasi tersebut tujuannya untuk memperlancar kegiatan pengelolaan keuangan. Pertanggungjawaban keuangan (*financial accountability*) merupakan tanggungjawab lembaga publik untuk menggunakan uang negara (uang publik) secara efektif, ekonomi dan efisien, tanpa pemborosan, kehilangan dana atau korupsi (Ubaidillah, 2019). Pertanggungjawaban keuangan merupakan akuntabilitas keuangan yang menggambarkan setiap transaksi moneter yang terjadi dalam suatu organisasi dicatat melalui sistem dan aturan atau suatu system untuk mencatat, mengklasifikasikan dan merangkum informasi untuk berbagai macam tujuan (Felisitas *et.al.*, 2022).

Faktor lain yang mempengaruhi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) yaitu *Accountability*. Akuntabilitas ditandai dengan beberapa karakteristik yaitu, kemampuan memberikan informasi administrasi publik secara cepat, terbuka dan akurat kepada masyarakat, kemampuan memberi pelayanan yang memuaskan dan layak diterima masyarakat, dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan ruang partisipasi untuk melakukan tindakan public meliputi proses pembangunan dan pengelolaan, dapat menjelaskan dan melaporkan setiap ketertiban umum secara tepat, dan berperan sebagai fasilitas umum untuk mengevaluasi tingkat pencapaian terlaksananya program pemerintah (Dito, 2018). Pemerintah daerah harus menggunakan SIMDA untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan dan efisiensi pemerintahan (Gowon *et.al.*, 2021). Penelitian oleh Maria *et.al.* (2023) menyimpulkan bahwa dalam penerapan sistem informasi akuntansi daerah, akuntabilitas mempunyai dampak yang positif dan menentukan terhadap hasil keuangan daerah.

Selanjutnya Faktor lain yang mempengaruhi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) yaitu *transparency*. Penelitian oleh Dito (2018) variabel transparansi terhadap kinerja pemerintah dalam menerapkan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) menunjukkan adanya pengaruh signifikan dan positif. Penelitian Elkha & Wahidawati (2020) menyatakan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan serta pengendalian internal dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah di OPD Kabupaten Gresik. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Edowati *et.al.* (2021) memperlihatkan akuntabilitas dan transparansi memiliki efek positif signifikan pada implementasi sistem informasi kinerja pemerintah daerah Kabupaten Deiyai. Penelitian oleh Elkha & Wahidawati (2020) menyatakan prinsip transparansi mempunyai dua aspek dalam penyelenggaraan pemerintahan secara terbuka terhadap informasi kebijakan pemerintah daerah, seperti hak masyarakat atas informasi dan komunikasi publik pemerintah. Kedua hal tersebut tidak mudah diimplementasikan apabila pemerintah tidak mampu bekerja dengan baik. Transparansi dimulai dengan manajemen kinerja yang baik. Transparansi harus diimbangi dengan kerahasiaan institusional dan informasi yang mempengaruhi privasi individu.

Berdasarkan penjelasan yang sudah dijelaskan, kesimpulannya adalah ada kemungkinan penerapan aplikasi SIMDA (Sistem informasi manajemen daerah) akan meningkatkan kualitas laporan keuangan karena memungkinkan penyajian laporan keuangan dengan tepat waktu, efisien dan transparan (Inessa, 2018). Pengaruh penerapan SIMDA dengan hasil pengujian hipotesis koefisien positif ini menunjukkan bahwa sistem informasi manajemen daerah atau SIMDA berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, karena penerapan sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) merupakan alat yang ideal untuk pengelolaan keuangan daerah (Felisitas *et.al.*, 2022). Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, pertanggungjawaban adalah semua bagian dari pengelolaan keuangan daerah. Dalam hal ini diperlukan manajemen keuangan (*Finance Management*) dalam mengelola anggaran sehingga terciptanya suatu anggaran dan direalisasi sesuai aturan yang disahkan dan mencapai target tertentu

(Angraini, 2021). Dalam penelitian ini *Finance Management* sebagai variabel moderator karena variabel moderator memiliki dampak (memperkuat dan memperlemah) dan hubungan antara variabel independen (*Financial Accountability, Accountability and Transparency*) dengan variabel dependen SIMDA F-MIS (Rahmatia & M.Irwan, 2020). *Finance Management* memoderasi pengaruh *Financial Accountability* dan berpengaruh terhadap Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah karena *Finance Management* mampu mempertanggungjawabkan anggaran secara efisien untuk mencapai tujuan yang ditetapkan (Inessa, 2018). Untuk pengalokasian dan pertanggungjawaban anggaran secara efisien diterapkan sistem informasi manajemen daerah (Andi *et.al.*, 2022).

Melihat hal yang sudah dijelaskan di atas, maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh *Financial Accountability, Accountability and Transparency* serta *Finance Management* sebagai Variabel Moderasi terhadap Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) *Financial Management Information System* (FMIS) SIMDA F-MIS”**.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai latar belakang di atas, maka permasalahan penelitian ini ialah:

1. Apakah *Financial Accountability* (FA) berpengaruh terhadap Penerapan (SIMDA) *Financial Management Information System* (FMIS)
2. Apakah *Accountability* (A) berpengaruh terhadap Penerapan (SIMDA) *Financial Management Information System* (FMIS)
3. Apakah *Transparency* (T) berpengaruh terhadap Penerapan (SIMDA) *Financial Management Information System* (FMIS)
4. Apakah *Finance Management* dapat memoderasi pengaruh *Financial Accountability* (FA) terhadap Penerapan (SIMDA) *Financial Management Information System* (FMIS)
5. Apakah *Finance Management* dapat memoderasi pengaruh *Accountability* (A) terhadap Penerapan SIMDA F-MIS
6. Apakah *Finance Management* dapat memoderasi pengaruh *Transparency* (T) terhadap Penerapan SIMDA F-MIS

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh “*Financial Accountability, Accountability and Transparency* serta *Finance Management* sebagai Variabel Moderasi terhadap Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA F-MIS)”.

1.4 Manfaat Penelitian

Sehubungan dengan tujuan penelitian yang dikemukakan, maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Institusi
sebagai sumber literatur untuk menambah koleksi perpustakaan, terutama untuk mahasiswa Jurusan Akuntansi yang tertarik dengan penelitian tentang Akuntansi Sektor Publik.
2. Untuk Instansi
Sebagai kontribusi dan acuan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan akuntabilitas, tanggung jawab dan transparansi keuangan serta pengelolaan keuangan untuk mencapai pelaporan keuangan berkualitas sesuai standar akuntansi pemerintahan.
3. Untuk Peneliti
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan pemahaman khususnya mengenai tanggung jawab keuangan, pelaporan dan transparansi, serta tata kelola pengelolaan keuangan dalam penerapan sistem pengelolaan keuangan.

1.5 Kontribusi Penelitian

Terdapat hasil temuan dari penelitian-penelitian sebelumnya yang tidak searah. Damayanti (2018), Apriianggita Dinyvia Pramesti, *et. al.* (2020), Zeny Antika, *et. al.*(2020), Putu Ayu Puji Laksmi Dewi, *et. al.*(2021), Felisitas M.Wijaya, *et. al.*(2022), berhasil menemukan penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA F-MIS) dapat mempengaruhi pertanggungjawaban keuangan (*Financial Accountability*) yang lebih akurat. Persentase masing-masing

faktor yang diteliti meningkat. Sistem manajemen keuangan mempunyai dampak yang sangat besar terhadap laporan keuangan. Oleh karena itu, SIMDA sangat mudah digunakan berbagai pihak yang mempunyai kepentingan dan tentu saja informasi yang dihasilkan sangat relevan, akurat dan terkini. Semua penelitian tersebut sama-sama menggunakan populasi responden diorganisasi perangkat daerah (OPD) masing-masing peneliti. Berbanding terbalik dengan penelitian Ifdhal Adetya Rineldo, *et. al.* (2022), yang menemukan bahwa penerapan sistem informasi manajemen daerah tidak bisa mempengaruhi pertanggungjawaban keuangan daerah alasan dari penelitian ini karena keterbatasan ASN yang mampu mengoperasikan SIMDA dan masalah koneksi jaringan yang mengambat proses untuk mengakses SIMDA tersebut. Saran dari penelitian ini sehingga peneliti selanjutnya direkomendasikan meneliti lebih dari satu pemerintah daerah dan sebagai SKPD untuk mendapatkan hasil pengujian penelitian yang lebih baik dan lebih signifikan terhadap implementasi sistem keuangan daerah.

Penelitian yang menghasilkan temuan accountability berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerapan (SIMDA) Financial Management Information System (FMIS) Adelia Asensia *et. al.*(2020), Zeny Antika, *et. al.*(2020) Rahmatia Azzindani, *et. al.*(2020), Restu Agusti, *et. al.*(2021), Gowon, *et. al.*(2021), karena penelitian yang dilakukan untuk menjamin keakuratan, objektivitas dan ketepatan waktu penyampaian informasi maka dibutuhkan suatu informasi system yang bisa diandalkan artinya akuntabilitas berpengaruh signifikan dan positif terhadap penerapan sistem akuntansi daerah.

Penelitian yang dilakukan Dito Aditia Darma Nasutionet (2018), Elkha, *et. al.* (2020), Edowati, *et.al*, (2021), Somad (2023), menemukan bahwa transparansi (*transparency*) berpengaruh terhadap penerapan sistem informasi keuangan daerah. Menyediakan informasi yang cukup untuk mempermudah pemahaman dan penggunaan untuk mengontrol dan evaluasi kinerja masing-masing organisasi satuan kerja dan pertanggungjawaban keuangan secara transparansi berpengaruh signifikan dan dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Penelitian-penelitian sebelumnya menemukan hasil penelitian yang tidak konklusif. Penelitian Ifdhal Adetya Rineldo, *et. al.*(2022), menemukan bahwa

manajemen keuangan (*finance Management*) tidak ada hubungan langsung yang signifikan terhadap penerapan SIMDA. Alasan dari penelitian ini karena keterbatasan pegawai atau admin yang mampu mengoperasikan SIMDA dan masalah jaringan internet yang menghambat proses untuk mengakses sistem informasi keuangan daerah (SIMDA) tersebut. Namun, hal tersebut tidak didukung oleh penelitian-penelitian lainnya yaitu Andi Nurhaedah , *et. al.*(2022), Inessa (2018) yang menemukan bahwa manajemen keuangan mampu memperkuat variabel *financial accountability* dan berpengaruh terhadap penerapan sistem informasi manajemen daerah karena *finance management* sesuai regulasi mampu mempertanggungjawabkan anggaran secara efisien untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Pengalokasian dan pertanggungjawaban anggaran secara efisien diterapkan SIMDA.

Penelitian ini berjudul “Pengaruh *Financial Accountability, Accountability and Transparency* serta *Finance Management* sebagai Variabel Moderasi terhadap Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA F-MIS)”. Penelitian ini perlu dilakukan pengujian untuk menguji kembali penelitian-penelitian sebelumnya yang belum konklusif. Selain itu, penelitian ini menggunakan sampel pegawai negeri sipil (PNS) yang menggunakan SIMDA pada instansi pemerintahan di Indoensia.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini disusun secara sistematis sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Bagian ini merupakan pengantar penelitian berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Bagian ini berupa Landasan Teori untuk memberi pertanggungjawaban tentang dasar teori sebagai pusat penelitian dan ditampilkan Kerangka Pemikiran.

BAB III: Metode Penelitian

Bagian ini menyajikan Desain Penelitian, Populasi, Sampel, Besar Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel, Variabel Penelitian Dan. Definisi Operasional Variabel, Prosedur Pengumpulan Data dan Teknik Analisis.

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bagian ini menampilkan dan membahas hasil analisis pengaruh *Financial Accountability, Accountability and Transparency* serta *Finance Management* sebagai variabel moderasi terhadap Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA F-MIS).

BAB V: Kesimpulan dan Saran

Bagian ini menyajikan kesimpulan dan rekomendasi mekanisme perbaikan pelaksanaan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1. Landasan Teori

1.1.1. Teori *Human Computer Interaction* (HCI)

Pertengahan tahun 1980-an menyaksikan munculnya bidang penelitian baru yang dikenal sebagai *human-computer interaction* (HCI). Penelitian ini berbasis teori *human computer interaction* (HCI). *HCI* yaitu salah satu cabang ilmu yang mempelajari interaksi dan komunikasi antara pengguna dan sistem (Rakhmawati, 2022). Tujuan teori HCI yaitu mengembangkan sistem supaya aman, efektif, berguna, produktif, fungsional dan efisien. Teori ini menunjukkan bahwa kemudahan penggunaan perangkat lunak yang dirancang untuk menjadi sistem dengan kinerja efektif, memecahkan permasalahan hingga mempermudah untuk dipelajari (Fallman, 2011 dalam (Rakhmawati, 2022):160)). SIMDA sebagai aplikasi perencanaan, penganggaran sampai dengan pelaksanaan, tata usaha dan pelaporan keuangan daerah. SIMDA sebagai aplikasi yang dapat digunakan sebagai integrasi antara perencanaan dan pelaporan keuangan daerah dan dapat membantu pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya finansial dengan lebih baik. Pelaporan keuangan daerah bukan hanya berkaitan dengan fisik pendapatan dan kas, tetapi terkait dengan barang milik daerah dan pelaporan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Penggunaan teori ini mengacu tahun 2022 SIMDA Keuangan versi 2.9.0.9 sudah *update system* menjadi SIMDA-*Next Generation* (SIMDA-NG) atau SIMDA *Financial Management Information System* (disingkat SIMDA FMIS) diintegrasikan ke dalam aplikasi SIMDA perencanaan dan SIMDA keuangan.

1.1.2. Teori Sistem Informasi

Menurut Merlyn (2023) suatu sistem pada dasarnya yaitu sistem informasi dipandang sebagai sistem yang kompleks mencakup elemen-elemen yang saling berinteraksi, seperti orang, perangkat keras, perangkat lunak, data, dan

prosedur. Sistem ini bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan organisasi. Informasi adalah data yang telah diorganisir dan memiliki makna atau relevansi bagi penerima atau pengguna. Informasi memberikan pemahaman atau pengetahuan yang lebih dari sekadar kumpulan fakta atau angka. Proses pengorganisasian dan interpretasi data mengubahnya menjadi informasi untuk mengambil keputusan atau mendukung tujuan tertentu. Informasi dapat bersifat kontekstual dan dapat memberi pemahaman mendalam mengenai kondisi atau topik. Teori Sistem Informasi adalah suatu kerangka konseptual dan analitis yang membantu dalam memahami, merancang, dan mengimplementasikan sistem informasi. Teori ini membantu dalam menyusun pemahaman tentang bagaimana informasi dikumpulkan, diproses, disimpan, dan digunakan dalam suatu organisasi atau lingkungan tertentu. Teori Sistem Informasi memberikan landasan konseptual untuk merancang, mengelola, dan memahami sistem informasi dalam konteks organisasi atau lingkungan bisnis. Penerapan teori ini membantu organisasi dalam meningkatkan efisiensi operasional, mendukung pengambilan keputusan lebih baik, dan mencapai tujuan strategisnya.

Dalam konteks umum, informasi dan sistem informasi sangat terkait erat. Informasi adalah output yang dihasilkan oleh sistem informasi dari olah data, dan sistem informasi adalah kerangka kerja yang membantu mengelola dan memproses informasi. Sistem Informasi memainkan peran penting dalam organisasi dan masyarakat modern, memberikan dukungan bagi pengambilan keputusan, pengelolaan sumber daya, dan pelaksanaan berbagai kegiatan bisnis atau kegiatan lainnya.

Suatu sistem informasi terdiri dari berbagai komponen dengan bekerja bersama-sama untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan menyajikan informasi. Berikut adalah komponen utama sistem informasi: Perangkat Keras (*Hardware*): merupakan komponen fisik sistem informasi, termasuk server, komputer, perangkat penyimpanan (*hard drive*, *SSD*), perangkat jaringan, dan perangkat keras yang lain untuk pemrosesan data, perangkat lunak (*Software*): merupakan program-program atau aplikasi yang

diinstal pada perangkat keras untuk menjalankan fungsi-fungsi tertentu. Ini melibatkan aplikasi bisnis, sistem operasi, perangkat lunak basis data, dan perangkat lunak lainnya, data: merupakan fakta-fakta atau informasi yang dihasilkan, diakuisisi, atau disimpan sistem informasi. Data seperti teks, gambar, angka, suara, atau bentuk lainnya, prosedur: merupakan aturan atau pedoman yang mendefinisikan cara sistem informasi bekerja. Ini mencakup langkah-langkah operasional, aturan validasi data, prosedur keamanan, dan instruksi lainnya yang membantu dalam pengoperasian sistem, jaringan (*network*): merupakan infrastruktur yang memungkinkan komunikasi antara berbagai perangkat dalam sistem informasi. Jaringan mencakup koneksi lokal (LAN) atau jaringan luas (WAN) yang menghubungkan berbagai lokasi geografis, manusia (*people*): merupakan pengguna atau pemakai sistem informasi, termasuk pengembang, pengelola, dan pengguna akhir. Keterlibatan dan partisipasi manusia sangat penting dalam merancang, mengoperasikan, dan memelihara sistem informasi, kebijakan dan prosedur: merupakan aturan-aturan dan pedoman-pedoman yang mengatur penggunaan sistem informasi. Kebijakan dan prosedur ini dapat mencakup aturan keamanan, kebijakan penggunaan data, dan panduan lainnya untuk memastikan penggunaan yang efektif dan aman dari sistem informasi, fasilitas fisik dan ruang: merupakan lingkungan fisik tempat sistem informasi dioperasikan. Ini mencakup pusat data (*data center*), tempat penyimpanan perangkat keras, dan infrastruktur fisik lainnya, keamanan: merupakan mekanisme melindungi kerahasiaan, integritas dan ketersediaan informasi dalam sistem. Ini melibatkan pengaturan kontrol akses, perlindungan terhadap *malware*, dan langkah-langkah keamanan lainnya.

1.1.3. Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)

Aplikasi SIMDA yang dikembangkan BPKP sebagai aplikasi yang banyak dipakai oleh instansi pemerintahan di Indonesia untuk mengelola pengelolaan keuangan. Menurut Wahyu Gustyari, *et. al.*(2022) SIMDA merupakan aplikasi yang diterbitkan BPKP untuk mempermudah pengelolaan keuangan di lingkungan instansi pemerintahan.

Tujuan dari Aplikasi SIMDA antara lain:

- Memudahkan Pemda dalam membangun dan mengoperasikan sistem informasi keuangan dan kinerja untuk tata kelola yang baik termasuk mengendalikan transaksi dan data yang tepat;
- Menyajikan informasi secara menyeluruh, akurat dan tepat bagi pengelolaan Pemda, tujuannya untuk dasar pengambilan keputusan bagi pemangku kepentingan atau pihak yang terlibat;
- Memperkuat landasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

1.1.4. *Financial Management Information System (FMIS)*

Menurut Merlyn Delly Rumondor (2023) Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) sebagai penunjang kinerja tatakelola keuangan daerah Pemda Provinsi/Kota/Kabupaten terutama satuan pengelola keuangan di masing-masing OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Dengan demikian, tim BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) terus melakukan perbaikan teknologi informasi bahkan peraturan terbaru yang ada kaitannya dengan pengelolaan keuangan daerah seperti pengembangan.

Penggunaan SIMDA sebagai Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah/FMIS bertujuan supaya BPKP selalu menunjukkan peranan kualitas akuntabilitas dalam mengelola keuangan daerah dan supaya aplikasi SIMDA secara berkelanjutan dapat digunakan seiring kemajuan jaman. Aplikasi SIMDA di Pemda sudah dilakukan pengembangan menjadi FMIS untuk proses penatausahaan, pelaporan, mempertanggungjawabkan APBD sampai dengan pendukung dalam menyusun LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah). Penerapan aplikasi SIMDA sesuai perkembangannya diawali dari aplikasi dengan basis desktop sampai sekarang ini menggunakan basis website. Untuk selanjutnya, Badan Keuangan dan Pembangunan Umum (BPKP) akan mengembangkan lebih lanjut SIMDA Next-G (FMIS) berbasis web agar lebih dapat memenuhi kebutuhan pemerintah daerah/kota dan meningkatkan akuntabilitas.

1.1.5. Manajemen Keuangan (*Finance Management*)

Bahrullah Akbar (2002), mendefinisikan manajemen keuangan berarti menemukan sumber pembiayaan dana daerah berdasarkan potensi dan kemampuan terstruktur dengan mekanisme perencanaan secara tersistematis, pendayagunaan dana secara efisien dan efektif, dan pelaporan yang tepat waktu. Menurut penulis "The Essentials of Management", **Invalid source specified.**, pengertian manajemen keuangan yaitu usaha sebagai bentuk tanggungjawab atas perolehan dan penggunaan kekayaan perusahaan untuk mencapai tujuannya secara efektif. Pengelolaan keuangan daerah bertujuan agar kekayaan daerah dapat dimanfaatkan dengan efisien dan efektif, serta sumber daya dapat dialokasikan dan kesejahteraan dapat ditingkatkan. Pengelolaan keuangan merupakan seluruh kegiatan organisasi terkait penggunaan dan pengelolaan kekayaan organisasi untuk mencapai tujuan tertentu.

Manajemen Keuangan (*Finance Management*) mengacu pada seluruh aktivitas perusahaan terkait penggunaan, pengadaan, dan pengelolaan sumber daya perusahaan untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Dito Aditia Darma Nasution (2018) menyatakan secara umum manajemen keuangan daerah terbagi menjadi 2 bagian, yakni manajemen penerimaan dan pengeluaran daerah memiliki dampak besar terhadap keuangan dan pembiayaan pembangunan wilayah. Penilaian terhadap pengelolaan keuangan daerah dan sumber pendanaan pembangunan memiliki implikasi yang sangat signifikan.

1.1.6. Pertanggungjawaban Keuangan (*Financial Accountability*)

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.77 Tahun 2020 mengenai Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menimbang dalam rangka tertib administrasi dan akuntabilitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, diperlukan susunan tata cara tata usaha dan menyusun laporan pertanggungjawaban. Peraturan Pemerintah No.105 Tahun 2000 mengenai Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah pasal 37

ayat 1, Pemda menyampaikan laporan triwulanan kepada terkait pelaksanaan APBD.

Pertanggungjawaban dengan kata dasar tanggung-jawab bermakna kewajiban yang wajib dilaksanakan dan dipenuhi. Apabila tidak sanggup artinya muncul konsekuensi dari pelaksana tanggungjawab tersebut (Suhartini, 2019). Menurut Aprilianggita *et.al.* (2020) menyatakan upaya khusus dalam mencapai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah ialah memastikan bahwa laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah disusun sesuai dengan prinsip ketepatan waktu dan standar akuntansi pemerintah. Menurut Putu *et.al.* (2021) pertanggungjawaban keuangan adalah laporan keuangan yang dilengkapi dengan bukti bahwa uang telah diterima dan digunakan secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Laporan pertanggungjawaban berfungsi untuk mengevaluasi semua proses pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya, hasil evaluasi untuk bahan mempertimbangkan dan memperbaiki hingga meningkatkan kualitas kegiatan.

1.1.7. Transparansi (*Transparency*)

Transparansi, menurut teori pemerintah yaitu prinsip yang menjamin masing-masing individu mempunyai kebebasan dan akses mendapatkan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, termasuk informasi kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaan, hingga hasil dari tindakan tersebut. Andi Nurhaedah (2022) menyatakan transparansi sebagai tugas pengelola menjalankan prinsip transparansi atau keterbukaan dalam mengambil keputusan dan mengkomunikasikan informasi. Transparansi atau keterbukaan berkomunikasi bermakna informasi harus akurat, lengkap dan tepat waktu untuk semua pihak. Dilarang menyembunyikan, merahasiakan maupun menunda untuk diungkapkan. Damayanti (2018) menyatakan transparansi yaitu keterbukaan informasi dan sebagai komitmen para pemangku kepentingan untuk menerapkan tata kelola guna membangun pemerintahan yang bersih.

Dalam Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 2 menyatakan (1) Semua informasi publik harus terbuka

dan bisa diakses siapa pun yang membutuhkan informasi tersebut, (2) Pengecualian terhadap informasi publik harus ketat dan terbatas, (3) Pemohon informasi publik berhak memperoleh informasi dengan cepat, tepat waktu, dengan biaya yang terjangkau, dan prosedur yang sederhana, (4) Informasi publik yang dikecualikan harus bersifat rahasia sesuai ketentuan Undang-Undang, norma-norma, dan kepentingan umum.

Pengungkapan informasi yang tersedia dan kemudahan pemahaman sebagai alat mengelola dan mengevaluasi kinerja organisasi. Keterbukaan informasi adalah salah satu cara terpenting bagi pemerintah untuk memantau kegiatan dan memastikan akuntabilitas pemerintah. Mengembangkan transparansi berguna meningkatkan kepercayaan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Transparansi transaksi yaitu penentuan waktu registrasi dan pencatatan transaksi. Item ini mempengaruhi laporan keuangan. Jika transaksi tersebut tidak dicatat, maka transaksi tersebut tidak dicatat dalam laporan keuangan tahunan. Sebaliknya, setelah transaksi disetujui, transaksi tersebut tercermin dalam laporan keuangan (Adelia Asensia, *et. al.* 2022).

1.1.8. Akuntabilitas (*Accountability*)

1. Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas asalanya dari kata bahasa inggris "*accountability*" yang artinya tanggungjawab kepada masyarakat dari masing-masing tindakan. Badan keuangan daerah bertanggung jawab atas anggaran kota yang informasinya dipublikasikan secara berkala. Menurut Zeny Antika (2020) Prinsip akuntabilitas dimaksudkan agar kebijakan, tindakan atau kinerja suatu lembaga atau organisasi dapat diperhitungkan.

Akuntabilitas atau pertanggungjawaban adalah alat kontrol dari pencapaian hasil pelayanan publik untuk masyarakat dengan transparan dan terbuka. Definisi pertanggungjawaban dari para ahli terkait pengawasan publik dan akuntansi. Mardiasmo (2006) menyatakan pertanggungjawaban (*accountability*) yaitu komitmen untuk bertanggung jawab atas kegagalan dan keberhasilan dalam menjalankan misi organisasi dan supaya tercapai tujuan

yang sudah ditentukan. Pertanggungjawaban ini harus dilakukan secara teratur dengan menggunakan metode pertanggung jawaban.

Akuntabilitas harus dilaksanakan mengacu prinsip tertentu. Prinsip akuntabilitas antara lain menjamin konsistensi penggunaan sumber daya sesuai peraturan dan undang-undang, mempunyai prinsip dari pimpinan untuk semua staf organisasi dengan penilaian akuntabel, melaksanakan tujuan visi misi, hasil, dan manfaat dari organisasi, menginformasikan pencapaian dari sasaran hingga tujuan organisasi, menggunakan prinsip jujur, transparansi dan inovatif (Ifdhal *et. al.*, 2022). Akuntabilitas merupakan tanggung jawab untuk akuntabilitas dalam mengelola sumber daya dan menerapkan kebijakan yang diberikan kepada entitas pelaporan, dengan tujuan mencapai sasaran secara berkala. (Ade Lestari, 2022). Akuntabilitas ialah kewajiban untuk mengkomunikasikan tanggung jawab dan menjawab atau menjelaskan tindakan dan kegiatan pengurus kolektif seseorang/badan hukum/organisasi kepada pihak-pihak yang berhak atau berwenang untuk meminta keterangan tentang akuntabilitas.

Pelaporan pertanggungjawaban keuangan memerlukan kualitas informasi laporan keuangan berbentuk laporan untuk mengambil keputusan, yang harus didukung oleh kualitas pengelolaan pemerintah daerah dan tanggung jawab keuangan untuk menjaga kualitas informasi akuntansi benar-benar dapat diandalkan. Pelaporan keuangan berkualitas tinggi memerlukan prosedur pelaporan keuangan yang sedapat mungkin didasarkan pada pelaporan keuangan dan sistem akuntansi daerah. Penerapan beberapa undang-undang pemerintah daerah untuk memfasilitasi perolehan informasi keuangan yang diperlukan belum menjadi indikator penting bagi praktik tata kelola organisasi, khususnya di bidang pengelolaan keuangan daerah dan pelayanan publik. Untuk lebih memudahkan perolehan informasi keuangan maka diperlukan penerapan undang-undang pemerintah sebagai indikator kunci untuk menerapkan tata kelola pemerintahan. Sehingga, masih memerlukan penelitian yang mendalam khususnya terkait administrasi keuangan daerah, sistem akuntansi keuangan daerah serta asosiasi manajemen atau pelayanan umum.

Tanggung jawab pengelolaan keuangan daerah, yaitu. proses pengelolaan keuangan diawali merencanakan, melaksanakan, mengelola, mempertanggungjawabkan dan mengendalikan, pelaporannya harus secara realistis kepada masyarakat dan DPRD baik keberhasilan maupun kegagalan, dan harus dijadikan bahan penilaian pada tahun berikutnya.

2. Jenis-jenis Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan sebuah konsep yang kompleks dan penerapannya memang cukup sulit. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan akan institusi sektor publik. Tergantung pada objek yang diberi tanggung jawab, itu membentuk jenis tanggung jawab horizontal dan vertikal. Tanggung jawab vertikal berarti tanggung jawab kepada atasan, sedangkan tanggung jawab horizontal berarti tanggung jawab kepada masyarakat atau lembaga sejenis. Selain tipe horizontal dan vertikal di atas, ada beberapa tanggung jawab lain yang perlu diperhatikan.

a. Tanggungjawab Hukum dan Integritas

Akuntabilitas hukum dan kejujuran merujuk pada pertanggungjawaban lembaga atau individu terkait aktivitas penegakan hukum dan kepatuhan terhadap norma kejujuran. Ini mencakup kewajiban untuk tidak melakukan penyalahgunaan wewenang dan menjalankan tugas dengan itikad baik. Bagian dari akuntabilitas hukum adalah kewajiban untuk tidak menyalahgunakan wewenang yang dimiliki. Penyalahgunaan wewenang dapat melibatkan tindakan korupsi, nepotisme, atau pelanggaran etika lainnya. Akuntabilitas hukum dan kejujuran dapat membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga atau individu yang terlibat dalam penegakan hukum. Ini juga menjadi dasar penting dalam menjaga integritas dan moralitas dalam sistem hukum dan pemerintahan.

b. Akuntabilitas manajerial

Akuntabilitas manajerial merujuk pada pertanggungjawaban manajer terhadap cara mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dalam mencapai tujuan organisasi. Ini terkait efektivitas dan efisiensi manajerial, serta kemampuan manajer untuk mengelola sumber daya dan

mencapai hasil yang diinginkan. Manajer bertanggung jawab untuk mencapai tujuan organisasi. Akuntabilitas manajerial melibatkan kemampuan manajer untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengawasi strategi yang efektif untuk mencapai hasil yang diinginkan. Melalui penerapan akuntabilitas manajerial, organisasi dapat meningkatkan kinerja, mengelola risiko, dan mencapai tujuan dengan lebih efektif. Akuntabilitas ini menciptakan dasar untuk budaya kerja yang responsif, adaptif, dan fokus pada pencapaian hasil yang berkelanjutan.

c. Akuntabilitas program

Akuntabilitas program mengacu pada pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan dan hasil program tertentu. Ini melibatkan kemampuan orang yang bertanggung jawab atas program untuk menunjukkan keberhasilan, efektivitas, dan efisiensi dalam pelaksanaan program tersebut. Orang yang bertanggung jawab harus dapat menunjukkan kejelasan dalam perencanaan dan desain program. Ini mencakup merumuskan tujuan program, menyusun rencana aksi, dan mengidentifikasi sumber daya yang dibutuhkan. Akuntabilitas program memerlukan kemampuan untuk mengelola dan melaksanakan program sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Orang yang bertanggung jawab harus memastikan bahwa kegiatan program berjalan dengan efektif dan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Melalui implementasi akuntabilitas program, organisasi dapat memastikan bahwa setiap program yang dijalankan dapat memberikan nilai tambah, mencapai tujuan yang diinginkan, dan memberikan manfaat yang optimal sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan.

d. Akuntabilitas kebijakan

Pertanggungjawaban ini terkait lembaga publik terhadap bermacam kebijakan. Perihal ini, orang yang memiliki peran dalam lembaga publik harus bisa mempertanggungjawabkan masing-masing kebijakan. Pertanggungjawaban yang harus dilakukan berdasarkan aspek berikut ini,

tujuan, alasan menentukan kebijakan, manfaat yang ditimbulkan hingga dampak, sampai dengan bermacam hal negatif. Beberapa contoh akuntabilitas kebijakan yaitu keterbukaan dan transparansi: kebijakan publik harus dibuat dengan keterbukaan dan transparansi. Pemerintah atau lembaga yang bertanggung jawab harus memastikan bahwa informasi tentang proses pembuatan kebijakan, termasuk pertimbangan, data, dan pengaruh pemangku kepentingan, tersedia untuk publik. Responsif terhadap perubahan dan umpan balik: Pemerintah atau lembaga yang bertanggung jawab harus responsif terhadap perubahan dalam kebutuhan masyarakat dan umpan balik dari pemangku kepentingan. Kemampuan untuk menyesuaikan kebijakan berdasarkan perubahan kondisi atau masukan dari masyarakat adalah bagian dari akuntabilitas.

e. Akuntabilitas finansial

Akuntabilitas finansial adalah aspek penting dalam manajemen keuangan lembaga publik, dan tanggung jawab keuangan mencakup kewajiban untuk memakai dana publik secara efisien, ekonomis dan efektif tanpa kebocoran uang, pemborosan, bahkan tidak dikorupsi. Penggunaan dana publik secara ekonomis didefinisikan sebagai suatu lembaga publik yang harus menggunakan dana publik dengan cara yang ekonomis, yaitu memaksimalkan hasil dengan meminimalkan biaya. Hal ini melibatkan perencanaan yang baik, pemilihan solusi yang paling efisien, dan penggunaan sumber daya secara bijak.

Indikator akuntabilitas finansial sebagai berikut:

1. Integritas keuangan.

Integritas keuangan adalah prinsip fundamental dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang dapat dipercaya dan memberikan gambaran yang jujur tentang kinerja dan posisi keuangan suatu entitas. Praktik bisnis yang menjunjung tinggi integritas keuangan dapat membantu membangun kepercayaan stakeholder dan mendukung

keberlanjutan jangka panjang perusahaan. Integritas keuangan dalam konteks laporan keuangan merujuk pada karakteristik laporan yang menunjukkan keadaan sebenarnya tanpa adanya penyembunyian atau manipulasi informasi. Integritas keuangan menjadi pondasi penting membangun kepercayaan pemakai laporan keuangan terhadap kredibilitas dan keandalan informasi yang disajikan.

2. Pengungkapan.

Konsep pengungkapan menekankan pentingnya memberikan gambaran menyeluruh tentang kinerja keuangan dan posisi keuangan suatu organisasi. Hal ini mencakup informasi yang mungkin tidak terlihat secara langsung dari angka-angka dalam laporan keuangan utama, tetapi memiliki dampak signifikan terhadap pemahaman kondisi keuangan suatu entitas. Pengungkapan (disclosure) dalam konteks laporan keuangan mengacu pada kewajiban menampilkan informasi akurat, cukup, dan mudah dipahami para pemakai laporan keuangan. Pengungkapan ini mempunyai tujuan memberi gambaran yang lengkap mengenai kondisi keuangan dan kinerja organisasi. Dengan cara ini, para pemakai laporan keuangan dapat membuat keputusan yang lebih informasional.

Pengungkapan tidak hanya menjadi kewajiban hukum dan etika, tetapi juga alat penting untuk membangun kepercayaan antara entitas dan para pemakai laporan keuangannya. Dengan memberikan informasi yang jelas, lengkap, dan relevan, organisasi dapat meningkatkan transparansi, sehingga dapat membantu dalam mengambil keputusan oleh pemakai laporan keuangan.

3. Ketaatan.

Ketaatan terhadap peraturan, terutama dalam konteks akuntansi syariah, merupakan aspek kunci yang menekankan prinsip keadilan, kebenaran, dan pertanggungjawaban. Akuntansi syariah mengikuti prinsip-prinsip Islam yang melibatkan aspek moral dan etika dalam pelaporan keuangan. Ketaatan terhadap prinsip pertanggungjawaban menekankan pentingnya bertanggung jawab dalam melakukan pencatatan keuangan. Para pihak yang terlibat dalam proses pencatatan harus memahami dan mematuhi tanggung jawab mereka.

1.2. Kajian Penelitian Sebelumnya

Beberapa penelitian terdahulu untuk acuan penelitian ini. Peneliti mengharapkan penelitian terdahulu bisa mempermudah menyusun penelitian yang akan dilakukan.

Penelitian dari Damayanti, (2018) berjudul Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pemerintah mempergunakan metode *purposive sampling* dan penggunaan data primer berupa kuesioner dalam mengumpulkan data. Hasil penelitian ini memperlihatkan variabel akuntabilitas, transparansi mempengaruhi kinerja pemerintah secara positif dalam menerapkan SIMDA pada SKPD Kota Surabaya.

Penelitian kedua yaitu penelitian dari Rahmatia Azzindani, *et.al.*(2020) Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah (APD) dan Implementasi SIMDA terhadap Kualitas Laporan Keuangan dimediasi Good Government Governance. Penelitian ini memiliki tujuan membuktikan secara empiris pengaruh implementasi kinerja APD dan SIMDA terhadap kualitas laporan keuangan melalui variabel mediasi yaitu *good government governance* (tata kelola pemerintahan yang baik). Penelitian ini menggunakan data path analysis, Intervening Regression Analysis (IRA) dan Sobel Test untuk pengujian variabel mediasi. Hasil penelitiannya memperlihatkan implementasi SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) memberi pengaruh kualitas laporan keuangan dan

good government governance memediasi pengaruh kinerja aparatur pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan. Temuan lainnya yaitu mengemukakan kinerja aparatur pemerintah daerah memiliki pengaruh terhadap tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, walaupun *good government governance* tidak memediasi keterkaitan SIMDA terhadap kualitas laporan keuangan Pemda.

Penelitian ketiga dari Witra Maison, *et.al.* (2020) berjudul Pengaruh Implementasi SIMDA terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Dukungan Manajemen Puncak sebagai Variabel Moderating memakai metode purposive sampling dan data penelitian ini yaitu data primer berupa penyebaran kuesioner dalam pengumpulan data. Hasil penelitiannya yakni implementasi SIMDA mempengaruhi secara relevan pada Kualitas Laporan Keuangan pada OPD Kota Solok. Variabel Moderasi dukungan Manajemen dapat memoderasi pengaruh SIMDA terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada OPD Kota Solok.

Penelitian selanjutnya oleh Adelia Asensia, *et. al.*(2020) berjudul Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Pemda Provinsi Sulawesi Selatan ditinjau dari Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui implementasi sistem akuntansi keuangan daerah untuk menciptakan akuntabilitas dan transparansi keuangan Pemda Provinsi Sulsel. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang memberikan gambaran teori-teori yang ada dalam PSAK kemudian disesuaikan dengan praktik di Pemda Provinsi Sulawesi Selatan. Teknik pengumpulan data yang dipakai yaitu dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitiannya setelah ditinjau dari Sistem Akuntansi Keuangan Daerah disimpulkan bahwa Provinsi Sulawesi Selatan telah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah sesuai dengan “UU No. 71 Tahun 2010 dan Permendagri 64 Tahun 2013”.

Penelitian selanjutnya yakni penelitian yang dilakukan oleh Ferdinant Amba Sugi, (2021) berjudul Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Toraja Utara Akuntabilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara. Metode yang digunakan penelitian ini ialah analisis data dilakukan dengan cara deskriptif, yaitu dengan menggambarkan bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Toraja Utara. Tahapan yang dilakukan adalah setelah data

primer diperoleh melalui wawancara mendalam dari informan. Hasil penelitian disimpulkan bahwa dalam Penyajian Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) kepada publik dapat disimpulkan bahwasannya pemerintah daerah cukup akuntabel dan hasil audit BPK atas Laporan Keuangan Pemda telah mendapat opin WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) tetapi masih ditemukan masalah dan kendala yang harus segera dibenahi.

Penelitian selanjutnya ialah penelitian yang dilakukan oleh Aprilianggita Dinyvia Pramesti, *et. al.*(2020) berjudul Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah pada Dinas Kesehatan Kota Tegal. Penelitian ini bertujuan mengetahui penerapan SIMDA Keuangan dalam olah data keuangan. Metode penelitian yang yang dipakai yakni teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, studi kasus, dan teknik angket menggunakan basis kuesioner. Hasil penelitiannya ialah SIMDA Keuangan sangat mempengaruhi penyajian laporan keuangan. Dengan demikian, SIMDA memudahkan pihak yang mempunyai kepentingan dan tentu saja informasi tepat waktu, relevan dan sangat akurat.

Penelitian selanjutnya yang berhasil peneliti temukan adalah penelitian Zeny Antika, *et. al.* (2020) berjudul Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan, dan Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Penelitian ini mempunyai tujuan menguji pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan dan pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Metode teknik pengambilan sampel menggunakan simple random sampling. Metode pengumpulan data yang diterapkan penelitian ini ialah metode survei, melalui data primer yang berasal dari kuesioner yang disebarakan pada responden. Hasil penelitiannya menunjukkan aksesibilitas laporan keuangan, sistem akuntansi keuangan daerah dan pengendalian internal mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah secara positif.

Penelitian selanjutnya yaitu penelitian Ida Ayu Prabadewi Apsari, *et. al.*(2020) Penelitian ini menguji kualitas sistem informasi, pengaruh kualitas informasi dan perceived usefulness pada kepuasan pengguna SIMDA. Data

dikumpulkan melalui instrumen penelitian seperti kuesioner. Hasil analisis memperlihatkan kualitas informasi, sistem informasi, dan perceived usefulness memiliki pengaruh langsung terhadap kepuasan pengguna SIMDA. Dengan demikian kualitas informasi, kualitas sistem informasi, dan perceived usefulness yang semakin baik maka kepuasan pengguna SIMDA akan meningkatkan.

Penelitian selanjutnya yang berhasil peneliti temukan adalah Meisy Hendri, *et. al.*(2020) berjudul Pengaruh Kualitas SDM, Implementasi SIMDA dan Penerapan SAP Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemda (Studi Empiris Pada OPD Provinsi Sumbar). Metode yang dipakai ialah hubungan sebab akibat antar variabel melalui uji hipotesis. Metode Total Sampling. Jenis data penelitian ini yaitu data primer. Kuesioner digunakan dalam teknik pengumpulan data. Hasil penelitiannya ialah kualitas SDM mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemda secara positif, dan penerapan standar akuntansi pemerintahan mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemda secara positif. Sedangkan Variabel implementasi SIMDA tidak mempunyai pengaruh pada kualitas laporan keuangan pemerintah OPD Provinsi Sumbar. Variabel penelitian mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemda sangat rendah, diasumsikan dengan kapabilitas pegawai ketika melaksanakan pengelolaan SIMDA masih kurang.

Penelitian selanjutnya yang berhasil peneliti temukan adalah Muhammad Irfan Nasution, *et. al.*(2021) dengan judul Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan. Tujuan penelitian ini yakni mengetahui pelaksanaan SIPD di Medan. Metode penelitian yaitu deskriptif menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan BPKAD sudah memanfaatkan aplikasi SIPD untuk melaksanakan kebijakan terhadap pelaksanaan kegiatan sebagai program pemerintah kota Medan. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah mempunyai fungsi sebagai operasional sistem perencanaan pembangunan daerah dan sistem keuangan daerah, serta sistem pemerintahan daerah yang lain, termasuk sistem pengawasan dan pembinaan pemerintahan daerah.

Penelitian selanjutnya dari Putu Ayu Puji Laksmi Dewi, *et. al.* (2021) berjudul Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)

untuk Pengelolaan Keuangan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi sistem informasi manajemen daerah pada sekretariat daerah Kota Mataram bagian umum. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif menggunakan pendekatan fenomenologi. Data dikumpulkan menggunakan teknik observasi dan kepustakaan mencakup dokumentasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian memperlihatkan implementasi sistem informasi manajemen daerah terlaksana efektif, efisien dan lancar. Hal tersebut diketahui dari pegawai yang paham dari penggunaan SIMDA, keberhasilan sasaran dan program, kesesuaian hasil dan kepuasan penggunaan SIMDA. Faktor lainnya yang dimiliki sekretariat daerah Kota Mataram memudahkan implementasi SIMDA bisa terlaksana secara efektif seperti sumber daya, komunikasi, struktur birokrasi dan disposisi.

Penelitian selanjutnya ialah penelitian yang dilakukan oleh Intan Rakhmawati, (2022) dengan judul Analisa Simda-Next Generation (Simda-NG). Jenis penelitian adalah analitis deskriptif. Hasilnya adalah Penerapan SIMDA memberikan efektivitas sistem untuk pencatatan dan pelaporan transaksi yang lebih baik.

Penelitian selanjutnya yang berhasil peneliti temukan adalah Andi Nurhaedah, *et. al.* (2022) berjudul Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, dan Transparansi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai. Menggunakan metode purposive sampling dan data yang dipakai penelitian ini yakni data primer berupa kuesioner dalam pengumpulan data. Hasil penelitian ini memperlihatkan Pengelolaan Keuangan Daerah mempengaruhi secara negatif dan tidak relevan terhadap Kinerja Keuangan Pemda, sementara itu Akuntabilitas memiliki pengaruh positif dan relevan terhadap Kinerja Keuangan, dan Transparansi mempengaruhi secara positif dan relevan terhadap kinerja keuangan Pemda Kabupaten Sinjai.

Penelitian selanjutnya penelitian Wahyu Gustyari, *et. al.* (2022) berjudul Analisis Kesuksesan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). Sesuai dengan Model Delone dan Mclean 2003 (Penelitian pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Langsa). Menggunakan teknik sampling non-probability. Hasil

penelitian ini memperlihatkan kualitas informasi, sistem, layanan, dan minat pengguna secara bersamaan mempengaruhi kepuasan pengguna, kualitas sistem sebagian mempengaruhi kepuasan pengguna, kualitas informasi sebagian mempengaruhi kepuasan pengguna, kualitas layanan sebagian mempengaruhi kepuasan pengguna, dan minat pengguna sebagian mempengaruhi kepuasan pengguna. Hasilnya memperlihatkan Implementasi aplikasi SIMDA berhasil dan sangat membantu dalam mempertanggungjawabkan keuangan pemerintah.

Penelitian selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Ifdhal Adetya Rineldo, S.AP, *et. al.*(2022) dengan judul Analisis Penerapan SIMDA dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas pada BPKPD Kabupaten Kerinci. Menggunakan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data, seperti dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitiannya ialah Implementasi SIMDA tidak berpengaruh terhadap Transparansi dan Akuntabilitas pada BPKPD Kabupaten Kerinci, hal ini di karenakan permasalahan jaringan internet yang bermasalah dan perlu menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten dan berbasis akuntansi agar memperoleh keberhasilan yang baik.

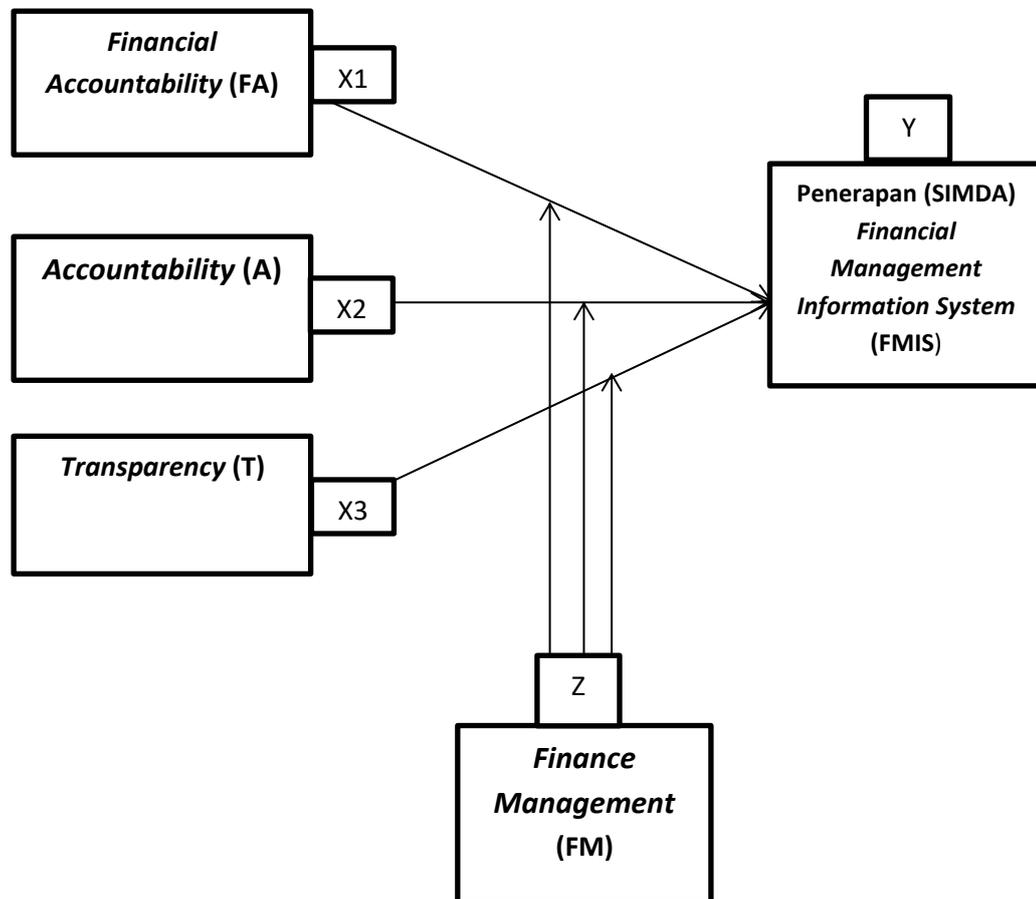
Penelitian selanjutnya penelitian Ade Lestari, *et. al.*(2022) dengan judul Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah dalam Pengelolaan Retribusi Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kota Mataram. Menggunakan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui teknik pengamatan (Observasi, dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitiannya adalah Implementasi SIMDA berpengaruh secara signifikan dalam Pengelolaan Retribusi Daerah, karena sistem ini mendukung ketepatan waktu, relevan dan andal.

Penelitian selanjutnya yaitu Yudha Herlambang Cahya Pratama, (2022) berjudul Literatur Review: Analisa Faktor Kesuksesan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode *Systematic Literatur Review* (SLR). Hasil penelitian menunjukkan ada empat faktor untuk memperlancar penerapan SIMDA. Faktor komunikasi, faktor sikap dan faktor struktur birokrasi sampai dengan faktor sumber daya manusia digunakan dalam analisis penelitian ini. Faktor tersebut didukung manajemen puncak dan fitur aplikasi SIMDA.

Penelitian selanjutnya dari Rumondor, *et. al.*(2023) berjudul Analisis Implementasi Aplikasi Sistem Informasi terhadap Pengelolaan Keuangan dalam Pelaksanaan Belanja Daerah pada BKAD Provinsi Sulawesi Utara. Menggunakan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara semi terstruktur (in-depth interview), dokumentasi dan observasi. Hasil dalam penelitian ini adalah terdapat masalah atau kendala dalam menerapkan Aplikasi ini disebabkan oleh bentuk aplikasi yang belum sempurna, kurangnya komunikasi dan sumber daya berupa fasilitas sarana dan prasarana, Sumber daya berupa satuan pengelola keuangan/fasilitas fisik, harus selalu melaksanakan pelatihan.

Penelitian selanjutnya Nissa Yunita, *et. al.* (2023) berjudul Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah dan Kompetensi SDM Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Sukabumi). metode yang digunakan yaitu metode kuantitatif dan asosiatif. Teknik pengumpulan data yang dipakai penelitian ini yaitu berupa kuesioner atau angket dan menggunakan skala likert. Hasil penelitiannya ialah SIMDA mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan secara positif signifikan. Variabel Kompetensi SDM mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan secara positif signifikan. Kesimpulannya Variabel Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) dan Variabel Kompetensi SDM, kedua variabel ini berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Penerapan SIMDA dan kompetensi SDM yang baik, akan menghasilkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparansi.

1.3. Kerangka Berpikir



Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir

Sumber: Data Penelitian, 2023

Berdasarkan pada kerangka penelitian yang telah digambarkan diatas, penelitian ini menggunakan tiga variabel independen antara lain *Financial Accountability (FA)*, *Accountability (A)*, *Transparency (T)*. Penelitian ini juga menggunakan satu variabel dependen yaitu penerapan SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) FMIS (*Financial Management Information System*) dan satu variabel moderasi yaitu *Finance Management (FM)*. Menurut beberapa penelitian yang sudah meneliti variabel ini, ketiga variabel independen ini mempengaruhi variabel dependen.

Pertanggungjawaban keuangan (*Financial Accountability*) daerah secara tertib, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan menerapkan sistem informasi dalam organisasi tersebut tujuannya untuk memperlancar kegiatan pengelolaan keuangan. Pemerintahan mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan (*Accountability*) laporan keuangan yang akuntabel dan transparan setiap semester dan di akhir tahun, dengan cara Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan menerapkan sistem informasi dalam organisasi tersebut tujuannya untuk memperlancar kegiatan pengelolaan keuangan.

Pemerintahan mempunyai kewajiban untuk keterbukaan dan kejujuran dalam informasi keuangan kepada masyarakat atas dasar keyakinan masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui secara transparan dan menyeluruh pertanggungjawaban pemerintah terkait pengelolaan keuangan yang telah dipercayakan kepada mereka, dengan cara menerapkan sistem informasi manajemen daerah dalam organisasi tujuannya untuk lebih transparan dalam penginputan transaksi yang telah berjalan. Pemerintahan harus mampu mengontrol dan mengelola APBD secara efisien, tertib, efektif, bertanggungjawab dan transparan sesuai undang-undang, dengan cara melakukan manajemen keuangan (*Finance Management*) tujuannya memperoleh dana melalui mengurangi biaya serta berupaya menggunakan dan mengalokasikan dana tersebut secara efisien. Dalam meminimalkan biaya dan anggaran yang sudah ditetapkan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan menerapkan sistem informasi manajemen daerah untuk memperlancar pengelola keuangan pemerintahan dalam mengatur dan memantau jumlah pemasukan ataupun pengeluaran anggaran.

1.4. Pengembangan Hipotesis

1.4.1. Pengaruh *Financial Accountability* (FA) terhadap Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) *Financial Management Information System* (FMIS)

Pertanggungjawaban keuangan (*Financial Accountability*) dengan efisien, tertib, efektif, bertanggungjawab dan transparan sesuai regulasi yang sudah ditetapkan. Laporan pertanggungjawaban bendahara ialah laporan yang dilakukan bendahara penerimaan/pengeluaran atas uang/surat berharga yang dikelola sebagai pertanggungjawaban pengelolaan uang. Penelitian yang dilakukan oleh Felisitas M. Wijaya, (2022) menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban keuangan (*Financial Accountability*) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerapan SIMDA *Financial Management Information System (FMIS)*. Penelitian oleh Angraini, (2016) menyimpulkan pertanggungjawaban laporan keuangan daerah memegang peran krusial dalam menciptakan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang umum diterima dan memenuhi karakteristik kualitatif. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel perlu diterapkan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Penelitian ini diperkuat oleh Maria Laetitia Boliina Kromen, *et.al.* (2023) menyimpulkan bahwa Pengelolaan keuangan daerah mempengaruhi positif maupun krusial bagi kinerja keuangan daerah dalam mengimplementasikan sistem informasi akuntansi daerah.

Berdasarkan uraian konsep dan hasil-hasil penelitian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis pertama yaitu:

H1 : *Financial Accountability* (FA) berpengaruh terhadap Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) *Financial Management Information System (FMIS)*

1.4.2. Pengaruh *Accountability* (A) terhadap Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) *Financial Management Information System (FMIS)*

Akuntabilitas bisa terwujud apabila menerapkan SIMDA yang baru sesuai paradigma *good governance*. Salah satu dari sekian banyak Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang digunakan di organisasi pemerintahan adalah SIMDA. Sistem ini wajib digunakan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintahan (Gowon, Rizka , 2021).

Penelitian ini diperkuat oleh Restu Agusti, *et.al.*(2021) akuntabilitas harus dibuat sesuai sistem informasi yang handal supaya terjamin objektivitas, keabsahan dan ketetapan waktu dalam menyampaikan informasi artinya akuntabilitas berpengaruh signifikan dan positif terhadap penerapan sistem akuntansi daerah.

Berdasarkan uraian konsep dan hasil penelitian diatas, maka rumusan hipotesis kedua adalah:

H2: *Accountability (A)* berpengaruh terhadap Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) *Financial Management Information System (FMIS)*

1.4.3. Pengaruh Transparency (T) terhadap Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) *Financial Management Information System (FMIS)*

Transparansi menekankan bahwa segala administrasi keuangan dilakukan secara terbuka, baik dalam informasi pencatatan maupun dalam mengelola anggaran. Penelitian yang dilakukan oleh Dito Aditia Darma Nasution, (2018) menyimpulkan bahwa variabel transparansi terhadap Kinerja Pemerintah dalam menerapkan SIMDA menunjukkan adanya pengaruh signifikan. Penelitian yang dilakukan oleh Elkha dan Wahidawati, (2020) memperlihatkan pengaruh positif terhadap kinerja Pemda di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Gresik dapat ditemukan melalui penerapan pengendalian internal, akuntabilitas pengelolaan keuangan, dan transparansi pengelolaan keuangan. Selanjutnya Edowati, *et.al.*(2021) menyebutkan akuntabilitas dan transparansi mempengaruhi secara langsung terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Deiyai. Hasil penelitian yang di lakukan oleh Dito Aditia Darma Nasution, (2018) ini selaras dengan penelitiannya Edowati, *et.al.* (2021) dan Elkha dan Wahidawati, (2020) yang menyimpulkan transparansi mempengaruhi kinerja keuangan Pemda. Kesimpulannya adalah dengan menyediakan informasi yang mudah dimengerti dan memadai untuk memantau dan mengevaluasi hasil kinerja dalam organisasi. Ketersediaan akses untuk memperoleh informasi juga memiliki peranan yang sangat penting dalam menjamin pertanggungjawaban pemerintah.

Berdasarkan uraian konsep dan hasil penelitian diatas, maka rumusan hipotesis ketiga adalah:

H3: *Transparency (T)* berpengaruh terhadap Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) *Financial Management Information System (FMIS)*

1.4.4. Pengaruh *Finance Management (FM)* dalam memoderasi pengaruh *Financial Accountability (FA)* terhadap Penerapan (SIMDA) *Financial Management Information System (FMIS)*

Pemerintahan harus mampu mengontrol dan mengelola APBD dengan efisien, tertib, efektif, transparan dan bertanggungjawab sesuai regulasi, dengan cara melakukan manajemen keuangan (*Finance Management*) tujuannya untuk penggunaan dana dan pengalokasian dana sesuai dengan pos rekening yang telah direncanakan. Penelitian yang dilakukan oleh Maria Laetitia Boliina Kromen, *et.al.* (2023) menyimpulkan bahwa Manajemen keuangan daerah berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap Penerapan SIMDA *Financial Management Information System (FMIS)*. Penelitian yang dilakukan oleh Andi Nurhaedah, *et.al.*(2022) menyimpulkan pengelolaan manajemen keuangan daerah mempengaruhi kinerja pemerintah dalam menerapkan sistem informasi akuntansi daerah secara positif dan signifikan.

Berdasarkan uraian konsep dan hasil penelitian diatas, maka rumusan hipotesis ke empat adalah:

H4: *Finance Management (FM)* memperkuat pengaruh antara *Financial Accountability (FA)* terhadap Penerapan (SIMDA) *Financial Management Information System (FMIS)*

1.4.5. Pengaruh *Finance Management (FM)* dalam memoderasi pengaruh *Accountability (A)* terhadap Penerapan (SIMDA) *Financial Management Information System (FMIS)*

Menurut Rahmatia Azzindani, *et. al.*(2020) manajemen keuangan (*Finance Management*) semua aktifitas perusahaan terkait cara penggunaan, memperoleh, dan pengelolaan dana perusahaan dalam mencapai target dan tujuan perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Sujanadi, *et. al.*(2021) menyimpulkan bahwa Manajemen keuangan daerah mampu memperkuat hubungan akuntabilitas dan

berpengaruh secara signifikan terhadap Penerapan SIMDA *Financial Management Information System* (FMIS). Penelitian yang dilakukan oleh Silvester Saman, *et.al.*(2020) menyimpulkan Akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Sistem Akuntansi keuangan Daerah

Berdasarkan uraian konsep dan hasil penelitian diatas, maka rumusan hipotesis ke lima adalah:

H5: *Finance Management* (FM) memperkuat pengaruh antara *Accountability* (A) terhadap Penerapan (SIMDA) *Financial Management Information System* (FMIS)

1.4.6. Pengaruh *Finance Management* (FM) dalam memoderasi pengaruh *Transparency* (T) terhadap Penerapan (SIMDA) *Financial Management Information System* (FMIS)

Menurut Fien Hapsari Somad, *et. al.* (2023) manajemen keuangan (*Finance Management*) yang dilakukan sesuai prinsip keterbukaan tanpa disembunyikan, ditutup-tutupi, atau ditunda-pengungkapannya telah menerapkan sistem akuntansi secara transparansi. Penelitian yang dilakukan oleh Asensia, *et. al.* (2022) menyimpulkan Akuntabilitas dan transparansi mempengaruhi Sistem Akuntansi keuangan Daerah secara positif dan signifikan. Penelitian dari Witra Maison, *et.al.*(2020) menyimpulkan SIMDA secara parsial mempengaruhi langsung pada kualitas laporan keuangan dan Dukungan Manajemen keuangan mampu memoderasi pengaruh Implementasi SIMDA terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Bertolak pada penjabaran konsep tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis ke-enam yakni:

H6: *Finance Management* (FM) memperkuat pengaruh antara *Transparency* (T) terhadap Penerapan (SIMDA) *Financial Management Information System* (FMIS).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif. Dalam penelitian ini, pendekatan kuantitatif berupaya menguji teori, mengkonfirmasi fakta, menunjukkan efek atau perbandingan, serta menyajikan dan menafsirkan deskripsi statistik yang memprediksi hasil (Siregar, 2014). Data penelitian menggunakan data primer dengan metode survei melalui kuesioner. Sugiyono, (2019) menyatakan penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian menggunakan pendekatan ilmiah untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data berbentuk statistic dan angka. Pendekatan ini bertujuan untuk mengukur variabel-variabel tertentu dan menemukan hubungan kausal atau asosiatif antara variabel-variabel tersebut. Penting untuk diingat bahwa analisis data kuantitatif memerlukan pemahaman statistik yang baik dan pemilihan metode analisis yang sesuai dengan pertanyaan penelitian dan jenis data yang dikumpulkan.

Penelitian ini menggunakan jenis *explanatory research*. Sugiyono, (2019) menyatakan penelitian penjelas (*explanatory research*) yaitu penelitian yang menjelaskan hubungan antara variabel melalui pengujian hipotesis yang sudah dirumuskan. jenis penelitian dengan penjelasan variabel penelitian dan pengaruh antar variabel yang satu dengan variabel lainnya.

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Menurut Handayani (2020), populasi yaitu kumpulan keseluruhan dari elemen atau individu yang memiliki karakteristik tertentu dan menjadi fokus dalam suatu penelitian atau analisis. Menurut Sugiyono (2019), populasi adalah Suatu kumpulan yang merujuk pada berbagai kelompok, baik manusia, objek, hewan, atau elemen lainnya, tergantung pada konteks penelitian atau

permasalahan yang sedang dihadapi. Populasi penelitian ini yaitu jumlah semua PNS (Pegawai Negeri Sipil) pada instansi pemerintahan di Indonesia.

2. Sampel

Sugiyono (2019) menyatakan sampel yaitu sebagian kecil dari elemen atau individu yang diambil dari populasi statistik untuk diobservasi, diukur, atau diidentifikasi. Sampel dipilih dengan tujuan untuk memberikan informasi tentang keseluruhan populasi tanpa harus mengamati seluruhnya (Siregar S. , 2014). Teknik pengambilan sampel penelitian ini memakai *purposive sampling* dengan kriteria Pegawai Negeri Sipil yang mengakses dan menggunakan sistem informasi manajemen daerah (SIMDA). Menurut Sugiyono (2019), teknik *purposive sampling* yaitu teknik menentukan kriteria tertentu pada sampel. Penelitian ini menggunakan sampel 122 orang yang sudah menjawab pernyataan dalam kuesioner secara lengkap dan benar.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data penelitian ini adalah data primer yang didapatkan langsung oleh peneliti. Data primer menurut Sugiyono, (2019) merupakan sumber data yang didapatkan langsung oleh pengumpul data. Penelitian ini menggunakan data primer dari jawaban responden dari daftar kuesioner melalui *google form* yang disebarakan kepada seluruh pegawai negeri sipil (PNS) pada instansi pemerintahan di Indonesia.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini memakai kuesioner (angket) yaitu teknik pengumpulan data melalui memberikan seperangkat pernyataan maupun pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2019). Kuesioner terdiri dari pernyataan terbuka, yaitu identitas diri responden dan pernyataan tertutup yaitu pernyataan-pernyataan yang telah disediakan dan jawaban yang diberikan dibatasi. Penelitian ini menggunakan responden pegawai negeri sipil (PNS) tanpa batasan wilayah. Peneliti menggunakan *Google Forms* sebagai media pengumpulan data yang disebarakan atau didistribusikan kepada responden secara *online*.

3.5 Variabel dan Teknik Skala Pengukuran Data

1. Variabel

Penelitian ini memakai beberapa variabel antara lain variabel eksogen, variabel endogen, dan variabel moderasi. Variabel eksogen merupakan variabel yang menjadi sebab atau mempengaruhi perubahan variabel endogen (Sugiyono, 2019). Variabel ini dinamakan variabel independen atau variabel bebas. Variabel eksogen penelitian ini adalah *Financial Accountability (FA)*, *Accountability (A)*, dan *Transparency (T)*. Variabel endogen yaitu variabel yang menjadi akibat atau yang dipengaruhi, disebabkan munculnya variabel bebas eksogen (Sugiyono, 2019). Variabel ini dinamakan variabel dependen atau variabel terikat. Penelitian ini menggunakan variabel endogen yaitu Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) *Financial Management Information System (FMIS)*. Variabel moderasi merupakan variabel yang mempengaruhi, artinya dapat memperlemah dan memperkuat pengaruh variabel independen dengan variabel dependen (Sugiyono, 2019). Variabel moderasi ini dapat disebut dengan variabel moderator. Penelitian ini menggunakan variabel moderasi yaitu *Finance Management (FM)*.

Menurut Sugiyono, (2019) variabel merupakan suatu nilai dari obyek, orang, atau aktivitas dengan variasi tertentu yang telah ditentukan peneliti untuk dipelajari kemudian disimpulkan. Endrayanto dan Sujarweni (2012), menyatakan variabel merupakan suatu hal untuk dipelajari supaya memperoleh informasi data kemudian dilakukan pengolahan data secara statistik sehingga bisa disimpulkan.

Variabel endogen merupakan variabel dengan nilai berupa dugaan yang asalnya dari pengaruh variabel eksogen dan peneliti menentukan dengan cara yang tersistematis (Morissan, 2016). Variabel endogen yaitu variabel yang menjadi akibat atau dipengaruhi oleh variabel eksogen (Darmawan, Metode Penelitian Kuantitatif, 2013). Variabel endogen adalah variabel yang menjadi perhatian utama bagi peneliti.

Definisi operasional merupakan variabel secara operasional diamati oleh peneliti berdasarkan karakteristik untuk pengukuran dengan cermat terhadap objek. Proses definisi menggambarkan variable yang tidak memiliki makna ganda atau hanya memiliki makna tunggal. Makna ganda ini dapat membuat variabel menjadi bias dan mempengaruhi penelitian (Nurdin, 2019). Definisi operasional ini akan menekankan pada hal-hal yang menjadi ukuran atau indikator suatu variabel. Definisi operasional variabel dijelaskan pada beberapa variabel penelitian yang akan dijelaskan berikut ini.

Pertanggungjawaban keuangan (*Financial Accountability*) secara efisien, tertib, efektif, transparan dan bertanggungjawab sesuai regulasi yang sudah ditetapkan. *Financial Accountability* dalam penelitian ini memiliki indikator dengan penambahan berupa laporan pertanggungjawaban bendahara yaitu laporan dari bendahara penerimaan/pengeluaran atas uang/surat berharga untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan uang (Felisitas M.Wijaya, 2022).

Akuntabilitas bisa terlaksana melalui sistem akuntansi keuangan daerah yang baru sesuai dengan paradigma *good governance*. *Accountability* dalam penelitian ini memiliki indikator dengan penambahan seperti meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintahan (Gowon, Rizka , 2021).

Transparansi menekankan bahwa segala administrasi keuangan dilakukan secara terbuka, baik dalam informasi pencatatan maupun dalam mengelola anggaran. *Transparency* dalam penelitian ini dapat diukur dengan indikator berupa informasi yang terbuka, jelas, tepat waktu dan bisa dibandingkan (Elkha & Wahidawati, 2020).

Manajemen keuangan (*Finance Management*) harus dikontrol secara terarah sehingga mudah untuk di pertanggungjawabkan disetiap pos yang telah dianggarkan. *Finance Management* dalam penelitian ini dapat diukur dengan indikator berupa penganggaran, perencanaan keuangan, pengelolaan kas, pengelolaan investasi, pembiayaan, pengendalian biaya, dan analisis kinerja keuangan (Andi Nurhaedah, A. Tenriola, 2022).

Salah satu dasar penting reformasi manajemen pemerintahan adalah pemberlakuan paket “Undang Undang Keuangan Negara berupa Undang-Undang N.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara dan Undang-Undang No.15 Tahun 2004 tentang Pertanggungjawaban Keuangan Negara”. Sejak tahun 2003, dalam peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan Pemda, Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah telah mengembangkan SIMDA. Aplikasi SIMDA merupakan penunjang kinerja tata kelola pengelolaan keuangan daerah yang digunakan Pemerintah Daerah. Penelitian ini menggunakan beberapa indikator yang dapat diukur secara terintegrasi untuk mengelola keuangan, mencakup penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporan (Adelia Asensia, *et. al.*2020).

2. Teknik Skala Pengukuran Data

Pengukuran data penelitian ini menggunakan skala *likert*. Skala pengukuran data merupakan prosedur pemberian angka terhadap objek supaya bisa menyatakan hal karakteristik dari suatu objek (Siregar S. , Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif , 2014). Penelitian ini menggunakan kuesioner dalam pengumpulan data. Skala *likert* untuk pengukuran pendapat, sikap, persepsi objek terhadap fenomena sosial (Sugiyono, 2019). Penelitian yaitu aktivitas pengukuran dalam analisis statistik **Invalid source specified..** Tujuan pengukuran yaitu supaya mendapatkan data untuk mencari solusi dari rumusan masalah, selanjutnya supaya mampu menjelaskan fenomena karena pengukuran berupaya menghubungkan konsep dan realita **Invalid source specified..** Penelitian ini menggunakan kriteria penilaian di bawah ini.

Tabel 3.1 Kriteria Penilaian dengan skala *likert*

Jawaban	Skor Pernyataan Positif
Sangat tidak setuju	1
Tidak setuju	2
Netral	3

Setuju	4
Sangat setuju	5

Sumber: (Sugiyono, 2019)

3.6 Model Penelitian

Menurut Sugiyono (2019) peneliti menggunakan analisis regresi linier berganda jika peneliti ingin memperkirakan kenaikan dan penurunan kondisi variabel dependen, jumlah variabel independen dua atau lebih sebagai faktor prediktor yang memanipulasi nilai (menaikkan dan menurunkan). Analisis regresi berganda dilakukan dengan melihat jumlah variabel independen yang harus minimal dua. Penelitian ini terdapat tiga variabel independen sehingga menggunakan persamaan regresi linier berganda. Analisis regresi berganda bertujuan pengujian hipotesis pertama, kedua, dan ketiga. Sugiyono (2019) menyatakan persamaan penelitian pada regresi berganda adalah:

$$SMF = \alpha + \beta_1FA + \beta_2A + \beta_3T + \varepsilon$$

Keterangan :

SMF = Penerapan (SIMDA) *Financial Management Information System* (FMIS)

α = konstanta

FA = *Financial Accountability*

A = *Accountability*

T = *Transparency*

$\beta_1 - \beta_3$ = Koefisien regresi berganda

e = error

Model moderator menggunakan uji nilai selisih mutlak menurut Frucot and Sharon dengan mekanisme sebagai berikut, supaya memperoleh nilai interaksi dari nilai absolut dan nilai selisih antara variabel independen dengan moderator. Menurut Suliyanto (2011) Hubungan antar variabel dalam analisis

regresi variabel moderasi bukan hanya ditentukan variabel independen atau variabel dependen, namun variabel yang bisa memanipulasi hubungan variabel independen terhadap variabel dependen dinamakan variabel moderasi. Variabel moderasi pada konsep korelasi yaitu variabel ketiga yang berpengaruh terhadap korelasi dua variabel.

Analisis regresi variabel moderasi atau *Moderated Regression Analysis* (MRA) yaitu metode statistik bertujuan memahami bagaimana dampak hubungan variabel X (independen) dan variabel Y (dependen) dapat bervariasi atau dimoderasi oleh variabel lain yang disebut variabel moderasi (W). Metode Selisih Mutlak (*Absolute Difference*) adalah salah satu cara untuk mengukur interaksi antara variabel independen dan moderasi. Analisis Regresi Variabel Moderasi dengan Metode Selisih Mutlak membantu peneliti memahami apakah efek hubungan antara dua variabel berbeda tergantung pada nilai variabel moderasi. Hal ini memungkinkan untuk mendeteksi interaksi dan memahami kompleksitas hubungan dalam konteks variabel moderasi. Apabila selisih absolut antara variabel independen yang distandarisasi dengan variabel moderasi yang dihipotesiskan signifikan, maka kesimpulannya adalah hipotesis variabel moderasi bisa memoderasi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen (Suliyanto, 2011). Berdasarkan pengujian selisih mutlak, sehingga model persamaan regresinya bisa dirumuskan di bawah ini:

Persamaan penelitian model MRA adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1FA + \beta_2A + \beta_3T + \beta_4 / X1 - X2 / + \dots + \varepsilon$$

Keterangan:

SMF = Penerapan (SIMDA) *Financial Management Information System* (FMIS)

α = Konstanta

Zscore: FA = *Financial Accountability*

Zscore: A = *Accountability*

Zscore: T = *Transparency*

Zscore: FM = *Finance Management*

AbsZFA_FM |FA-FM| = Interaksi yang diukur dengan nilai absolute perbedaan antara FA dan FM (nilai mutlak dari selisih antara FA dan FM dan seterusnya)

$\beta_1 - \beta_4$ = Koefisien regresi berganda

ϵ = error

Tabel 3.2 Jenis-jenis Variabel Moderasi

	Berhubungan dengan variabel dependen dan atau variabel independen	Tidak berhubungan dengan variabel dependen dan variabel independen
Tidak berinteraksi dengan variabel independen	1 Intervening, Exogen, Antesedent, Prediktor	2 Moderator (Homologizer)
Berinteraksi dengan variabel independen	3 Moderator (Quasi Moderator)	4 Moderator (Pure Moderator)

Sumber: Ghozali, 2018

3.7 Metode Analisa

Metode analisis penelitian ini menggunakan perhitungan statistik dengan bantuan aplikasi SPSS. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis mencakup analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik/teknik analisis dan uji hipotesis.

3.7.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan data yang sudah dikumpulkan (Sugiyono, 2019). Penyajian data dapat dengan ringkas dan rapi ditampilkan yang bertujuan memberi informasi terkait data tersebut. Analisis deskriptif untuk menggambarkan data statistik antara lain maksimum, minimum, sum, mean, varians, standar deviasi, range dan lainnya serta bertujuan mengukur distribusi data dengan kurtosis dan skewness (Priyatno, 2016).

3.8 Pengujian Instrumen

3.8.1 Uji validitas

Uji Validitas yaitu proses evaluasi seberapa jauh instrumen pengukuran, seperti kuesioner atau tes, benar-benar mengukur konsep atau variabel yang dimaksudkan (Siregar, 2014). Uji validitas ini dapat digunakan untuk mengetahui suatu pernyataan-pernyataan kuesioner dianggap valid atau tidak valid sehingga dapat dilakukan pergantian. Teknik uji validitas menggunakan teknik korelasi *Pearson*. Teknik ini merupakan cara mengorelasikan antara skor *item* dengan skor total. Skor total merupakan jumlah seluruh *item* variabel. Pengujian melihat kriteria r_{tabel} pada α 5% dengan uji dua sisi. Pengujian dapat dinyatakan valid apabila nilai positif dan $r_{hitung} \geq r_{tabel}$, sedangkan dinyatakan tidak valid apabila $r_{hitung} \leq r_{tabel}$. Apabila r-hitung melebihi r-tabel pada tingkat signifikansi yang ditetapkan (biasanya tingkat signifikansi 0,05) dan nilai tersebut positif, dapat disimpulkan bahwa ada hubungan atau korelasi yang signifikan dan positif antara dua variabel atau indikator yang diukur. Ini menunjukkan validitas instrumen atau pertanyaan tersebut dalam konteks hubungan yang diuji. Kebalikannya, bila $r_{hitung} < r_{tabel}$, maka indikator/pertanyaan dinyatakan tidak valid. Penetapan kriteria untuk mengukur valid atau tidak ialah $r_{hitung} > r_{tabel}$ pada taraf signifikan 0,05 atau 5%. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka alat ukur tersebut tidak memenuhi kriteria valid (Ghozali, 2018).

3.8.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas yaitu alat pengukur konsistensi responden dalam menjawab suatu hal terkait butir pertanyaan berbentuk kuisioner. Instrumen yang reliabel ialah instrumen yang jika untuk mengukur obyek yang sama beberapa kali, akan menghasilkan data yang sama (Sugiyono, 2019). Uji reliabilitas yaitu indeks alat ukur menunjukkan bisa diandalkan atau dipercaya. Reliabilitas ini dapat mengetahui hasil pengukuran tetap konsisten apabila dilakukan melebihi satu kali terhadap gejala yang sama dan menggunakan alat ukur yang sama (Siregar S. , 2014). Metode yang digunakan dalam uji ini yaitu *Cronbach Alpha* yang dapat menentukan bahwa instrument reliabel atau tidak dengan batasan 0,6. Uji reliabilitas kurang dari 0,6 berarti kurang baik, dan 0,7 bisa diterima serta diatas 0,8 yaitu baik.

3.9 Teknik Analisis Data

3.9.1 Pengujian Asumsi Klasik

Teknik analisis sebelum melakukan analisis regresi adalah uji asumsi klasik sebagai pedoman untuk regresi lineer. Penelitian ini mengolah data memakai aplikasi SPSS. Uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

1. Uji Normalitas

Ghozali (2018) menyatakan uji normalitas untuk mengetahui apakah data skor tes kelompok kontrol dan eksperimen terdistribusi normal atau tidak. Sugiyono (2019) menyatakan uji normalitas data melalui perbandingan kurva normal yang terbentuk setelah data dikumpulkan dengan kurva standard/normal baku. Uji normalitas memiliki tujuan untuk mengetahui data penelitian yang tersebar berdistribusi normal atau tidak (Kasmadi dan Sunariah, 2014). Uji normalitas dapat dilihat dari penyebaran data melalui grafik *Normal P-Plot Of Regression Standardized Residual*. Dasar mengambil keputusan, jika titik tersebar dan mengikuti arah disekitar garis diagonal, maka model memenuhi asumsi normalitas. Penelitian ini menggunakan Uji *Kolmogorov-Smirnov*. Pada uji ini, apabila nilai

signifikansi yang dihasilkan melebihi tingkat tingkat signifikansi 0,05, maka data residual berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinieritas

Ghozali (2018) mengemukakan uji multikolinieritas untuk menguji apakah model regresi terjadi korelasi antar variabel bebas. Multikolinieritas disebabkan variabel bebas mempunyai hubungan kuat atau antara variabel bebas berkorelasi hampir sempurna. Ortogonal merupakan variabel independen yang memiliki nilai korelasi antar sesama variabel sama dengan nol. Ghozali (2018) juga menyimpulkan bahwa, mendeteksi ada atau tidak multikolinieritas dalam model regresi adalah melihat *tolerance value* dengan *variance tolerance factor (VIF)*. Apabila nilai $VIF > 10$ atau $tolerance\ value < 0,10$ maka terjadi multikolinieritas begitu juga sebaliknya. Gejala multikolinieritas bisa diketahui dari Variance Inflation Factor (VIF) : a. Apabila $VIF < 10$ dan nilai $tolerance < 0.1$ artinya bebas dari multikolinieritas; b. Apabila $VIF > 10$ dan nilai $tolerance > 0.1$ maka terjadi multikolinieritas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Ghozali (2018) mengemukakan tujuan dari uji heteroskedastisitas yaitu menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual antar pengamatan. Gejala heteroskedastisitas bisa dilihat dari pengujian Scatter Plot dengan pernyataan bahwa model regresi linear tidak terjadi heteroskedastisitas apabila:

- a. Titik-titik data tidak hanya berkumpul dibawah atau diatas saja.
- b. Penyebaran titik-titik data dibawah dan diatas atau disekitar angka 0.
- c. Titik-titik data yang menyebar tidak membentuk pola bergelombang melebar selanjutnya menyempit dan melebar kembali. Model regresi yang baik tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.10 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis merupakan proses pengujian yang akan memutuskan apakah hipotesis penelitian diterima atau ditolak. Dalam pengujian hipotesis, penelitian ini menggunakan uji signifikan simultan atau uji F, uji

signifikan parsial atau uji t, dan koefisien determinasi atau R^2 seperti penjelasan berikut ini.

3.10.1 Uji F/ Uji Model (Goodness of Fit)

Uji signifikan simultan atau uji F untuk menguji apakah semua variabel independen dalam model memiliki pengaruh bersama-sama terhadap variabel dependen. Ketentuan uji ini dengan membandingkan antara F_{hitung} dengan F_{tabel} menggunakan kriteria sebagai berikut:

- a. H_a diterima apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ dengan nilai $\alpha = 5\%$
- b. H_a ditolak apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$ dengan nilai $\alpha = 5\%$

3.10.2 Uji Signifikan Parsial (Uji t)

Uji signifikansi pengaruh parsial (uji t) bertujuan menguji suatu variabel independen berpengaruh atau tidak terhadap variabel dependen. Uji ini dapat dilakukan dengan melihat perbandingan t_{hitung} dan t_{tabel} seperti pada kriteria berikut ini:

- a. H_a diterima apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan nilai $\alpha = 5\%$
- b. H_a ditolak apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ dengan nilai $\alpha = 5\%$

Uji ini dapat melihat signifikan atau tidak pengaruh variabel independen terhadap dependen dengan melihat nilai probabilitas (nilai Sig.) dari t rasio pada taraf uji $\alpha = 5\%$. Apabila nilai Sig. $< 5\%$ maka keputusan menerima H_a , tetapi apabila nilai Sig $> 5\%$ maka menolak H_a .

3.10.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi yaitu ukuran seberapa jauh kemampuan model menerangkan perubahan variabel dependen. Koefisien determinasi mempunyai nilai antara 0 dan 1. Nilai Adjusted R-Square mendekati 0 artinya kemampuan variabel independen terbatas untuk menerangkan variabel dependen. Jika nilainya mendekati 1, artinya variabel independen hampir

seluruh informasi untuk memperkirakan variabel independen (Ghozali, 2018). Koefisien determinasi (R^2) memperlihatkan seberapa jauh kemampuan model menjelaskan variabel dependen. Uji ini juga dapat mengukur seberapa baik garis regresi dalam penelitian ini. Terdapat beberapa kriteria antara lain:

- a. Interval nilai R^2 antara 0 sampai 1 ($0 < R^2 < 1$) variabel dependen.
- b. Nilai R^2 yang kecil (mendekati 1) maka kemampuan variabel independen semakin besar, apabila nilai R^2 semakin mendekati 0 maka kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen semakin terbatas.
- c. Nilai R^2 mendekati 1 artinya variabel independen memberikan semua informasi yang dibutuhkan variabel dependen.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Obyek Penelitian

Pengumpulan data kuantitatif penelitian ini dilakukan dengan penyebaran kuesioner secara online melalui google form. Responden dalam penelitian ini merupakan pegawai negeri sipil (PNS) seluruh Indonesia yang mengakses Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) pada instansi pemerintahan di Indonesia.

Penentuan jumlah sampel minimal dalam penelitian dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, seperti jenis metode penelitian, jenis analisis statistik yang akan digunakan, efek ukuran yang diharapkan, dan seberapa akurat hasil penelitian yang diinginkan. Hal ini disebabkan oleh kepercayaan bahwa perhitungan statistik yang dihasilkan dari penelitian kuantitatif yang menggunakan sampel yang lebih besar akan lebih akurat daripada yang dihasilkan dari sampel yang lebih kecil (Kumar, 1999). Menurut Kerlinger dan Lee (2000) menyarankan bahwa jumlah minimal sampel penelitian kuantitatif antara 30 sampai dengan 500. Dalam Penelitian ini dilakukan dengan total responden yang telah terjawab dan diambil sebanyak 122 orang. Waktu dalam membagikan kuesioner secara online melalui google form mulai dari tanggal 23 oktober sampai dengan 25 oktober tahun 2023, setelah itu peneliti mendapat jawaban dari responden kurang lebih selama 20 hari.

Seluruh responden dalam penelitian ini telah memberikan jawaban secara benar dan lengkap. Profil responden penelitian ini diamati untuk memberi gambaran seperti apa sampel penelitian ini. Sesuai dengan pengajuan daftar pernyataan kepada 122 orang untuk mengetahui jenis kelamin, pendidikan, usia, pekerjaan, masa kerja, instansi/lembaga dan jabatan responden.

Penggolongan identitas responden dilakukan agar tahu seperti apa responden yang menjadi objek penelitian.

Gambaran umum responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.1

4.1.1. Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4. 1 Jenis Kelamin Responden

		Jenis Kelamin			Cumulative
		Frequency	Percent	Valid Percent	Percent
Valid	Laki-laki	60	49.2	49.2	49.2
	Perempuan	62	50.8	50.8	100.0
Total		122	100.0	100.0	

Sumber: Data Primer yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.1 terlihat bahwa responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 60 orang dengan persentase 49,2%, sedangkan responden berjenis kelamin perempuan sebanyak 62 orang dengan persentase 50,8%. Hal ini menunjukkan bahwa responden yang berjenis kelamin perempuan lebih banyak terlibat dipenelitian ini dibandingkan yang berjenis kelamin laki-laki dan hanya selisih 2 orang atau 1.6% responden. Namun demikian, dapat dikatakan bahwa komposisi responden laki-laki dan perempuan dalam mengakses SIMDA pada instansi pemerintahan di Indonesia adalah seimbang.

4.1.2. Deskripsi Responden Berdasarkan Usia

Tabel 4. 2 Distribusi Responden Berdasarkan Usia Responden

		Usia			Cumulative
		Frequency	Percent	Valid Percent	Percent
Valid	20-25	1	.8	.8	.8
	26-31	23	18.9	18.9	19.7
	32-37	41	33.6	33.6	53.3

> 37	57	46.7	46.7	100.0
Total	122	100.0	100.0	

Sumber: Data Primer yang diolah, 2023

Berdasarkan kelompok usia, terdapat 2 (dua) kelompok usia yang mendominasi adalah responden yang berusia 32-37 tahun yaitu sebanyak 41 orang (33,6%) responden dan responden yang berusia >37 tahun yaitu sebanyak 57 orang (46,7%). Komposisi kelompok responden dengan usia 26-31 tahun juga cukup banyak yaitu sebanyak 18,9%. Sementara itu, kelompok usia responden yang paling muda usianya yaitu usia 20-25 tahun hanya diwakili oleh 1 orang (0,8%) dari total responden. Dari data terlihat bahwa sebagian besar responden yang mengakses SIMDA pada instansi pemerintahan di Indonesia berada pada usia yang cukup dewasa dan matang karena mereka berada pada posisi pekerjaan atau jabatan yang sudah mapan.

4.1.3. Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Masing-masing pegawai memiliki tingkatan pendidikan yang berbeda. Untuk memudahkan perbedaan jenis pendidikan responden maka digolongkan menjadi 4 kelompok, sebagai berikut :

Tabel 4. 3 Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan

		Pendidikan			Cumulative
		Frequency	Percent	Valid Percent	Percent
Valid	S2	5	4.1	4.1	4.1
	S1	88	72.1	72.1	76.2
	Diploma	11	9.0	9.0	85.2
	SMA	18	14.8	14.8	100.0
	Total	122	100.0	100.0	

Sumber: Data Primer yang diolah, 2023

Berdasarkan tingkat pendidikan terakhir, responden dengan tingkat pendidikan terakhir S1 adalah yang paling mendominasi, yaitu sebanyak

72.1% (88 orang) dari total keseluruhan responden. Komposisi kelompok responden dengan tingkat pendidikan SMA sebesar yaitu 14,8% (18 orang) dari keseluruhan responden. Responden dengan tingkat pendidikan Diploma sebesar yaitu 9.0% (11 orang) dari total keseluruhan responden. Sementara itu, kelompok responden yang paling sedikit dengan tingkat pendidikan S2 sebanyak diwakili oleh 4.1% (5 orang). Hal ini menunjukkan semakin tinggi pendidikan responden maka semakin tinggi kemampuannya dan semakin tinggi kemungkinan keberhasilannya dalam menjalankan tugas-tugas terkait keuangan dengan menggunakan SIMDA keuangan pada instansi pemerintahan di Indonesia.

4.1.4. Deskripsi Responden Berdasarkan Pekerjaan

Tabel 4. 4 Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan

		Pekerjaan			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Pegawai Negeri Sipil	122	100.0	100.0	100.0

Sumber: Data Primer yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.4 total keseluruhan responden dalam penelitian ini mewajibkan responden mempunyai status pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil (PNS) yang mengakses SIMDA pada instansi pemerintahan di Indonesia.

4.1.5. Deskripsi Responden Berdasarkan Masa Kerja

Tabel 4. 5 Distribusi Responden Berdasarkan Masa Kerja

		Masa Kerja			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	< 5 tahun	45	36.9	36.9	36.9
	5 – 10 tahun	32	26.2	26.2	63.1
	> 10 tahun	45	36.9	36.9	100.0

Total	122	100.0	100.0
-------	-----	-------	-------

Sumber: Data Primer yang diolah, 2023

Berdasarkan masa kerja responden, yang mendominasi yaitu responden yang memiliki masa kerja kurang dari 5 tahun sebesar 36.9% (45 orang) dan responden yang memiliki masa kerja lebih dari 10 tahun sebesar 36.9% (45 orang). Responden dengan tingkat masa kerja 5-10 tahun sebesar 26.2% (32 orang). Hal ini disebabkan karena didasarkan bahwa pegawai yang telah lama bekerja menunjukkan adanya kesetiaan yang tinggi dari pegawai yang bersangkutan pada instansi pemerintahan di Indonesia.

4.1.6. Deskripsi Responden Berdasarkan Instansi/ Lembaga

Tabel 4. 6 Distribusi Responden Berdasarkan Instansi/ Lembaga

		Instansi/ Lembaga			Cumulative
		Frequency	Percent	Valid Percent	Percent
Valid	Inspektorat	2	1.6	1.6	1.6
	Sekretariat DPRD	2	1.6	1.6	3.3
	Biro/Bagian	14	11.5	11.5	14.8
	Dinas	53	43.4	43.4	58.2
	Satpol PP	2	1.6	1.6	59.8
	RS Umum	3	2.5	2.5	62.3
	Badan	44	36.1	36.1	98.4
	Kecamatan	2	1.6	1.6	100.0
	Total	122	100.0	100.0	

Sumber: Data Primer yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.6 instansi/lembaga yang mengakses SIMDA pada instansi pemerintahan di Indonesia yang berkontribusi paling banyak dalam penelitian ini adalah dari dinas yaitu sebanyak 43.4% (53 orang) dari total keseluruhan responden. Responden instansi/lembaga badan dalam penelitian ini adalah sebanyak 36.1% (44 orang). Responden yang

mengakses SIMDA pada instansi pemerintahan di Indonesia salah satunya bagian dalam penelitian ini adalah sebanyak 11.5% (14 orang). Responden yang mengakses SIMDA pada instansi pemerintahan di Indonesia salah satunya RSPP sebanyak 2.5% (3 orang). Komposisi kelompok responden dengan tingkat instansi/lembaga yang mempunyai partisipasi yang sama yaitu sebesar inspektorat 1.6% (2 orang), sekretariat DPRD 1.6% (2 orang), satpol PP 1.6% (2 orang) dan Kecamatan 1.6% (2 orang). Hal ini menunjukkan bahwa ada banyak responden yang mengakses SIMDA pada instansi pemerintahan di Indonesia yaitu dinas dan badan yang berpartisipasi dalam mengisi pernyataan dari kuesioner yang diedarkan melalui *google form*, karena ada banyak OPD yang dibagi dalam dinas dan badan. Komposisi kelompok responden dalam SKPD RSPP, inspektorat, sekretariat DPRD, satpol PP dan kecamatan hanya ada satu dari masing-masing organisasi perangkat daerah.

4.1.7. Deskripsi Responden Berdasarkan Jabatan

Tabel 4. 7 Distribusi Responden Berdasarkan Jabatan

		Jabatan Pengelola Keuangan			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kepala subbagian keuangan dan perencanaan (PPK)	32	26.2	26.2	26.2
	Bendahara Penerimaan	30	24.6	24.6	50.8
	Bendahara Pengeluaran	30	24.6	24.6	75.4
	Staf subbagian keuangan dan akuntansi	30	24.6	24.6	100.0
	Total	122	100.0	100.0	

Sumber: Data Primer yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.7 tingkat jabatan yang berkontribusi paling banyak dalam penelitian ini adalah dari Kepala subbagian keuangan dan perencanaan (PPK) yaitu sebanyak 26.2% (32 orang). Komposisi

kelompok responden dengan tingkat jabatan bendahara penerimaan sebesar 24.6% (30 orang), bendahara pengeluaran sebesar 24.6% (30 orang) dan staf subbagian keuangan dan akuntansi sebesar 24.6% (30 orang). Hal ini menunjukkan bahwa dalam penelitian ini responden yang mengakses SIMDA pada instansi pemerintahan di Indonesia yang berpartisipasi dalam mengisi kuesioner adalah responden yang bertugas dalam perencanaan anggaran dengan menggunakan SIMDA akuntansi, Kepala subbagian keuangan dan perencanaan (PPK) mempunyai tugas paling penting dalam menyusun anggaran.

4.2. Deskripsi Data Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap 122 responden melalui penyebaran kuesioner, untuk mendapatkan kecenderungan jawaban responden terhadap jawaban masing-masing variabel akan didasarkan pada rentang skor jawaban sebagaimana pada lampiran.

4.2.1. Deskripsi Variabel *Financial Accountability* (FA)

Variabel *financial accountability* (FA) pada penelitian ini diukur melalui 4 indikator yang didalamnya dibagi dalam 9 pernyataan. Hasil tanggapan variabel *financial accountability* tersebut dijelaskan pada tabel 4.8 berikut ini:

Tabel 4. 8 Tanggapan Responden Mengenai *Financial Accountability* (FA)

Variabel	Indikator	Skor					Jumlah
		STS	TS	N	S	SS	
<i>Financial Accountability (FA)</i>	FA_1	0	1	13	62	46	122
	FA_2	0	0	15	72	35	122
	FA_3	0	2	14	69	37	122
	FA_4	0	1	17	76	28	122
	FA_5	0	1	18	72	31	122
	FA_6	0	1	18	74	29	122
	FA_7	0	0	14	75	33	122

FA_8	0	0	14	70	38	122
FA_9	0	0	7	71	44	122

Sumber: Data Primer yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.8 di atas dapat diketahui bahwa tanggapan responden terhadap variabel *Financial Accountability* (FA) terdiri dari 9 item pernyataan diantaranya yaitu, pertanggungjawaban keuangan sudah dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku (FA_1) memilih jawaban sangat setuju (SS) sebanyak 46 responden, jawaban setuju (S) sebanyak 62 responden, jawaban cukup (C) sebanyak 13 responden, jawaban tidak setuju (TS) sebanyak 1 responden, dan jawaban sangat tidak setuju (STS) sebanyak 0 responden. Dapat disimpulkan bahwa untuk pernyataan pertanggungjawaban keuangan sudah dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku (FA_1) skor yang paling banyak dijawab responden yaitu 62 responden dengan memilih setuju (S).

Keberlangsungan keuangan dapat diketahui berdasarkan pertanggungjawaban keuangan (FA_2) memilih jawaban sangat setuju (SS) sebanyak 35 responden, jawaban setuju (S) sebanyak 72 responden, jawaban cukup (C) sebanyak 15 responden, jawaban tidak setuju (TS) sebanyak 0 responden, dan jawaban sangat tidak setuju (STS) sebanyak 0 responden. Dapat disimpulkan bahwa untuk pernyataan keberlangsungan keuangan dapat diketahui berdasarkan pertanggungjawaban keuangan (FA_2) skor yang paling banyak dijawab responden yaitu 72 responden dengan memilih setuju (S).

Mampu menyusun laporan pertanggungjawaban secara lengkap (FA_3) memilih jawaban sangat setuju (SS) sebanyak 37 responden, jawaban setuju (S) sebanyak 69 responden, jawaban cukup (C) sebanyak 14 responden, jawaban tidak setuju (TS) sebanyak 2 responden, dan jawaban sangat tidak setuju (STS) sebanyak 0 responden. Dapat disimpulkan bahwa untuk pernyataan mampu menyusun laporan

pertanggungjawaban secara lengkap (FA_3) skor yang paling banyak dijawab responden yaitu 69 responden dengan memilih setuju (S).

Mampu menyelesaikan laporan pertanggungjawaban tepat waktu (FA_4) memilih jawaban sangat setuju (SS) sebanyak 28 responden, jawaban setuju (S) sebanyak 76 responden, jawaban cukup (C) sebanyak 17 responden, jawaban tidak setuju (TS) sebanyak 1 responden, dan jawaban sangat tidak setuju (STS) sebanyak 0 responden. Dapat disimpulkan bahwa untuk pernyataan mampu menyelesaikan laporan pertanggungjawaban tepat waktu (FA_4) skor yang paling banyak dijawab responden yaitu 76 responden dengan memilih setuju (S).

Menyajikan laporan pertanggungjawaban dengan jujur sesuai dengan anggaran yang dicairkan (FA_5) memilih jawaban sangat setuju (SS) sebanyak 31 responden, jawaban setuju (S) sebanyak 72 responden, jawaban cukup (C) sebanyak 18 responden, jawaban tidak setuju (TS) sebanyak 1 responden, dan jawaban sangat tidak setuju (STS) sebanyak 0 responden. Dapat disimpulkan bahwa untuk pernyataan menyajikan laporan pertanggungjawaban dengan jujur sesuai dengan anggaran yang dicairkan (FA_5) skor yang paling banyak dijawab responden yaitu 72 responden dengan memilih setuju (S).

Pertanggungjawaban keuangan sudah sesuai dengan kode rekening yang sudah ditentukan (FA_6) memilih jawaban sangat setuju (SS) sebanyak 29 responden, jawaban setuju (S) sebanyak 74 responden, jawaban cukup (C) sebanyak 18 responden, jawaban tidak setuju (TS) sebanyak 1 responden, dan jawaban sangat tidak setuju (STS) sebanyak 0 responden. Dapat disimpulkan bahwa untuk pernyataan pertanggungjawaban keuangan sudah sesuai dengan kode rekening yang sudah ditentukan (FA_6) skor yang paling banyak dijawab responden yaitu 74 responden dengan memilih setuju (S).

Pengolahan data transaksi kwitansi penerimaan dan pengeluaran dilakukan dengan benar (FA_7) memilih jawaban sangat setuju (SS) sebanyak 33 responden, jawaban setuju (S) sebanyak 75 responden,

jawaban cukup (C) sebanyak 14 responden, jawaban tidak setuju (TS) sebanyak 0 responden, dan jawaban sangat tidak setuju (STS) sebanyak 0 responden. Dapat disimpulkan bahwa untuk pernyataan pengolahan data transaksi kwitansi penerimaan dan pengeluaran dilakukan dengan benar (FA_7) skor yang paling banyak dijawab responden yaitu 75 responden dengan memilih setuju (S).

Informasi yang diberikan dalam laporan pertanggungjawaban tidak mengandung kesalahan (FA_8) memilih jawaban sangat setuju (SS) sebanyak 38 responden, jawaban setuju (S) sebanyak 70 responden, jawaban cukup (C) sebanyak 14 responden, jawaban tidak setuju (TS) sebanyak 0 responden, dan jawaban sangat tidak setuju (STS) sebanyak 0 responden. Dapat disimpulkan bahwa untuk pernyataan Informasi yang diberikan dalam laporan pertanggungjawaban tidak mengandung kesalahan (FA_8) skor yang paling banyak dijawab responden yaitu 70 responden dengan memilih setuju (S).

Laporan pertanggungjawaban digunakan dan dapat dijadikan sebagai bahan untuk evaluasi anggaran (FA_9) memilih jawaban sangat setuju (SS) sebanyak 44 responden, jawaban setuju (S) sebanyak 71 responden, jawaban cukup (C) sebanyak 7 responden, jawaban tidak setuju (TS) sebanyak 0 responden, dan jawaban sangat tidak setuju (STS) sebanyak 0 responden. Dapat disimpulkan bahwa untuk pernyataan laporan pertanggungjawaban digunakan dan dapat dijadikan sebagai bahan untuk evaluasi anggaran (FA_9) skor yang paling banyak dijawab responden yaitu 71 responden dengan memilih setuju (S).

4.2.2. Deskripsi Variabel *Accountability* (A)

Variabel *accountability* (A) pada penelitian ini diukur melalui 3 indikator yang didalamnya dibagi dalam 9 pernyataan. Hasil tanggapan variabel *accountability* tersebut dijelaskan pada tabel 4.9 berikut ini :

Tabel 4. 9 Tanggapan Responden Mengenai Accountability (A)

Variabel	Indikator	Skor					Jumlah
		STS	TS	N	S	SS	
Accountability (A)	A_1	0	1	41	51	29	122
	A_2	0	4	35	51	32	122
	A_3	0	3	37	48	34	122
	A_4	1	2	29	54	36	122
	A_5	0	3	31	54	34	122
	A_6	0	1	30	48	43	122
	A_7	0	2	29	53	38	122
	A_8	0	2	23	49	48	122
	A_9	0	1	20	55	46	122

Sumber: Data Primer yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.9 diatas dapat diketahui bahwa tanggapan responden terhadap variabel *accountability* (A) terdiri dari 9 item pernyataan diantaranya yaitu, pelaksanaan kebijakan dipertanggungjawabkan pemerintah daerah kepada DPRD dan masyarakat (A_1) memilih jawaban sangat setuju (SS) sebanyak 29 responden, jawaban setuju (S) sebanyak 51 responden, jawaban cukup (C) sebanyak 41 responden, jawaban tidak setuju (TS) sebanyak 1 responden, dan jawaban sangat tidak setuju (STS) sebanyak 0 responden. Dapat disimpulkan bahwa untuk pernyataan pelaksanaan kebijakan dipertanggungjawabkan pemerintah daerah kepada DPRD dan masyarakat (A_1) skor yang paling banyak dijawab responden yaitu 51 responden dengan memilih setuju (S).

Anggaran yang direncanakan dan ditetapkan oleh pemerintah daerah bersama DPRD konsisten dengan pelaksanaannya dan sesuai dengan kepentingan umum (A_2) memilih jawaban sangat setuju (SS) sebanyak 32 responden, jawaban setuju (S) sebanyak 51 responden, jawaban cukup (C) sebanyak 35 responden, jawaban tidak setuju (TS) sebanyak 4 responden, dan jawaban sangat tidak setuju (STS) sebanyak 0 responden. Dapat disimpulkan bahwa untuk pernyataan anggaran yang direncanakan

dan ditetapkan oleh pemerintah daerah bersama DPRD konsisten dengan pelaksanaannya dan sesuai dengan kepentingan umum (A_2) skor yang paling banyak dijawab responden yaitu 51 responden dengan memilih setuju (S).

Program-program dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan anggaran masyarakat untuk mendapatkan hasil yang optimal (A_3) memilih jawaban sangat setuju (SS) sebanyak 34 responden, jawaban setuju (S) sebanyak 48 responden, jawaban cukup (C) sebanyak 37 responden, jawaban tidak setuju (TS) sebanyak 3 responden, dan jawaban sangat tidak setuju (STS) sebanyak 0 responden. Dapat disimpulkan bahwa untuk pernyataan program-program dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan anggaran masyarakat untuk mendapatkan hasil yang optimal (A_3) skor yang paling banyak dijawab responden yaitu 48 responden dengan memilih setuju (S).

Anggaran yang sudah ditetapkan dan direalisasi pada unit melibatkan seluruh unsur dalam setiap unit tersebut (A_4) memilih jawaban sangat setuju (SS) sebanyak 36 responden, jawaban setuju (S) sebanyak 54 responden, jawaban cukup (C) sebanyak 29 responden, jawaban tidak setuju (TS) sebanyak 2 responden, dan jawaban sangat tidak setuju (STS) sebanyak 1 responden. Dapat disimpulkan bahwa untuk pernyataan anggaran yang sudah ditetapkan dan direalisasi pada unit melibatkan seluruh unsur dalam setiap unit tersebut (A_4) skor yang paling banyak dijawab responden yaitu 54 responden dengan memilih setuju (S) dan skor paling sedikit dijawab responden yaitu 1 responden dengan memilih sangat tidak setuju (STS)

Anggaran digunakan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku (A_5) memilih jawaban sangat setuju (SS) sebanyak 34 responden, jawaban setuju (S) sebanyak 54 responden, jawaban cukup (C) sebanyak 31 responden, jawaban tidak setuju (TS) sebanyak 3 responden, dan jawaban sangat tidak setuju (STS) sebanyak 0 responden. Dapat disimpulkan bahwa untuk pernyataan anggaran digunakan sesuai dengan

hukum dan peraturan yang berlaku. (A_5) skor yang paling banyak dijawab responden yaitu 54 responden dengan memilih setuju (S).

Pelaksanaan program-program dirasakan manfaatnya oleh masyarakat (A_6) memilih jawaban sangat setuju (SS) sebanyak 43 responden, jawaban setuju (S) sebanyak 48 responden, jawaban cukup (C) sebanyak 30 responden, jawaban tidak setuju (TS) sebanyak 1 responden, dan jawaban sangat tidak setuju (STS) sebanyak 0 responden. Dapat disimpulkan bahwa untuk pernyataan pelaksanaan program-program dirasakan manfaatnya oleh masyarakat (A_6) skor yang paling banyak dijawab responden yaitu 48 responden dengan memilih setuju (S).

Melakukan analisis keuangan untuk setiap program atau kegiatan yang telah diselesaikan (A_7) memilih jawaban sangat setuju (SS) sebanyak 38 responden, jawaban setuju (S) sebanyak 53 responden, jawaban cukup (C) sebanyak 29 responden, jawaban tidak setuju (TS) sebanyak 2 responden, dan jawaban sangat tidak setuju (STS) sebanyak 0 responden. Dapat disimpulkan bahwa untuk pernyataan melakukan analisis keuangan untuk setiap program atau kegiatan yang telah diselesaikan (A_7) skor yang paling banyak dijawab responden yaitu 53 responden dengan memilih setuju (S).

Pimpinan dan pegawai bertanggung jawab (*responsible*) terhadap hasil program/kegiatan/proyek yang dilaksanakan (A_8) memilih jawaban sangat setuju (SS) sebanyak 48 responden, jawaban setuju (S) sebanyak 49 responden, jawaban cukup (C) sebanyak 23 responden, jawaban tidak setuju (TS) sebanyak 2 responden, dan jawaban sangat tidak setuju (STS) sebanyak 0 responden. Dapat disimpulkan bahwa untuk pernyataan bertanggung jawab (*responsible*) terhadap hasil program/kegiatan/proyek yang dilaksanakan (A_8) skor yang paling banyak dijawab responden yaitu 49 responden dengan memilih setuju (S).

Pimpinan dan pegawai selalu bekerja sama untuk mengevaluasi hasil program, kegiatan, atau proyek (A_9) memilih jawaban sangat setuju (SS) sebanyak 46 responden, jawaban setuju (S) sebanyak 55 responden,

jawaban cukup (C) sebanyak 20 responden, jawaban tidak setuju (TS) sebanyak 1 responden, dan jawaban sangat tidak setuju (STS) sebanyak 0 responden. Dapat disimpulkan bahwa untuk pernyataan pimpinan dan pegawai selalu bekerja sama untuk mengevaluasi hasil program, kegiatan, atau proyek. (A_9) skor yang paling banyak dijawab responden yaitu 55 responden dengan memilih setuju (S).

4.2.3. Deskripsi Variabel *Transparency* (T)

Variabel *transparency* (T) pada penelitian ini diukur melalui 4 indikator yang didalamnya dibagi dalam 9 pernyataan. Hasil tanggapan variabel *transparency* tersebut dijelaskan pada tabel 4.10 berikut ini :

Tabel 4. 10 Tanggapan Responden Mengenai *Transparency* (T)

Variabel	Indikator	Skor					Jumlah
		STS	TS	C	S	SS	
<i>Transparency</i> (T)	T_1	0	1	35	46	40	122
	T_2	0	3	37	43	39	122
	T_3	0	3	37	44	38	122
	T_4	0	3	36	44	39	122
	T_5	0	3	35	49	35	122
	T_6	0	4	33	47	38	122
	T_7	0	2	33	53	34	122
	T_8	0	1	33	45	43	122
	T_9	0	2	29	51	40	122

Sumber: Data Primer yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.10 diatas dapat diketahui bahwa tanggapan responden terhadap variabel *transparency* (T) terdiri dari 9 item pernyataan diantaranya yaitu, dokumen mengenai pengelolaan keuangan bisa didapatkan dengan mudah (T_1) memilih jawaban sangat setuju (SS) sebanyak 40 responden, jawaban setuju (S) sebanyak 46 responden, jawaban cukup (C) sebanyak 35 responden, jawaban tidak setuju (TS) sebanyak 1 responden, dan jawaban sangat tidak setuju (STS) sebanyak 0

responden. Dapat disimpulkan bahwa untuk pernyataan dokumen mengenai pengelolaan keuangan bisa didapatkan dengan mudah (T_1) skor yang paling banyak dijawab responden yaitu 46 responden dengan memilih setuju (S).

Meningkatkan transparansi dengan melakukan pengumuman terkait pengelolaan keuangan secara berkala (T_2) memilih jawaban sangat setuju (SS) sebanyak 39 responden, jawaban setuju (S) sebanyak 43 responden, jawaban cukup (C) sebanyak 37 responden, jawaban tidak setuju (TS) sebanyak 3 responden, dan jawaban sangat tidak setuju (STS) sebanyak 0 responden. Dapat disimpulkan bahwa untuk pernyataan meningkatkan transparansi dengan melakukan pengumuman terkait pengelolaan keuangan secara berkala (T_2) skor yang paling banyak dijawab responden yaitu 43 responden dengan memilih setuju (S).

Pengelolaan keuangan dilakukan secara ekonomis agar terhindar dari pemborosan dan tidak produktif (T_3) memilih jawaban sangat setuju (SS) sebanyak 38 responden, jawaban setuju (S) sebanyak 44 responden, jawaban cukup (C) sebanyak 37 responden, jawaban tidak setuju (TS) sebanyak 3 responden, dan jawaban sangat tidak setuju (STS) sebanyak 0 responden. Dapat disimpulkan bahwa untuk pernyataan pengelolaan keuangan dilakukan secara ekonomis agar terhindar dari pemborosan dan tidak produktif (T_3) skor yang paling banyak dijawab responden yaitu 44 responden dengan memilih setuju (S).

Masyarakat mengetahui mengenai APBD (T_4) memilih jawaban sangat setuju (SS) sebanyak 39 responden, jawaban setuju (S) sebanyak 44 responden, jawaban cukup (C) sebanyak 36 responden, jawaban tidak setuju (TS) sebanyak 3 responden, dan jawaban sangat tidak setuju (STS) sebanyak 0 responden. Dapat disimpulkan bahwa untuk pernyataan masyarakat mengetahui mengenai APBD (T_4) skor yang paling banyak dijawab responden yaitu 44 responden dengan memilih setuju (S).

Pemerintah daerah menyediakan layanan informasi keuangan yang mudah diakses bagi masyarakat (T_5) memilih jawaban sangat setuju (SS)

sebanyak 35 responden, jawaban setuju (S) sebanyak 49 responden, jawaban cukup (C) sebanyak 35 responden, jawaban tidak setuju (TS) sebanyak 3 responden, dan jawaban sangat tidak setuju (STS) sebanyak 0 responden. Dapat disimpulkan bahwa untuk pernyataan pemerintah daerah menyediakan layanan informasi keuangan yang mudah diakses bagi masyarakat. (T_5) skor yang paling banyak dijawab responden yaitu 49 responden dengan memilih setuju (S).

Laporan keuangan disusun menurut SAP dan terdiri dari LRA, neraca dan lampiran laporan keuangan (T_6) memilih jawaban sangat setuju (SS) sebanyak 38 responden, jawaban setuju (S) sebanyak 47 responden, jawaban cukup (C) sebanyak 33 responden, jawaban tidak setuju (TS) sebanyak 4 responden, dan jawaban sangat tidak setuju (STS) sebanyak 0 responden. Dapat disimpulkan bahwa untuk pernyataan laporan keuangan disusun menurut SAP dan terdiri dari LRA, neraca dan lampiran laporan keuangan (T_6) skor yang paling banyak dijawab responden yaitu 47 responden dengan memilih setuju (S).

Kepala daerah menyerahkan laporan keuangan kepada BPK untuk pemeriksaan (T_7) memilih jawaban sangat setuju (SS) sebanyak 34 responden, jawaban setuju (S) sebanyak 53 responden, jawaban cukup (C) sebanyak 33 responden, jawaban tidak setuju (TS) sebanyak 2 responden, dan jawaban sangat tidak setuju (STS) sebanyak 0 responden. Dapat disimpulkan bahwa untuk pernyataan kepala daerah menyerahkan laporan keuangan kepada BPK untuk pemeriksaan (T_7) skor yang paling banyak dijawab responden yaitu 53 responden dengan memilih setuju (S).

Sebelum diserahkan kepada BPK, laporan keuangan SKPD diperiksa oleh inspektorat (T_8) memilih jawaban sangat setuju (SS) sebanyak 43 responden, jawaban setuju (S) sebanyak 45 responden, jawaban cukup (C) sebanyak 33 responden, jawaban tidak setuju (TS) sebanyak 1 responden, dan jawaban sangat tidak setuju (STS) sebanyak 0 responden. Dapat disimpulkan bahwa untuk pernyataan sebelum diserahkan kepada BPK,

laporan keuangan SKPD diperiksa oleh inspektorat (T_8) skor yang paling banyak dijawab responden yaitu 45 responden dengan memilih setuju (S).

Laporan keuangan dan hasil pemeriksaan BPK dipublikasikan di situs resmi pemerintah daerah (T_9) memilih jawaban sangat setuju (SS) sebanyak 40 responden, jawaban setuju (S) sebanyak 51 responden, jawaban cukup (C) sebanyak 29 responden, jawaban tidak setuju (TS) sebanyak 2 responden, dan jawaban sangat tidak setuju (STS) sebanyak 0 responden. Dapat disimpulkan bahwa untuk pernyataan Laporan keuangan dan hasil pemeriksaan BPK dipublikasikan di situs resmi pemerintah daerah (T_9) skor yang paling banyak dijawab responden yaitu 51 responden dengan memilih setuju (S).

4.2.4. Deskripsi Variabel *Finance Management* (FM)

Variabel *finance management* (FM) pada penelitian ini diukur melalui 7 indikator yang didalamnya dibagi dalam 8 pernyataan. Hasil tanggapan variabel *finance management* tersebut dijelaskan pada tabel 4.11 berikut ini:

Tabel 4. 11 Tanggapan Responden Mengenai Finance Management (FM)

Variabel	Indikator	Skor					Jumlah
		STS	TS	N	S	SS	
<i>Finance Management (FM)</i>	FM_1	0	1	5	19	97	122
	FM_2	0	2	5	29	86	122
	FM_3	0	3	8	21	90	122
	FM_4	0	3	6	34	79	122
	FM_5	0	4	4	33	81	122
	FM_6	0	3	8	36	75	122
	FM_7	0	3	9	35	75	122
	FM_8	0	3	6	33	80	122

Sumber: Data Primer yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.11 diatas dapat diketahui bahwa tanggapan responden terhadap variabel *finance management* (FM) terdiri dari 8 item

pernyataan diantaranya yaitu, pimpinan daerah memaparkan rancangan peraturan daerah tentang APBD beserta lampirannya kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan bersama (FM_1) memilih jawaban sangat setuju (SS) sebanyak 97 responden, jawaban setuju (S) sebanyak 19 responden, jawaban cukup (C) sebanyak 5 responden, jawaban tidak setuju (TS) sebanyak 1 responden, dan jawaban sangat tidak setuju (STS) sebanyak 0 responden. Dapat disimpulkan bahwa untuk pernyataan pimpinan daerah memaparkan rancangan peraturan daerah tentang APBD beserta lampirannya kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan bersama (FM_1) skor yang paling banyak dijawab responden yaitu 97 responden dengan memilih sangat setuju (SS).

Segala pendapatan dan pengeluaran daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dikelola dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) (FM_2) memilih jawaban sangat setuju (SS) sebanyak 86 responden, jawaban setuju (S) sebanyak 29 responden, jawaban cukup (C) sebanyak 5 responden, jawaban tidak setuju (TS) sebanyak 2 responden, dan jawaban sangat tidak setuju (STS) sebanyak 0 responden. Dapat disimpulkan bahwa untuk pernyataan segala pendapatan dan pengeluaran daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dikelola dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) (FM_2) skor yang paling banyak dijawab responden yaitu 86 responden dengan memilih sangat setuju (SS).

Pendapatan daerah disetorkan langsung ke rekening kas umum daerah pada bank pemerintah yang ditunjuk (FM_3) memilih jawaban sangat setuju (SS) sebanyak 90 responden, jawaban setuju (S) sebanyak 21 responden, jawaban cukup (C) sebanyak 8 responden, jawaban tidak setuju (TS) sebanyak 3 responden, dan jawaban sangat tidak setuju (STS) sebanyak 0 responden. Dapat disimpulkan bahwa untuk pernyataan pendapatan daerah disetorkan langsung ke rekening kas umum daerah pada bank pemerintah yang ditunjuk (FM_3) skor yang paling banyak dijawab responden yaitu 90 responden dengan memilih sangat setuju (SS).

Entitas menyampaikan atau melaporkan laporan keuangan sebagai bagian dari pertanggungjawabannya (FM_4) memilih jawaban sangat setuju (SS) sebanyak 79 responden, jawaban setuju (S) sebanyak 34 responden, jawaban cukup (C) sebanyak 6 responden, jawaban tidak setuju (TS) sebanyak 3 responden, dan jawaban sangat tidak setuju (STS) sebanyak 0 responden. Dapat disimpulkan bahwa untuk pernyataan entitas menyampaikan atau melaporkan laporan keuangan sebagai bagian dari pertanggungjawabannya (FM_4) skor yang paling banyak dijawab responden yaitu 79 responden dengan memilih sangat setuju (SS).

Sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), entitas menyusun laporan keuangan (FM_5) memilih jawaban sangat setuju (SS) sebanyak 81 responden, jawaban setuju (S) sebanyak 33 responden, jawaban cukup (C) sebanyak 4 responden, jawaban tidak setuju (TS) sebanyak 4 responden, dan jawaban sangat tidak setuju (STS) sebanyak 0 responden. Dapat disimpulkan bahwa untuk pernyataan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), entitas menyusun laporan keuangan (FM_5) skor yang paling banyak dijawab responden yaitu 81 responden dengan memilih sangat setuju (SS).

Seluruh elemen dalam instansi telah memenuhi syarat kejujuran dan integritas dalam bekerja (FM_6) memilih jawaban sangat setuju (SS) sebanyak 75 responden, jawaban setuju (S) sebanyak 36 responden, jawaban cukup (C) sebanyak 8 responden, jawaban tidak setuju (TS) sebanyak 3 responden, dan jawaban sangat tidak setuju (STS) sebanyak 0 responden. Dapat disimpulkan bahwa untuk pernyataan seluruh elemen dalam instansi telah memenuhi syarat kejujuran dan integritas dalam bekerja (FM_6) skor yang paling banyak dijawab responden yaitu 75 responden dengan memilih sangat setuju (SS).

Instansi melakukan evaluasi kinerja yang terkait dengan pengelolaan keuangan (FM_7) memilih jawaban sangat setuju (SS) sebanyak 75 responden, jawaban setuju (S) sebanyak 35 responden, jawaban cukup (C)

sebanyak 9 responden, jawaban tidak setuju (TS) sebanyak 3 responden, dan jawaban sangat tidak setuju (STS) sebanyak 0 responden. Dapat disimpulkan bahwa untuk pernyataan instansi melakukan evaluasi kinerja yang terkait dengan pengelolaan keuangan (FM_7) skor yang paling banyak dijawab responden yaitu 75 responden dengan memilih sangat setuju (SS).

Terdapat pengawasan secara teratur oleh badan pengawas daerah atau inspektorat daerah (FM_8) memilih jawaban sangat setuju (SS) sebanyak 80 responden, jawaban setuju (S) sebanyak 33 responden, jawaban cukup (C) sebanyak 6 responden, jawaban tidak setuju (TS) sebanyak 3 responden, dan jawaban sangat tidak setuju (STS) sebanyak 0 responden. Dapat disimpulkan bahwa untuk pernyataan terdapat pengawasan secara teratur oleh badan pengawas daerah atau inspektorat daerah (FM_8) skor yang paling banyak dijawab responden yaitu 80 responden dengan memilih sangat setuju (SS).

4.2.5. Deskripsi Variabel (SIMDA) *Financial Management Information System* (FMIS)

Variabel (SIMDA) *Financial Management Information System* (FMIS) (SMF) pada penelitian ini diukur melalui 4 indikator yang didalamnya dibagi dalam 9 pernyataan. Hasil tanggapan variabel (SIMDA) *Financial Management Information System* (FMIS) tersebut dijelaskan pada tabel 4.12 berikut ini :

Tabel 4. 12 Tanggapan Responden Mengenai SIMDA F-MIS (SMF)

Variabel	Indikator	Skor					Jumlah
		STS	TS	N	S	SS	
SIMDA F-MIS (SMF)	SMF_1	0	0	11	82	29	122
	SMF_2	0	0	9	82	31	122
	SMF_3	0	0	8	79	35	122
	SMF_4	0	0	9	78	35	122
	SMF_5	0	0	8	73	41	122
	SMF_6	0	0	7	71	44	122

SMF_7	0	0	7	81	34	122
SMF_8	0	0	4	69	49	122
SMF_9	0	0	4	67	51	122

Sumber: Data Primer yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.12 diatas dapat diketahui bahwa tanggapan responden terhadap variabel (SIMDA) *Financial Management Information System* (FMIS) (SMF) terdiri dari 9 item pernyataan diantaranya yaitu, kualitas pemahaman masing-masing admin atau pegawai terkait detail fungsi aplikasi SIMDA keuangan (SMF_1) memilih jawaban sangat setuju (SS) sebanyak 29 responden, jawaban setuju (S) sebanyak 82 responden, jawaban cukup (C) sebanyak 11 responden, jawaban tidak setuju (TS) sebanyak 0 responden, dan jawaban sangat tidak setuju (STS) sebanyak 0 responden. Dapat disimpulkan bahwa untuk pernyataan kualitas pemahaman masing-masing admin atau pegawai terkait detail fungsi aplikasi SIMDA keuangan (SMF_1) skor yang paling banyak dijawab responden yaitu 82 responden dengan memilih setuju (S).

Komputer yang dipakai untuk penginputan data memadai (SMF_2) memilih jawaban sangat setuju (SS) sebanyak 31 responden, jawaban setuju (S) sebanyak 82 responden, jawaban cukup (C) sebanyak 9 responden, jawaban tidak setuju (TS) sebanyak 0 responden, dan jawaban sangat tidak setuju (STS) sebanyak 0 responden. Dapat disimpulkan bahwa untuk pernyataan komputer yang dipakai untuk penginputan data memadai (SMF_2) skor yang paling banyak dijawab responden yaitu 82 responden dengan memilih setuju (S).

Tidak ada kendala pada komputer yang tersedia (SMF_3) memilih jawaban sangat setuju (SS) sebanyak 35 responden, jawaban setuju (S) sebanyak 79 responden, jawaban cukup (C) sebanyak 8 responden, jawaban tidak setuju (TS) sebanyak 0 responden, dan jawaban sangat tidak setuju (STS) sebanyak 0 responden. Dapat disimpulkan bahwa untuk pernyataan tidak ada kendala pada komputer yang tersedia (SMF_3) skor

yang paling banyak dijawab responden yaitu 79 responden dengan memilih setuju (S).

Adanya jaringan internet memudahkan dalam menjalankan aplikasi SIMDA Keuangan tersebut (SMF_4) memilih jawaban sangat setuju (SS) sebanyak 35 responden, jawaban setuju (S) sebanyak 78 responden, jawaban cukup (C) sebanyak 9 responden, jawaban tidak setuju (TS) sebanyak 0 responden, dan jawaban sangat tidak setuju (STS) sebanyak 0 responden. Dapat disimpulkan bahwa untuk pernyataan adanya jaringan internet memudahkan dalam menjalankan aplikasi SIMDA Keuangan tersebut (SMF_4) skor yang paling banyak dijawab responden yaitu 78 responden dengan memilih setuju (S).

Kepuasan masing-masing admin dalam mengakses aplikasi SIMDA keuangan yang disebabkan oleh jaringan dan pengembangan aplikasi (SMF_5) memilih jawaban sangat setuju (SS) sebanyak 41 responden, jawaban setuju (S) sebanyak 73 responden, jawaban cukup (C) sebanyak 8 responden, jawaban tidak setuju (TS) sebanyak 0 responden, dan jawaban sangat tidak setuju (STS) sebanyak 0 responden. Dapat disimpulkan bahwa untuk pernyataan kepuasan masing-masing admin dalam mengakses aplikasi SIMDA keuangan yang disebabkan oleh jaringan dan pengembangan aplikasi (SMF_5) skor yang paling banyak dijawab responden yaitu 73 responden dengan memilih setuju (S).

Jaringan internet yang sangat cepat dalam melakukan penginputan data keuangan (SMF_6) memilih jawaban sangat setuju (SS) sebanyak 44 responden, jawaban setuju (S) sebanyak 71 responden, jawaban cukup (C) sebanyak 7 responden, jawaban tidak setuju (TS) sebanyak 0 responden, dan jawaban sangat tidak setuju (STS) sebanyak 0 responden. Dapat disimpulkan bahwa untuk pernyataan jaringan internet yang sangat cepat dalam melakukan penginputan data keuangan (SMF_6) skor yang paling banyak dijawab responden yaitu 71 responden dengan memilih setuju (S).

Adanya pelatihan sebelumnya tentang bagaimana cara menjalankan aplikasi SIMDA Keuangan tersebut (SMF_7) memilih jawaban sangat

setuju (SS) sebanyak 34 responden, jawaban setuju (S) sebanyak 81 responden, jawaban cukup (C) sebanyak 7 responden, jawaban tidak setuju (TS) sebanyak 0 responden, dan jawaban sangat tidak setuju (STS) sebanyak 0 responden. Dapat disimpulkan bahwa untuk pernyataan adanya pelatihan sebelumnya tentang bagaimana cara menjalankan aplikasi SIMDA Keuangan tersebut (SMF_7) skor yang paling banyak dijawab responden yaitu 81 responden dengan memilih setuju (S).

Pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan yang tepat waktu dengan aplikasi SIMDA Keuangan (SMF_8) memilih jawaban sangat setuju (SS) sebanyak 49 responden, jawaban setuju (S) sebanyak 69 responden, jawaban cukup (C) sebanyak 4 responden, jawaban tidak setuju (TS) sebanyak 0 responden, dan jawaban sangat tidak setuju (STS) sebanyak 0 responden. Dapat disimpulkan bahwa untuk pernyataan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan yang tepat waktu dengan aplikasi SIMDA Keuangan (SMF_8) skor yang paling banyak dijawab responden yaitu 69 responden dengan memilih setuju (S).

Pengembangan aplikasi SIMDA keuangan yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan (SMF_9) memilih jawaban sangat setuju (SS) sebanyak 51 responden, jawaban setuju (S) sebanyak 67 responden, jawaban cukup (C) sebanyak 4 responden, jawaban tidak setuju (TS) sebanyak 0 responden, dan jawaban sangat tidak setuju (STS) sebanyak 0 responden. Dapat disimpulkan bahwa untuk pernyataan pengembangan aplikasi SIMDA keuangan yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan (SMF_9) skor yang paling banyak dijawab responden yaitu 67 responden dengan memilih setuju (S).

4.3. Statistik Deskriptif Penelitian

Pengukuran statistik deskriptif terhadap variabel ini sebaiknya dilakukan untuk memberikan gambaran tentang data seperti mean (mean), tertinggi (max), terendah (min), dan standar deviasi untuk setiap variabel yaitu *Financial Accountability* (FA), *Accountability* (A), *Transparency* (T)

, *Finance Management* (FM), dan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) *Financial Management Information System* (FMIS). Mengenai hasil uji statistik deskriptif penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.13 sebagai berikut:

Tabel 4. 13 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
FA	122	28	45	37.47	3.573
A	122	17	45	36.20	5.730
T	122	21	45	35.95	5.931
FM	122	20	40	36.66	4.704
SMF	122	28	40	38.31	2.307
Valid N (listwise)	122				

Sumber: Data Primer yang diolah, 2023

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif diatas, dapat dijelaskan distribusi data yang diolah oleh peneliti adalah:

1. Variabel *financial accountability* (FA) dari data tersebut bisa dideskripsikan bahwa nilai minimum 28 sedangkan nilai maksimum sebesar 45, nilai rata-rata *financial accountability* sebesar 37.47 dan standar deviasi data *financial accountability* adalah 3.573.
2. Variabel *accountability* (A) dari data tersebut bisa dideskripsikan bahwa nilai minimum 17 sedangkan nilai maksimum sebesar 45, nilai rata-rata *accountability* sebesar 36.20 dan standar deviasi data *accountability* adalah 5.730.
3. Variabel *transparency* (T) dari data tersebut bisa dideskripsikan bahwa nilai minimum 21 sedangkan nilai maksimum sebesar 45,

nilai rata-rata *transparency* sebesar 35.95 dan standar deviasi data *transparency* adalah 5.931.

4. Variabel *finance management* (FM) dari data tersebut bisa dideskripsikan bahwa nilai minimum 20 sedangkan nilai maksimum sebesar 40, nilai rata-rata *finance management* sebesar 36.66 dan standar deviasi data *finance management* adalah 4.704.
5. Variabel SIMDA F-MIS (SMF) dari data tersebut bisa dideskripsikan bahwa nilai minimum 28 sedangkan nilai maksimum sebesar 40, nilai rata-rata SIMDA F-MIS sebesar 38.31 dan standar deviasi data SIMDA F-MIS adalah 2.307.

4.4. Prosedur Pengujian Instrumen Penelitian

4.4.1. Uji Validitas

Uji validitas dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dinyatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2011). Uji validitas dapat diketahui melalui nilai *Correlated Item-Total Correlation* (CITC). Nilai CITC tersebut akan dibandingkan dengan nilai r-Tabel karena kriteria yang digunakan untuk valid atau tidak adalah menggunakan r-Tabel. Menurut Ghozali (2011) Jika nilai dari CITC > r-Tabel, maka pernyataan dapat dikatakan valid. Dalam melakukan uji validitas dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 122 responden dan taraf signifikan 5% dengan bantuan SPSS. Suatu item pertanyaan dinyatakan valid jika nilai r hitung melebihi dari nilai r tabel pada tingkat signifikan 0,05.

Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk *degree of freedom* (df) = n-2, dalam hal ini n adalah jumlah sampel. Besar (df) = 122-2 maka didapat angka 120, dan alpha = 0,05 didapat r tabel 0,1779, analisisnya menggunakan program SPSS dan outputnya bernama *corrected item total* ketentuannya apabila

nilai r hitung lebih besar dibanding r tabel maka indikator/kuesioner yang digunakan dapat dikatakan valid.

Berdasarkan tabel 4.14 dibawah ini menunjukkan bahwa pada pengujian validitas untuk masing-masing variabel *financial accountability*, *accountability*, *transparency*, dan *finance management* sebagai variabel moderasi terhadap penerapan SIMDA F-MIS. Adapun hasil dari pengujian validitas ditetapkan antara lain:

Tabel 4. 14 Hasil Uji Validitas

Correlations					
Variabel	Indikator	α	r_hitung	r_tabel (df = 120)	Keterangan
<i>Financial Accountability (FA)</i>	FA_1	0,05	.558**	.1779**	VALID
	FA_2	0,05	.754**	.1779**	VALID
	FA_3	0,05	.760**	.1779**	VALID
	FA_4	0,05	.800**	.1779**	VALID
	FA_5	0,05	.838**	.1779**	VALID
	FA_6	0,05	.828**	.1779**	VALID
	FA_7	0,05	.822**	.1779**	VALID
	FA_8	0,05	.826**	.1779**	VALID
	FA_9	0,05	.833**	.1779**	VALID
<i>Accountability (A)</i>	A_1	0,05	.698**	.1779**	VALID
	A_2	0,05	.830**	.1779**	VALID
	A_3	0,05	.854**	.1779**	VALID
	A_4	0,05	.836**	.1779**	VALID
	A_5	0,05	.819**	.1779**	VALID
	A_6	0,05	.843**	.1779**	VALID
	A_7	0,05	.803**	.1779**	VALID
	A_8	0,05	.786**	.1779**	VALID
	A_9	0,05	.699**	.1779**	VALID
<i>Transparency (T)</i>	T_1	0,05	.659**	.1779**	VALID
	T_2	0,05	.797**	.1779**	VALID
	T_3	0,05	.720**	.1779**	VALID
	T_4	0,05	.816**	.1779**	VALID
	T_5	0,05	.792**	.1779**	VALID

Correlations					
Variabel	Indikator	α	r_hitung	r_tabel (df = 120)	Keterangan
	T_6	0,05	.814**	.1779**	VALID
	T_7	0,05	.712**	.1779**	VALID
	T_8	0,05	.733**	.1779**	VALID
	T_9	0,05	.632**	.1779**	VALID
Finance Management (FM)	FM_1	0,05	.840**	.1779**	VALID
	FM_2	0,05	.857**	.1779**	VALID
	FM_3	0,05	.869**	.1779**	VALID
	FM_4	0,05	.847**	.1779**	VALID
	FM_5	0,05	.871**	.1779**	VALID
	FM_6	0,05	.856**	.1779**	VALID
	FM_7	0,05	.821**	.1779**	VALID
	FM_8	0,05	.761**	.1779**	VALID
SIMDA F-MIS (SMF)	SMF_1	0,05	.717**	.1779**	VALID
	SMF_2	0,05	.809**	.1779**	VALID
	SMF_3	0,05	.868**	.1779**	VALID
	SMF_4	0,05	.830**	.1779**	VALID
	SMF_5	0,05	.820**	.1779**	VALID
	SMF_6	0,05	.807**	.1779**	VALID
	SMF_7	0,05	.799**	.1779**	VALID
	SMF_8	0,05	.774**	.1779**	VALID
	SMF_9	0,05	.680**	.1779**	VALID

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: Data Primer yang diolah, 2023

Dapat dilihat dari tabel 4.14 diatas dapat ketahui bahwa nilai r hitung lebih besar dari nilai r_tabel 0,1779, sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap item pertanyaan dalam kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini dapat dinyatakan valid.

4.4.2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dalam penelitian ini digunakan sebagai alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban responden terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2013). Dalam pengujian ini, peneliti mengukur

reliabelnya suatu variabel dengan cara melihat *Cronbach Alpha* dengan signifikansi yang digunakan lebih besar dari 0,60. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* > 0,60 (Ghozali, 2013).

Uji reliabilitas digunakan untuk melihat tingkat konsistensi jawaban didalam kuesioner. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai *cronbach's alpha* variabel dengan standar alpha sebesar 0,60, yaitu apabila nilai *cronbach's alpha* \geq 0,60 maka indikator/kuesioner yang dinyatakan reliabel. Berikut hasil pengujian reliabilitas yang dilakukan terhadap variabel *financial accountability*, *accountability*, *transparency*, dan *finance management* sebagai variabel moderasi terhadap penerapan SIMDA F-MIS.

Tabel 4. 15 Uji Reliabilitas Indikator Variabel

Reliability Statistics						
No.	Variabel	Standar Alpha	Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items	Keterangan
1	Financial Accountability (FA)	0.60	0.921	0.920	9	Reliabel
2	Accountability (A)	0.60	0.928	0.928	9	Reliabel
3	Transparency (T)	0.60	0.897	0.898	9	Reliabel
4	Finance Management (FM)	0.60	0.941	0.941	8	Reliabel
5	SIMDA F-MIS (SMF)	0.60	0.925	0.924	9	Reliabel

Sumber: Data Primer yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.15 dapat diketahui bahwa masing-masing variabel *financial accountability*, *accountability*, *transparency*, dan *finance management* sebagai variabel moderasi terhadap penerapan SIMDA F-MIS memiliki *cronbach's alpha* > 0,70, dengan demikian, hasil uji reliabilitas terhadap keseluruhan variabel adalah reliabel.

4.5. Pengujian Asumsi Klasik

Dalam uji asumsi klasik terdapat beberapa pengujian yang harus dilakukan dengan menggunakan bantuan SPSS yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas.

4.5.1. Pengujian Normalitas Data

Pengujian normalitas bertujuan menilai apakah data sampel penelitian ini memiliki distribusi normal. Sebuah model dianggap baik jika data mendekati atau sesuai dengan distribusi normal (Ghozali, 2011).

Hasil uji normalitas penelitian ini dengan analisis statistik (kolmogorov-smirnov). Analisis statistik bisa dilihat pada gambar 4.1 berikut ini:

1. Analisis Statistik

Hasil pengujian ini digunakan untuk menentukan normal tidaknya data pada variabel dependen dapat dilakukan dengan menggunakan *kolmogorov-smirnov*. Apabila nilai signifikan *kolmogorov-smirnov* < 0,05 maka distribusi tidak normal, sebaliknya apabila nilai signifikansi *kolmogorov-smirnov* > 0,05 maka data terdistribusi tersebut normal. Hasil pengujian adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 16 Hasil Uji Asumsi Klasik

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		122
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.88619041
Most Extreme Differences	Absolute	.055
	Positive	.037
	Negative	-.055
Test Statistic		.055

Asymp. Sig. (2-tailed)	.200 ^{c,d}
------------------------	---------------------

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Data Primer yang diolah, 2023

Berdasarkan output diatas, diketahui bahwa signifikansi Asymp.Sig. (2-tiled) sebesar $0,200 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan untuk diuji dalam penelitian ini berdistribusi normal.

4.5.2. Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolonieritas dilakukan untuk mengetahui apakah didalam model regresi tersebut ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi kolerasi diantara variabel bebas. Diagnosa secara sederhana terhadap tidak adanya multikolinearitas di dalam model regresi yaitu data dikatakan tidak terjadi multikolinearitas apabila jika nilai *tolerance* diatas (>) 0,1 dan mempunyai VIF dibawah (<) 10. Hasil uji multikolenieritas dapat dilihat pada tabel 4.17 berikut ini :

Tabel 4. 17 Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	38.311	0.174		220.609	0.000		
	Zscore: Financial Accountability (FA)	1.129	0.177	0.489	6.385	0.000	0.973	1.028
	Zscore: Accountability (A)	0.612	0.177	0.265	3.452	0.001	0.966	1.035

Zscore: Transparency (T)	0.446	0.178	0.193	2.504	0.014	0.957	1.044
Zscore: Finance Management (FM)	0.431	0.177	0.187	2.436	0.016	0.969	1.031

a. Dependent Variable: SIMDA F-MIS

Sumber: Data Primer yang diolah, 2023

Hasil pengujian tersebut menunjukkan nilai sebagai berikut:

- *Financial Accountability* (X1) berdasarkan hasil *tolerance* 0.973 lebih besar dari 0.1 dan berdasarkan nilai VIF 1.028 kurang dari 10. Hal ini menunjukkan bahwa murni berdiri sendiri dan tidak ada multikolinearitas. Sehingga model regresi layak untuk digunakan dalam melakukan pengujian.
- *Accountability* (X2) berdasarkan hasil *tolerance* 0.966 lebih besar dari 0.1 dan berdasarkan nilai VIF 1.035 kurang dari 10. Hal ini menunjukkan bahwa murni berdiri sendiri dan tidak ada multikolinearitas. Sehingga model regresi layak untuk digunakan dalam melakukan pengujian.
- *Transparency* (X3) berdasarkan hasil *tolerance* 0.957 lebih besar dari 0.1 dan berdasarkan nilai VIF 1.044 kurang dari 10. Hal ini menunjukkan bahwa murni berdiri sendiri dan tidak ada multikolinearitas. Sehingga model regresi layak untuk digunakan dalam melakukan pengujian.
- *Finance Management* (Z) berdasarkan hasil *tolerance* 0.969 lebih besar dari 0.1 dan berdasarkan nilai VIF 1.031 kurang dari 10. Hal ini menunjukkan bahwa murni berdiri sendiri dan tidak ada multikolinearitas. Sehingga model regresi layak untuk digunakan dalam melakukan pengujian.

4.5.3. Uji Heteroskedastisitas

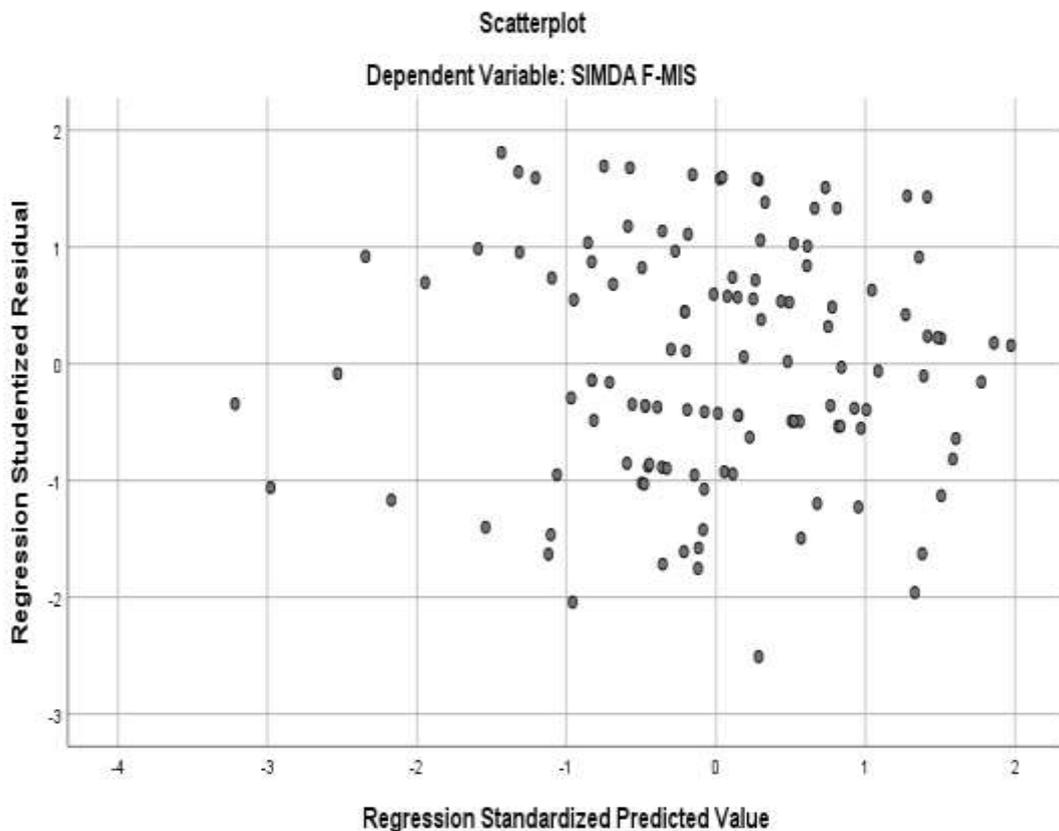
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu

pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011). Dengan dasar analisis sebagai berikut:

- Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka mengindikasikan bahwa penelitian tersebut telah terjadi heteroskedastisitas.
- Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka penelitian tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas.

Untuk mengetahui ada tidaknya gejala heteroskedastisitas, maka dapat dilihat lebih jelasnya seperti pada gambar berikut:

Gambar 4. 1 Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Data Primer yang diolah, 2023

Dari scatterplot diatas dapat terlihat titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 dan sumbu Y, hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi ini. Sehingga model regresi dalam penelitian ini layak digunakan dalam melakukan pengujian.

4.6. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui besarnya variabel independen yaitu pengaruh variabel *financial accountability*, *accountability*, *transparency* terhadap variabel dependen penerapan SIMDA F-MIS. Pengolahan data dengan program SPSS 26 memberikan hasil sebagai berikut:

Tabel 4. 18 Hasil Koefisien Regresi

Model		Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	38.311	0.174		220.609	0.000		
	Zscore: Financial Accountability (FA)	1.129	0.177	0.489	6.385	0.000	0.973	1.028
	Zscore: Accountability (A)	0.612	0.177	0.265	3.452	0.001	0.966	1.035
	Zscore: Transparency (T)	0.446	0.178	0.193	2.504	0.014	0.957	1.044
	Zscore: Finance Management (FM)	0.431	0.177	0.187	2.436	0.016	0.969	1.031

a. Dependent Variable: SIMDA F-MIS

Sumber: Data Primer yang diolah, 2023

Sehingga dari persamaan rumus regresi linear berganda dapat diperoleh hasil sebagai berikut:

$$Y = 38.311 + 1.129 X1 + 0,612 X2 + 0,446 X3$$

Hasil persamaan regresi berganda tersebut diatas memberikan pengertian bahwa:

- a. Nilai konstanta 38.311 mempunyai arti bahwa apabila variabel-variabel bebas yaitu *financial accountability*, *accountability*, *transparency*, itu konstan atau tidak berubah maka penerapan SIMDA F-MIS bernilai positif
- b. b1 (nilai koefisien regresi X1) 1.129 mempunyai arti bahwa jika *financial accountability* (X1) pada instansi pemerintahan di Indonesia meningkat, sedangkan variabel lain adalah tetap (konstan) maka penerapan SIMDA F-MIS juga meningkat dan berdampak positif pada instansi pemerintahan.
- c. b2 (nilai koefisien regresi X2) 0.612 mempunyai arti bahwa jika *accountability* (X2) pada instansi pemerintahan di Indonesia meningkat, sedangkan variabel lain adalah tetap (konstan) maka penerapan SIMDA F-MIS pada instansi pemerintahan di Indonesia dapat dikatakan berjalan dengan lancar dan layak untuk di implementasikan pada setiap instansi pemerintahan.
- d. b3 (nilai koefisien regresi X3) 0.446 mempunyai arti bahwa jika *transparency* (X3) pada instansi pemerintahan di Indonesia meningkat dan menambah nilai positif, sedangkan variabel lain adalah tetap (konstan) maka penerapan SIMDA F-MIS pada instansi pemerintahan di Indonesia dapat dikatakan berjalan dengan lancar dan layak untuk di implementasikan pada setiap instansi pemerintahan.

4.7. Moderated Regression Analysis (MRA) dengan Metode Selisih Mutlak

Analisis regresi variabel moderasi atau *Moderated Regression Analysis* (MRA) dengan Metode Selisih Mutlak dilakukan dengan meregresikan selisih mutlak variabel independen terstandarisasi dengan variabel yang dihipotesiskan sebagai variabel moderasi terstandarisasi. Persamaan analisis regresi moderasi (MRA) dengan Metode Selisih Mutlak dalam penelitian ini dengan menggunakan nilai mutlak selisih dari variable *financial accountability* (X_1), *accountability* (X_2), *transparency* (X_3) sebagai independen, *finance management* (Z) sebagai moderator dan SIMDA F-MIS (Y) sebagai dependen. Pengolahan data dengan program SPSS 26 memberikan hasil sebagai berikut :

Tabel 4. 19 Hasil Koefisien Moderated Regression Analysis (MRA)

Model		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	36.088	0.297		121.405	0.000
	Zscore: Financial Accountability (FA)	1.133	0.157	0.491	7.232	0.000
	Zscore: Accountability (A)	0.447	0.148	0.194	3.013	0.003
	Zscore: Transparency (T)	0.397	0.143	0.172	2.770	0.007
	Zscore: Finance Management (FM)	1.852	0.211	0.803	8.767	0.000
	Selisih Mutlak FA_FM	0.955	0.185	0.458	5.172	0.000
	Selisih Mutlak A_FM	0.568	0.202	0.226	2.809	0.006
	Selisih Mutlak T_FM	0.677	0.195	0.302	3.475	0.001

a. Dependent Variable: SIMDA F-MIS

Sumber: Data Primer yang diolah, 2023

Sehingga dari persamaan rumus regresi linear berganda dapat diperoleh hasil sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 ZFA + \beta_2 ZA + \beta_3 ZT + \beta_4 |ZFA - ZFM| + \dots + \epsilon$$

$$Y = 36.088 + 1.133 X_1 + 0.447 X_2 + 0.397 X_3 + 0.955 |ZFA - ZFM| \\ + 0.568 |ZA - ZFM| + 0.677 |ZT - ZFM|$$

Hasil persamaan regresi berganda tersebut diatas memberikan pengertian bahwa:

- a. Nilai konstanta 36.088 mempunyai arti bahwa apabila variabel-variabel bebas yaitu *financial accountability*, *accountability*, *transparency*, itu konstan atau tidak berubah maka penerapan SIMDA F-MIS bernilai positif serta memperlancar dan mempermudah proses pengelolaan keuangan pada instansi pemerintahan di Indonesia.
- b. b1 (nilai koefisien regresi X1) 1.133 mempunyai arti bahwa jika *financial accountability* (X1) meningkat, sedangkan variabel lain adalah tetap (konstan) maka penerapan SIMDA F-MIS berdampak positif dan dapat dikatakan berjalan dengan lancar dan layak untuk di implementasikan pada setiap instansi pemerintahan.
- c. b2 (nilai koefisien regresi X2) 0.447 mempunyai arti bahwa jika *accountability* (X2) meningkat, sedangkan variabel lain adalah tetap (konstan) maka penerapan SIMDA F-MIS pada setiap instansi pemerintahan telah berjalan sesuai regulasi yang sudah ditetapkan dan mempermudah proses pengelolaan keuangan dengan baik.
- d. b3 (nilai koefisien regresi X3) 0.397 mempunyai arti bahwa jika *transparency* (X3) meningkat, sedangkan variabel lain adalah tetap (konstan) maka penerapan SIMDA F-MIS juga akan meningkat.
- e. b4 (nilai mutlak dari selisih antara FA (X1) dan FM (Z) 0.955 mempunyai arti bahwa jika nilai mutlak dari selisih antara *financial accountability* (X₁) dan *Finance Management* (Z) disebut dengan moderat karena menggambarkan pengaruh moderasi *Finance Management* (Z) terhadap hubungan antara *financial accountability* (X₁) dan SIMDA F-MIS (Y). Persamaan regresi antara 3 variabel yaitu *financial accountability* (X₁) dan *Finance Management* (Z) dan

variabel selisih mutlak (*financial accountability - finance management*).

- f. b5 (nilai mutlak dari selisih antara A (X₂) dan FM (Z)) 0.568 mempunyai arti bahwa jika nilai mutlak dari selisih antara *accountability* (X₂) dan *Finance Management* (Z) disebut dengan moderat karena menggambarkan pengaruh moderasi *Finance Management* (Z) terhadap hubungan antara *accountability* (X₂) dan SIMDA F-MIS (Y). Persamaan regresi antara 3 variabel yaitu *accountability* (X₂) dan *Finance Management* (Z) dan variabel selisih mutlak (*accountability - finance management*).
- g. b6 (nilai mutlak dari selisih antara T (X₃) dan FM (Z)) 0.677 mempunyai arti bahwa jika nilai mutlak dari selisih antara *transparency* (X₃) dan *Finance Management* (Z) disebut dengan moderat karena menggambarkan pengaruh moderasi *Finance Management* (Z) terhadap hubungan antara *transparency* (X₃) dan SIMDA F-MIS (Y). Persamaan regresi antara 3 variabel yaitu *transparency* (X₃) dan *Finance Management* (Z) dan variabel selisih mutlak (*transparency - finance management*).

4.8. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah persamaan regresi yang diperoleh tersebut dapat dipertanggung jawabkan atau tidak. Bila hasil analisis nanti menunjukkan bahwa persamaan regresi yang bersangkutan adalah signifikan atau dapat dipertanggung jawabkan, maka persamaan regresi tersebut dapat digunakan untuk meramalkan variabel Y dan sekaligus untuk membuktikan hipotesis yang diajukan.

4.8.1. Uji F/ Uji Model (Goodness of Fit)

Uji statistik F ini digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel *Financial Accountability*, *Accountability*, *Transparency* dan *Finance Management* sebagai variabel moderasi terhadap Penerapan Sistem

Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) *Financial Management Information System* (FMIS). Adapun hasil pengujian statistik F dari SPSS dapat diketahui pada tabel berikut:

Tabel 4. 20 Hasil Uji F

		ANOVA ^a				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	392.676	7	56.097	25.429	.000 ^b
	Residual	251.488	114	2.206		
	Total	644.164	121			

a. Dependent Variable: SIMDA F-MIS

b. Predictors: (Constant), Selisih Mutlak T_FM, Zscore: T, Zscore: A, Zscore: FA, Selisih Mutlak A_FM, Selisih Mutlak FA_FM, Zscore: FM

Sumber: Data Primer yang diolah, 2023

Dari tabel 4.21 uji signifikansi simultan (uji F) didapatkan hasil F hitung sebesar 25.429 > dari F tabel 1.770 dengan signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama terdapat pengaruh *Financial Accountability, Accountability, Transparency* dan *Finance Management* terhadap penerapan SIMDA F-MIS.

4.8.2. Uji Parameter Individual / Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi hubungan antara variabel X dan variabel Y secara parsial atau dapat dikatakan uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi-variasi dependen. Hasil output dari SPSS sebagai berikut:

Tabel 4. 21 Hasil Uji t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	36.088	0.297		121.405	0.000
	Zscore: Financial Accountability (FA)	1.133	0.157	0.491	7.232	0.000
	Zscore: Accountability (A)	0.447	0.148	0.194	3.013	0.003
	Zscore: Transparency (T)	0.397	0.143	0.172	2.770	0.007
	Zscore: Finance Management (FM)	1.852	0.211	0.803	8.767	0.000
	Selisih Mutlak FA_FM	0.955	0.185	0.458	5.172	0.000
	Selisih Mutlak A_FM	0.568	0.202	0.226	2.809	0.006
	Selisih Mutlak T_FM	0.677	0.195	0.302	3.475	0.001

a. Dependent Variable: SIMDA F-MIS

Sumber: Data Primer yang diolah, 2023

Dapat dilihat tabel 4.20 maka dapat disimpulkan :

1. Pengujian Pengaruh *Financial Accountability* (FA) terhadap Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) *Financial Management Information System* (FMIS)

H1 : *Financial Accountability* (FA) berpengaruh secara signifikan terhadap Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) *Financial Management Information System* (FMIS)

Hasil uji hipotesis 1 dapat dilihat pada tabel 4.20, variabel *Financial Accountability* (X1) berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, maka diperoleh nilai t hitung sebesar $7.232 >$ dari t tabel 1.980 dan bernilai positif dengan hasil signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa H1 diterima, dengan kata lain *Financial Accountability* berpengaruh positif terhadap Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) *Financial Management Information System* (FMIS) karena nilai signifikansi di bawah 0,05.

2. Pengujian Pengaruh *Accountability* (A) terhadap Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) *Financial Management Information System* (FMIS)

H2 : *Accountability* (FA) berpengaruh secara signifikan terhadap Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) *Financial Management Information System* (FMIS)

Hasil uji hipotesis 2 dapat dilihat pada tabel 4.20, variabel *Accountability* (X2) berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, maka diperoleh nilai t hitung sebesar $3.013 >$ dari t tabel 1.980 dan bernilai positif dengan hasil signifikan sebesar $0,003 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa H2 diterima, dengan kata lain *Accountability* berpengaruh positif terhadap Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) *Financial Management Information System* (FMIS) karena nilai signifikansi di bawah 0,05.

3. Pengujian Pengaruh *Transparency* (T) terhadap Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) *Financial Management Information System* (FMIS)

H3: *Transparency* (T) berpengaruh secara signifikan terhadap Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) *Financial Management Information System* (FMIS)

Hasil uji hipotesis 3 dapat dilihat pada tabel 4.20, variabel *Transparency* (X3) berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, maka diperoleh nilai t hitung sebesar $2.770 >$ dari t tabel 1.980 dan bernilai positif dengan hasil signifikan sebesar $0,007 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa H3 diterima, dengan kata lain *Transparency* berpengaruh positif terhadap Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) *Financial Management Information System* (FMIS) karena nilai signifikansi di bawah 0,05.

4. Pengujian Pengaruh *Finance Management* (FM) dalam memoderasi pengaruh *Financial Accountability* (FA) terhadap Penerapan (SIMDA) *Financial Management Information System* (FMIS)

H4: *Finance Management* (FM) memperkuat pengaruh positif antara *Financial Accountability* (FA) terhadap Penerapan (SIMDA) *Financial Management Information System* (FMIS)

Hasil uji hipotesis 4 dapat dilihat pada tabel 4.20 berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, maka diperoleh nilai t hitung sebesar $5.172 >$ dari t tabel 1.980 dan bernilai positif dengan hasil signifikan sebesar $0,000 < 0.05$. Hal ini menunjukkan bahwa H4 diterima, dengan kata lain variabel moderasi selisih mutlak FA-FM berpengaruh signifikan terhadap Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) *Financial Management Information System* (FMIS) karena nilai signifikansi di bawah 0.05.

5. Pengujian Pengaruh *Finance Management* (FM) dalam memoderasi pengaruh *Accountability* (A) terhadap Penerapan (SIMDA) *Financial Management Information System* (FMIS)

H5: *Finance Management* (FM) memperkuat pengaruh positif antara *Accountability* (A) terhadap Penerapan (SIMDA) *Financial Management Information System* (FMIS)

Hasil uji hipotesis 5 dapat dilihat pada tabel 4.20 berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, maka diperoleh nilai t hitung sebesar $2.809 >$ dari t tabel 1.980 dan bernilai positif dengan hasil signifikan sebesar $0.006 < 0.05$. Hal ini menunjukkan bahwa H5 diterima, dengan kata lain variabel moderasi selisih mutlak A-FM berpengaruh signifikan terhadap Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) *Financial Management Information System* (FMIS) karena nilai signifikansi di bawah 0.05.

6. Pengujian Pengaruh *Finance Management* (FM) dalam memoderasi pengaruh *Transparency* (T) terhadap Penerapan (SIMDA) *Financial Management Information System* (FMIS)

H6: *Finance Management* (FM) memperkuat pengaruh positif antara *Transparency* (T) terhadap Penerapan (SIMDA) *Financial Management Information System* (FMIS)

Hasil uji hipotesis 6 dapat dilihat pada tabel 4.20 berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, maka diperoleh nilai t hitung sebesar $3.475 >$ dari t tabel 1.980 dan bernilai positif dengan hasil signifikan sebesar $0.001 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa H_6 diterima, dengan kata lain variabel moderasi selisih mutlak A-FM mampu memoderasi dan berpengaruh signifikan terhadap Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) *Financial Management Information System* (FMIS) karena nilai signifikansi di bawah 0,05.

4.8.3. Koefisien Determinasi (Adjusted R2)

Koefisien determinasi (adjusted R2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hasil dari uji koefisien determinasi (adjusted R2) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 22 Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.781 ^a	.610	.586	1.485

a. Predictors: (Constant), Selisih Mutlak T_FM, Zscore: T, Zscore: A, Zscore: FA, Selisih Mutlak A_FM, Selisih Mutlak FA_FM, Zscore: FM
Sumber: Data Primer yang diolah, 2023

Dari hasil tabel 4.22 didapat *adjusted R2* dengan nilai 0,586. Hal ini dapat diartikan bahwa variabel independen yaitu variabel *Financial Accountability, Accountability, Transparency* dan *Finance Management* sebagai variabel moderasi mempengaruhi variabel dependen yaitu Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) *Financial Management Information System* (FMIS) sebesar 58,6% sedangkan 41,4% dipengaruhi oleh factor lain yang berada diluar model dan tidak dapat terdeteksi dalam penelitian ini.

4.9. Pembahasan

Hasil penelitian ini dapat ditemukan bukti empiris pengaruh *Financial Accountability, Accountability, Transparency* dan *Finance Management* sebagai variabel moderasi terhadap Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) *Financial Management Information System* (FMIS). Dalam penelitian ini memiliki enam hipotesis yang diajukan untuk meneliti pengaruh penerapan SIMDA F-MIS. Hasil pengujian hipotesis-hipotesis tersebut dijelaskan sebagai berikut:

4.9.1. Pengaruh *Financial Accountability* (FA) terhadap Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) *Financial Management Information System* (FMIS)

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa *Financial Accountability* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) *Financial Management Information System* (FMIS) karena tingkat signifikansi sebesar 0,000 berada dibawah 0,05. Hal ini dapat pula dijelaskan bahwa jika laporan pertanggungjawaban keuangan di lakukan dengan baik dan sesuai aturan maka akan meningkatkan proses kinerja SIMDA F-MIS keuangan. Dengan kata lain dijelaskan bahwa implementasi SIMDA F-MIS dapat membantu dan memperlancar dalam mempertanggungjawabkan anggaran yang sudah ditetapkan pada instansi pemerintahan di Indonesia.

Berdasarkan definisi pertanggungjawaban keuangan yang sudah diketahui bahwa segala bentuk dokumen laporan yang telah direalisasi baik itu bukti realisasi penerimaan maupun pengeluaran yang sudah sesuai dengan aturan yang sah. Segala bentuk bukti dokumen itu akan di input dalam sistem informasi keuangan daerah untuk mempertanggungjawabkan segala bentuk anggaran yang telah digunakan. Sistem informasi keuangan daerah yaitu SIMDA yang

sudah diterapkan pada instansi pemerintahan di Indonesia mampu mempermudah dan memperlancar proses pertanggungjawaban keuangan yang sudah di realisasikan.

Pertanggungjawaban keuangan yang dilakukan oleh instansi pemerintahan membutuhkan suatu sistem keuangan yang akurat dan tingkat keabsahan yang tinggi guna menjamin suatu transaksi yang dilakukan dan memperoleh suatu laporan pertanggungjawaban yang akurat, efektif dan efisien. Seluruh pemerintah daerah pada tingkat kabupaten/kota sampai di tingkat pusat diwajibkan untuk menggunakan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dalam proses pengelolaan keuangan. Oleh karena itu, dalam mewujudkan laporan pertanggungjawaban yang baik dan bernilai positif suatu instansi pemerintahan membutuhkan sistem akuntansi keuangan yang handal dan berdampak positif bagi organisasi tersebut.

Pernyataan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Angraini, (2016) dan Felisitas M.Wijaya, (2022) yang menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban keuangan (*Financial Accountability*) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerapan Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Financial Management Information System (FMIS).

4.9.2. Pengaruh *Accountability* (A) terhadap Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) *Financial Management Information System* (FMIS)

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa *accountability* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) *Financial Management Information System* (FMIS) karena tingkat signifikansi sebesar 0,003 berada dibawah 0,05. Hal ini dapat dijelaskan bahwa peranan laporan keuangan pemerintah sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah kepada publik atau masyarakat dan berguna untuk

mempertanggungjawabkan penggunaan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan publik kepada pemerintah dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan maka akan meningkatkan proses kinerja SIMDA F-MIS keuangan. Dengan kata lain disimpulkan bahwa implementasi SIMDA F-MIS keuangan dapat membantu dan memperlancar pada instansi pemerintahan di Indonesia dalam mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas kegiatan yang berkaitan dengan anggaran yang sudah tetapkan. Untuk memperoleh suatu laporan yang akuntabilitas harus dibangun berdasarkan sistem informasi yang handal, untuk menjamin keabsahan.

Sesuai dengan definisi akuntabilitas dalam suatu pemerintahan merupakan bentuk wujud kewajiban dalam suatu organisasi atau instansi untuk mempertanggungjawabkan segala bentuk anggaran atau pengelolaan keuangan yang telah digunakan dalam bentuk laporan keuangan yang sudah memenuhi standar akuntansi, kemudian dilaporkan secara periodik kepada publik melalui media. Dalam mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas dan memenuhi aturan yang berlaku diperlukan suatu sistem yang andal, yaitu sistem yang dapat mengolah data (input) dan menghasilkan informasi (output) yang dapat digunakan manajemen dalam mengambil keputusan.

Hasil ini di dukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Restu Agusti, *et.al.*(2021) dan Gowon, *et.al.*(2021) yang menyimpulkan bahwa akuntabilitas harus dibangun berdasarkan sistem informasi yang handal, untuk menjamin keabsahan, objektivitas dan ketetapan waktu penyampaian informasi artinya akuntabilitas berpengaruh signifikan dan positif terhadap penerapan sistem akuntansi daerah.

4.9.3. Pengaruh Transparency (T) terhadap Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) *Financial Management Information System* (FMIS)

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa *transparency* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) *Financial Management Information System* (FMIS) karena tingkat signifikansi sebesar 0,007 berada dibawah 0,05. Hal ini dapat dijelaskan bahwa jika suatu laporan dan dokumen sudah dilakukan dengan terbuka, baik dalam informasi pencatatan maupun dalam mengelola anggaran maka proses kinerja dalam menerapkan SIMDA F-MIS pada instansi pemerintahan di Indonesia telah berjalan baik dan lancar. Dengan kata lain dikatakan bahwa implementasi SIMDA F-MIS dapat membantu dan memperlancar pada instansi pemerintahan di Indonesia dalam mempertanggungjawabkan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas kegiatan yang berkaitan dengan anggaran secara terbuka dan digunakan sebagai alat untuk memonitoring dan mengevaluasi hasil kinerja dalam organisasi.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Dito (2018), Elkha *et.al*, (2020), Edowati *et.al*.(2021) pengendalian internal, akuntabilitas pengelolaan keuangan, dan transparansi pengelolaan keuangan memiliki pengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Lebih lanjut *transparency* dilakukan sesuai regulasi mampu meningkatkan kinerja pemerintah yg dapat diukur melalui sistem keuangan daerah.

4.9.4. Pengaruh *Finance Management* (FM) dalam memoderasi pengaruh *Financial Accountability* (FA) terhadap Penerapan (SIMDA) *Financial Management Information System* (FMIS)

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa *Finance Management* (FM) mampu memoderasi dan memperkuat pengaruh positif antara

Financial Accountability (FA) terhadap Penerapan (SIMDA) *Financial Management Information System* (FMIS) dengan nilai probabilitas sebesar 0,000 yang artinya nilai tersebut berada dibawah 0,05. Hal ini dapat dijelaskan bahwa jika suatu pemerintahan mampu mengontrol dan mengelola APBD secara tertib, dan tanggungjawab maka dapat dikatakan penerapan SIMDA F-MIS pada instansi pemerintahan di Indonesia telah sukses dan berjalan lancar. Dengan kata lain dikatakan bahwa implementasi SIMDA F-MIS dapat membantu dan memperlancar pengelolaan keuangan pada instansi pemerintahan di Indonesia, sehingga mempermudah dalam mempertanggungjawabkan anggaran yang sudah ditetapkan. Sehingga dapat dikatakan *finance management* berimplikasi positif dapat memperkuat hubungan antara pertanggungjawaban keuangan dan Penerapan (SIMDA) *Financial Management Information System* (FMIS).

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Andi Nurhaedah, *et.al.*(2022) dan Laetitia Boliina, *et.al.* (2023) yang menyimpulkan bahwa pengelolaan manajemen keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah dalam menerapkan sistem informasi akuntansi daerah.

4.9.5. Pengaruh *Finance Management* (FM) dalam memoderasi pengaruh *Accountability* (A) terhadap Penerapan (SIMDA) *Financial Management Information System* (FMIS)

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa *Finance Management* (FM) mampu memoderasi dan memperkuat pengaruh positif antara *Accountability* (A) terhadap Penerapan (SIMDA) *Financial Management Information System* (FMIS) dengan nilai probabilitas sebesar 0,006 yang artinya nilai tersebut berada dibawah 0,05. Hal ini dapat dijelaskan bahwa jika Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dapat direncanakan, dilaksanakan, dipertanggungjawabkan

kepada publik dan diawasi dengan baik dan tertib sesuai regulasi yang ditetapkan maka dapat dikatakan penerapan SIMDA F-MIS pada instansi pemerintahan di Indonesia telah sukses dan berjalan lancar. Dengan kata lain dikatakan bahwa implementasi SIMDA F-MIS pada instansi pemerintahan di Indonesia dapat membantu dan memperlancar segala kegiatan organisasi terkait cara menggunakan, memperoleh, dan mengelola anggaran dalam mencapai tujuan dan target tertentu. Sehingga dapat dikatakan *finance management* berimplikasi positif dapat memperkuat hubungan antara akuntabilitas keuangan dan Penerapan (SIMDA) *Financial Management Information System* (FMIS).

Hal ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Silvester Saman, *et.al.*(2020) dan Sujanadi, *et. al.*(2021) yang menyimpulkan bahwa Manajemen keuangan daerah mampu memperkuat hubungan akuntabilitas dan berpengaruh secara signifikan terhadap Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) *Financial Management Information System* (FMIS) dan Akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Sistem Akuntansi keuangan Daerah.

4.9.6. Pengaruh *Finance Management* (FM) dalam memoderasi pengaruh *Transparency* (T) terhadap Penerapan (SIMDA) *Financial Management Information System* (FMIS)

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa *Finance Management* (FM) mampu memoderasi dan memperkuat pengaruh positif antara *transparency* (T) terhadap Penerapan (SIMDA) *Financial Management Information System* (FMIS) dengan nilai probabilitas sebesar 0,001 yang artinya nilai tersebut berada dibawah 0,05. Hal ini dapat dijelaskan bahwa jika transparansi dalam pengelolaan keuangan pada instansi pemerintahan di Indonesia telah dilaksanakan sesuai aturan yang ditetapkan maka dapat dikatakan penerapan

SIMDA F-MIS pada instansi pemerintahan telah sukses, berjalan lancar dan dapat diandalkan. Dapat dijelaskan bahwa dalam menunjang terjadinya otonomi daerah yang baik diperlukan transparansi penyusunan laporan keuangan agar terhindar dari berbagai kecurangan dalam penyusunan dan pengelolaan laporan keuangan selain itu transparansi laporan keuangan juga dimaksudkan untuk meningkatkan kredibilitas pemerintahan di mata publik. Sehingga dapat dikatakan *finance management* berimplikasi positif dapat memperkuat hubungan antara *transparency* keuangan dan Penerapan (SIMDA) *Financial Management Information System* (FMIS).

Hal ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Witra Maison, *et.al.*(2020), Asensia, *et. al.* (2022) dan Fien Hapsari Somad, *et. al.* (2023) menyimpulkan bahwa Sistem Informasi Manajemen Daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dan Dukungan Manajemen keuangan mampu memoderasi pengaruh Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

BAB V

PENUTUP

Pada bagian akhir tesis ini disajikan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya. Kemudian berdasarkan kesimpulan tersebut juga diberikan saran. Saran hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengelolaan keuangan dalam penerapan tata kelola yang baik.

Berdasarkan hasil analisis regresi variabel moderasi yang telah dilakukan pada bab sebelumnya dengan menggunakan metode selisih mutlak, maka tujuan artikel ini adalah untuk menguji dan menyajikan bukti empiris mengenai pengaruh pertanggungjawaban keuangan, akuntabilitas, dan transparansi, serta pengelolaan keuangan yang dijadikan variabel moderasi terhadap implementasi sistem informasi manajemen daerah (SIMDA F-MIS).

5.1 Kesimpulan

Perkembangan teknologi di sektor publik, terutama di Indonesia, telah mengalami kemajuan pesat, terutama sejak era reformasi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintahan. Berbagai inovasi dan penerapan teknologi telah memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keterbukaan pemerintah. Deputy Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) untuk membantu seluruh instansi pemerintahan di Indonesia dalam pengelolaan keuangan. Perkembangan ini tidak hanya meningkatkan efisiensi administrasi

publik tetapi juga membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Penerapan teknologi di sektor publik di Indonesia terus berkembang sejalan dengan upaya untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan.

Hasil dari penelitian ini yang telah dianalisis pada bab sebelumnya menunjukkan bahwa 58,6% variasi variabel dependen penerapan sistem informasi manajemen daerah (SIMDA F-MIS) dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen yakni variabel *Financial Accountability*, *Accountability*, *Transparency* dan *Finance Management* sebagai variabel moderasi. Sisa presentase sebesar 41,4% dipengaruhi oleh factor lain yang berada diluar model dan tidak dapat terdeteksi dalam penelitian ini.

Hasil Penelitian yang mencerminkan hubungan positif dan signifikan antara variabel *financial accountability*, *accountability*, *transparency* dan Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) *Financial Management Information System* (FMIS) dapat dilihat dari beberapa faktor yaitu kepatuhan terhadap aturan dan pertanggungjawaban keuangan, meningkatnya efektivitas pertanggungjawaban anggaran, efisiensi operasional, keandalan dan akuntabilitas sistem informasi, pentingnya keabsahan laporan, keterbukaan dalam informasi pencatatan, realisasi anggaran yang terbuka, monitoring dan evaluasi kinerja, akses mudah untuk pihak-pihak terkait, pertanggungjawaban yang diperkuat, kejelasan dalam pelaporan. Pernyataan tersebut menekankan pentingnya *financial accountability*, *accountability*, *transparency* dalam mendukung pelaksanaan SIMDA F-MIS untuk mencapai tujuan pertanggungjawaban anggaran yang optimal di lingkungan pemerintahan di Indonesia dan pentingnya membangun, memelihara sistem informasi yang handal seperti SIMDA F-MIS untuk mendukung praktik akuntabilitas, memastikan keabsahan serta keandalan laporan keuangan dalam lingkungan manajemen keuangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *finance management* (FM) berfungsi sebagai variabel moderasi yang memoderasi dan memperkuat hubungan positif antara variabel *financial accountability* (FA), *accountability* (A), *transparency* (T) dan Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)

Financial Management Information System (FMIS) dapat diketahui dari beberapa poin yang mendukung yaitu optimalisasi pengelolaan keuangan, penguatan pertanggungjawaban anggaran, pengelolaan risiko keuangan, perencanaan dan pelaksanaan akuntabilitas, pertanggungjawaban publik dan pengawasan yang baik, kepatuhan terhadap regulasi, transparansi dalam penyusunan laporan keuangan, mencegah kecurangan dalam pengelolaan laporan keuangan, meningkatkan kredibilitas instansi pemerintahan, peran sistem informasi sebagai alat pengontrol dan evaluasi, peningkatan kinerja keuangan melalui pengelolaan keuangan dan SIMDA F-MIS. Pernyataan tersebut menekankan pentingnya peran *finance management* sebagai faktor penentu dalam mengoptimalkan manfaat dari implementasi SIMDA F-MIS dan mendukung aspek operasional, kredibilitas, serta kinerja keuangan yang baik di instansi pemerintahan di Indonesia.

5.2 Keterbatasan Penelitian

1. Adanya keterbatasan dalam penelitian yang menggunakan kuesioner secara *online* melalui *google form*, yaitu kejujuran pengisian kuesioner yang belum tentu dapat dijamin karena tidak adanya pengontrolan langsung dari peneliti.
2. Adanya keterbatasan waktu yang mendorong peneliti dalam memilih variabel yang dapat diukur atau diamati dengan cepat dan efisien dan penggunaan alat pengukuran yang cepat dan mudah diimplementasikan.

5.3 Saran

Berdasarkan keterbatasan dari hasil penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka dapat diberikan saran-saran yang nantinya diharapkan dapat memperbaiki ataupun menyempurnakan penerapan SIMDA keuangan sehingga lebih membawa dampak yang baik bagi pengelolaan keuangan dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih baik. Adapun saran-saran tersebut adalah:

1. Untuk mengatasi keterbatasan ini, saran untuk peneliti selanjutnya dapat mempertimbangkan menggunakan metode-metode tambahan, seperti wawancara langsung, observasi, atau menggabungkan data dari sumber

lain. Selain itu, peneliti juga dapat mencantumkan pertanyaan pengujian kejujuran dalam kuesioner atau melakukan analisis statistik tertentu untuk mendeteksi potensi kecurangan dalam jawaban.

2. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti variabel-variabel di luar penelitian ini yang terkait dengan sistem informasi akuntansi maupun penyusunan laporan keuangan karena penelitian terkait SIMDA keuangan adalah penelitian yang masih harus dikembangkan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Bahrullah Akbar. (2002). Fungsi Manajemen Keuangan. In *Booklet Publikasi BPK* (Nomor NO. 87, hal. Bulan Oktober, Jakarta, BPK).
- Handayani Ririn. (2020). Metodologi Penelitian Sosial. In *Yogyakarta: Trussmedia. Grafika*.
- Imam Ghozali. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26. In *Badan Penerbit Universitas Diponegoro*.
- Kasmadi & Sunariah, N. S. (2014). Panduan Modern Penelitian Kuantitatif. In *Bandung: Alfabeta*.
- Priyatno Duwi. (2013). Analisis Korelasi, Regresi dan Multivariate dengan SPSS. In *Yogyakarta : Gava Media*.
- Priyatno Duwi. (2016). Belajar Alat Analisis Data Dan Cara Pengolahannya Dengan SPSS. In *Yogyakarta : Gava Media*.
- Siregar, S. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif; Dilengkapi Dengan Perhitungan Manual & SPSS. In *Jakarta, Kencana*.
- Siregar, S. (2014). Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif. In *Jakarta, Bumi Aksara*.
- Sugiyono. (2019). Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. In *Edisi ke 2 Bandung, Alfabeta*.
- Suliyanto. (2011). Ekonometrika Terapan : Teori dan Aplikasi dengan SPSS. In *Yogyakarta: Penerbit Andi Offset. Yogyakarta*.

JURNAL

- Abidin, M Khoirul, Afifudin, dan Janaidi. 2018. "Pengaruh Implementasi Sistem Manajemen Daerah (SIMDA), Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Standar Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang." *E-Jra* 07(10).
- Ade Lestari, Baiq Anggun Hilendri Lestari, dan Lalu Takdir Jumaidi. 2022. "Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) dalam Pengelolaan Retribusi Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kota Mataram." *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi* 2(1).
- Amba Sugi, Ferdinant. 2020. "Tesis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Toraja Utara." POLITEKNIK STIA LAN MAKASSAR.
- Aminah, Albertus Daoni, Tina Miniawati, dan Kahirudin. 2022. "Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Alokasi Dana Desa (Studi Desa Merbau Mataram Kecamatan Merbau Mataram)." *Journal of the Japan Welding Society* 91(5).
- Ananda, Febryandhie, dan Mustika Permata Sari. 2020. "Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman)." *JURNAL PUNDI* 4(2).
- Angraini, D., R. Agusti, dan L. Anggraini. 2016. "Pengaruh Penerapan Sistem Keuangan Daerah, Transparansi, Aktivitas Pengendalian Dan Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir)." *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau* 3(1).
- Asensia, A, S Saman, dan D Daryanti. 2020. "Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Ditinjau Dari Sistem Akuntansi" *Accounting Journal*.
- Asih, NKSD, dan NPTW Pratiwi. 2021. "Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Sakd)" *Hita Akuntansi dan Keuangan*.
- Al Asyari, Septem;, dan Herlina Helmy. 2020. "Analisis Kualitas Pengungkapan Laporan Keuangan Dalam Website Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu)." *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 2(1).
- Auditya, Lucy, Husaini Husaini, dan Lismawati Lismawati. 2021. "Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah." *Jurnal Fairness* 3(1).

- Ayu Puji Laksmi Dewi, Putu, dan Yusli Mariadi. 2021. 19 *Valid Jurnal Ilmiah Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) untuk Pengelolaan Keuangan*.
- Ayuningsih, Listiya, M. Cholid Mawardi, dan Arista Fauzi Kartika Sari. 2022. "Pengaruh Implementasi Sistem Manajemen Daerah (SIMDA), Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang." *E-Jra* 11(04).
- Azzindani, Rahmatia, dan Dan M Irwan. 2020. 3 *Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan Pengaruh Implementasi SIMDA dan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dimediasi Good Government Governance*. www.bpkp.go.id.
- Belzile, Bertrand. 2017. "Essentials of Management, par Joseph L. Massie, Prentice-Hall, Inc. Englewood Cliffs, N.J., 1964, 180 pages." *Relations industrielles* 19(3).
- Damayanti, Evi, dan Suwardi Bambang Hermanto. 2018. "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pemerintah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya." *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* Volume 7 N: 1–21.
- Defana, Fernanda Alivia, dan Sri Rahayu. 2023. "Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal, Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021)." *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis* 11(1).
- Diana, Patricia, Chermian Eforis, dan Maria Stefani Osesoga. 2019. "Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan." *ULTIMA Accounting* 10(2).
- Difaul Khaq, Mukhamad Iqom. 2022. "Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Dalam Rangka Kunjungan Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah." *Jurnal Lex Renaissance* 7(2).
- Dinyvia Pramesti, Apriianggita, dan Andri Widiyanto. 2020. "Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah Pada Dinas Kesehatan Kota Tegal." *Jurnal Riset Terapan Akuntansi* Vol.4 No.: 130–36.
- Edowati, Mikael, Herminawati Abubakar, dan Miah Said. 2021. "Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai." *Indonesian Journal of Business and Management* 4(1).

- Elkha, Fatima, dan Wahidawati. 2020. “Pengaruh Pengendalian Internal, Akuntabilitas, dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.” *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 9(3).
- Erawati, T, dan A S Hamanay. 2022. “Pengaruh Sistem Keuangan Desa, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa.” *Jurnal Akuntansi*.
- Fien Hapsari Somad, Naz’aina, dan Muammar Khaddafi . Razif. 2023. “Pengaruh Penyajian, Aksebilitas Dan Transparansi Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan SKPD Pada Pemerintah Kota Lhokseumawe.” *Jurnal Akuntansi Malikussaleh* Volume 2,: 202–22.
- Firman, Dody. 2018. “Analisis pengaruh pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja keuangan pemerintah.” *Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan* 2(3).
- Gustyari, Wahyu et al. 2022. “Analisis Kesuksesan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Berdasarkan Model DELONE dan MCLEAN 2003 (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Langsa).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)* 7(1): 1.
- Hadiachandra, A. 2021. “Pengaruh Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah terhadap Efektivitas Kerja Bendahara di Kota Tasikmalaya.” *Literacy: Jurnal Ilmiah Sosial*.
- Hasannudin, I M. 2018. “Analisis Implementasi Sistem Akuntansi Berbasis Akrual Dan Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA).” *Ejournal KAWASA*.
- Hendri, Meisy, dan Erinoss NR. 2020. “Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.” *JURNAL EKSPLORASI AKUNTANSI* 2(1): 2479–93.
- Ifdhal Adetya Rineldo,. S.AP, Afrianti, S.E,. M.Pd, Ardianto, Sos., M.Si. 2022. “Analisis Penerapan SIMDA dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas pada BPKPD Kabupaten Kerinci.” *JAN Maha* 4(5): 23–29.
- Kewas, Agnes MD, Herman Karamoy, dan Linda Lambey. 2019. “Analisis Kendala Pengimplementasian Pendapatan pada SIMDA Keuangan di Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.” *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING “GOODWILL”* 10(2).
- L, Lynda, Meinarni Asnawi, dan Bill J. C. Pangayow. 2019. “Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA), Kualitas Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Spip) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Daerah.” *Jurnal Akuntansi, Audit, dan Aset* 2(2).

- Laetitia, Maria, Boliina Kromen, Henny A Manafe, dan M E Perseveranda. 2023. “Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, dan Transparansi terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Keuangan Daerah).” *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* Vol. 4 No.(4): 460–68. <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.
- Meisy Hendri, Erinos NR. 2020. “Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada OPD Provinsi Sumatera Barat).” *JURNAL EKSPLOKASI AKUNTANSI* Vol.2(No. 1, Seri E): 2479–93.
- Merlyn Delly Rumondor, Jantje J. Tinangon, Heince R. N. Wokas. 2023. “Analisis Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Terhadap Pengelolaan Keuangan Dalam Pelaksanaan Belanja Daerah Pada Bkad Provinsi Sulawesi Utara.” *Riset Akuntansi dan Auditing “GOODWILL”* 14(1): 65–86.
- Nafidah, Lina Nasehatun, dan Nur Anisa. 2017. “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang.” *Akuntabilitas* 10(2).
- Nasution, Dito Aditia Darma. 2018. “Analisis Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah.” *Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan* 2(3).
- Nasution, Muhammad Irfan, dan Nurwani M.Si. 2021. “Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan.” *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 9(2): 109.
- Nurfadilah, Y, dan S Santoso. 2022. “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.” *Surakarta Accounting Review*.
- Nurhaeda, Andi, dan Andi Tenriola. 2022. “Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai.” *Tangible Journal* 7(2): 161–70.
- Prabadewi Apsari, Ida Ayu, dan Ida Bagus Putra Astika. 2020. “Pengaruh Kualitas Informasi, Kualitas Sistem Informasi, dan Perceived Usefulness pada Kepuasan Pengguna SIMDA.” *E-Jurnal Akuntansi* 30(3): 611.
- Purnama Sari Harahap, Tri Jatmiko Wahyu Prabowo. 2023. “Analisis Kualitas Pengungkapan Laporan Keuangan pada Website Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018-2021).” *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING* Vol. 12(Nomor 2): 1–11.

- Puspitaningrum, Sinta, dan Mahirun Mahirun. 2021. "Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA), Kualitas Sumber Daya Manusia, Dan Dukungan Manajemen Puncak Terhadap Kualitas Laporan Keuangan." *Pena Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi* 35(1).
- Rachmawati, Desy Ika, Desi Yuniarti, dan Darnah Andi Nohe. 2015. "Model Regresi Variabel dengan Metode Selisih Mutlak Moderating Variable Regression Model with an Absolute Difference Method." *Jurnal EKSPONENSIAL* 6(2): 187–92.
- Rahayu, S, dan A D Kanita. 2023. "Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas" *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah ...* 11(1).
- Rakhmawati, Intan. 2022. "Analisa SIMDA-NEXT GENERATION (SIMDA-NG)." *Jurnal Aplikasi Akuntansi* 7(1): 157–70.
- Ramadhani, Annisa. 2019. Universitas Muhammdiyah Palembang "Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Oku Timur."
- Rizka S, Anggie, Zamzami Zamzami, dan Muhammad Gowon. 2021. "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Kesuksesan Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagai Variabel Intervening." *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja* 6(3).
- Saputri, Novi Ria, dan Iwan Setya Putra. 2021. "Analisis Implementasi SIMDA Keuangan dengan Menggunakan Cobit untuk Melihat Efektivitas Penggunaan Teknologi Informasi di Pemerintah Kabupaten Blitar." *RISTANSI: Riset Akuntansi* 1(1).
- Silfiani, Santi, dan Nasyiah Hasanah Purnomowati. 2021. "Efektivitas Pelaporan Keuangan Sebelum dan Sesudah Implementasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA Keuangan) Pemerintah Daerah." *Jurnal Akuntansi dan Bisnis* 21(2).
- Sudrajat, Arip Rahman. 2021. "Akuntabilitas dan Transparansi Publik Bagaimana Pengaruh Terhadap Kinerja Satuan Perangkat Daerah di Kabupaten Sumedang." *Jurnal Education and development* 9(4).
- Sujanadi, Arifuddin, dan Sumardi. 2021. "Analysis of the Effect of Regional Financial Management, Accountability and Transparency and Organizational Culture as Moderating Variables on Financial Performance of Mamuju Regency." *Quest Journals Journal of Research in Business and Management* 9(8): 71–79. www.questjournals.org.
- Sulistiawan, Anggit, Budi Ispriyarso, dan Aprista Ristyawati. 2019. "Bentuk dan

Mekanisme Perencanaan Keuangan Daerah yang Partisipatif Guna Mewujudkan Akuntabilitas Publik.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1(2).

Susanti, Aprilia Dwi. 2022. “Perspektif Hukum Keuangan Negara Terhadap Mekanisme Pertanggungjawaban Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.” *El-Dusturie* 1(2): 1–16.

Susanti, Evi Yuli, Farah Nur Fauziah, dan Nur’aini. 2021. “Fraud Triangle Theory dan Kualitas Pengelolaan Keuangan dengan Moderasi Sistem Pengendalian Internal.” *Jurnal Akuntansi* 1(1).

Syarifuddin, Dastrianti. 2020. “Analisis Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Di Pemerintah Kabupaten Sarmi.” *KEUDA (Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah)* 5(2).

Tampang, Elisabeth et al. 2022. “Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara.” *Jurnal LPPM Bidak EkoSusBudKum* 6(1).

Thahir, T, dan M Mariati. 2022. “Strategi Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan yang akan Meminta Pertanggungjawaban.” *JAMDI (Jurnal Akuntansi Multi Dimensi)*.

Ubaidillah, Moh. 2019. “Pengaruh Tata Kelola Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dengan Profesionalisme Sdm Dan Integritas Sebagai Variabel Intervening.” *JIFA (Journal of Islamic Finance and Accounting)* 2(1).

Ulya, C, dan E B Astuti. 2020. “Analisis Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Daerah terhadap Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (Studi pada Badan Pengelola Keuangan dan” *AKSES: Jurnal Ekonomi dan*

Wanti, Intan Shinta, dan Ghina Fitri Ariesta Susilo. 2020. “Analisis Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kabupaten Magelang.” *Accounting Global Journal* 4(2).

Wijaya, Felisitas M., Jenny Morasa, dan Victorina Z. Tirayoh. 2022. “Analisis pelaksanaan sistem penatausahaan dan pertanggungjawaban Bendahara di Kantor Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa.” *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)* 5(2).

Witra Maison, Herlin Tasmir Vitalia. 2020. “Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Dukungan Manajemen Puncak Sebagai Variabel Moderating.” *Jurnal Advanced* 14 No. 2 T: 42–67.

Yanto, E, dan M Afkir. 2020. “Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen

Keuangan Daerah (SIMDA Keuangan) Dalam Pengolahan Data Keuangan Pada Organisasi Pemerintah Daerah” *Indonesian Journal of Strategic Management*.

Yunita, Nissa,); Iqbal Noor, dan Acep Suherman. 2023. “The Effect of the Implementation of Regional Financial Management Information System (SIMDA) and Human Resource Competence on the Quality of Financial Reports (Case Study On Regional Work Units In Sukabumi Regency) Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Mana.” *Journal of Management, Economic, and Accounting* 2(2): 201–12.

Zeny Antika, Yunika Murdayanti, dan Hafifah Nasution. 2020. “Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan, dan Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.” *Jurnal Wahana Akuntansi* 15(2): 212–32.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia. (2003). Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. In *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286* (Vol. 49, Nomor 0).

Undang - Undang Republik Indonesia. (2004). UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. In *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355* (Vol. 1964, Nomor 1).

Undang-Undang Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. In *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400* (Vol. 53).

Undang-undang Republik Indonesia. (2004). UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. In *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438*.

Undang-Undang Republik Indonesia. (2008). Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 2008 Mengenai Keterbukaan Informasi Publik. In *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846, LN.2008/NO.61, TLN NO.4846, LL SETNEG : 35 HLM* (Nomor May).

Undang-undang Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. In *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

Undang-Undang Republik Indonesia. (2022). Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah. In *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757* (Nomor 104172).

Peraturan Menteri Dalam Negeri. (2008). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah* (hal. 282).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2000). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. In *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022* (Nomor 1995, hal. 662).

Pemerintah Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. In *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322*.

WEB PAGE

Suseno Bimo. (2021). *Model Moderator dengan Uji Selisih Mutlak*. MS Stat : 06 Mei 2021. <http://www.statistikolahdata.com/2021/05/model-moderator-dengan-uji-selisih.html>

Syafdillah. (2012). *Uji Nilai Selisih Mutlak*. Blog Personal tentang tips Belajar : 12 Juni 2012. <https://blogtutorialspss.blogspot.com/2012/06/uji-nilai-selisih-mutlak.html>

LAMPIRAN

KUESIONER

IDENTITAS RESPONDEN

-  Nama Lengkap : _____
-  Email : _____
-  Usia : 20-25
 26-31
 32-37
 > 37
-  Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Perempuan
-  Pendidikan Terakhir : S2
 S1
 Diploma
 SMA
-  Pekerjaan : PNS
-  Instansi (OPD) :
-  Jabatan pengelola keuangan : Kepala subbagian keuangan dan perencanaan (PPK)
 Bendahara Penerimaan

 Masa Kerja

O Bendahara Pengeluaran

O staf subbagian keuangan dan akuntansi

: < 5 tahun

5 – 10 tahun

> 10 tahun

PETUNJUK PENGISIAN

Perkenalkan nama saya Valeria Flora Seran, SE Mahasiswi Magister Akuntansi STIE YKPN Yogyakarta. Saat ini saya sedang melakukan penelitian untuk tugas akhir (tesis) saya. Dalam rangka penelitian berkaitan dengan keuangan daerah, mohon Bapak/Ibu/Saudara/i berkenan meluangkan waktu mengisi kuesioner sesuai dengan situasi dan kondisi yang sedang dialami.

Saya sangat menghargai kejujuran dalam pengisian kuesioner ini. Semua jawaban kuesioner adalah benar dan akan digunakan semata-mata hanya untuk kepentingan penelitian. Peneliti menjamin privasi dan kerahasiaan data/informasi yang diberikan. Jawaban akan diundi, bagi 3 responden yang beruntung akan mendapatkan saldo E-wallet. Terima kasih atas partisipasinya.

Berikut link Kuesioner yang dapat diakses:

Link: [https://bit.ly/Tesis Valeria](https://bit.ly/Tesis%20Valeria)

Keterangan:

STS	Sangat Tidak Setuju
TS	Tidak Setuju
C	Netral
S	Setuju
SS	Sangat Setuju

LEMBAR KUESIONER

Financial Accountability

Pertanggungjawaban keuangan daerah (*Financial Accountability*) dilakukan secara tertib, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab (Sujanadi, 2021)

No.	Pertanyaan	STS	TS	C	S	SS
1	Pertanggungjawaban keuangan sudah dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku					
2	Keberlangsungan keuangan dapat diketahui berdasarkan pertanggungjawaban keuangan					
3	Mampu menyusun laporan pertanggungjawaban secara lengkap					
4	Mampu menyelesaikan laporan pertanggungjawaban tepat waktu					
5	Menyajikan laporan pertanggungjawaban dengan jujur sesuai dengan anggaran yang dicairkan					
6	Pertanggungjawaban keuangan sudah sesuai dengan kode rekening yang sudah ditentukan					
7	Pengolahan data transaksi kwitansi penerimaan dan pengeluaran dilakukan dengan benar					
8	Informasi yang dihasilkan dari laporan pertanggungjawaban bebas dari kesalahan					
9	Laporan pertanggungjawaban digunakan dan dapat dijadikan sebagai bahan untuk evaluasi anggaran					

Indikator: Tertib, efisien, transparan, tanggungjawab (Sujanadi, 2021); transaksi pencatatan, kode rekening (Fien Hapsari Somad, 2023)

Accountability

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban yang telah ditetapkan sebelumnya melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilakukan secara berkala (Andi Nurhaedah, 2022)

No.	Pertanyaan	STS	TS	C	S	SS
1	Pelaksanaan kebijakan dipertanggungjawabkan pemerintah daerah kepada DPRD dan					

	masyarakat.					
2	Anggaran yang dirancang dan ditetapkan pemerintah daerah bersama DPRD sesuai dengan realisasinya serta kepentingan publik.					
3	Program-program dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan anggaran masyarakat untuk mendapatkan hasil yang optimal					
4	Anggaran yang sudah ditetapkan dan direalisasi pada unit melibatkan seluruh unsur dalam setiap unit tersebut					
5	Penggunaan dana anggaran didasarkan atas hukum dan peraturan yang berlaku.					
6	Pelaksanaan program-program dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.					
7	Dilakukan analisis keuangan setiap kegiatan atau program selesai dilaksanakan.					
8	Pimpinan dan pegawai mempertanggungjawabkan (<i>accountable</i>) hasil dari suatu program/ kegiatan/ proyek yang telah dilakukan					
9	Pimpinan dan pegawai selalu terlibat bersama-sama dalam mengevaluasi hasil suatu program/ kegiatan/ proyek.					

Indikator: Akuntabilitas harus dibangun berdasarkan sistem informasi yang handal, untuk menjamin keabsahan (Nasution, Analisis pengaruh pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja keuangan pemerintah, 2018) Sistem informasi akuntansi wajib digunakan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintahan (Gowon, Rizka , 2021).

Transparency

Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintah, lembaga-lembaga dan informasi perlu diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau (Adelia Asensia, 2020).

No.	Pertanyaan	STS	TS	C	S	SS
1	Dokumen mengenai pengelolaan keuangan bisa didapatkan dengan mudah.					
2	Meningkatkan transparansi dengan melakukan pengumuman terkait pengelolaan keuangan					

	secara berkala					
3	Pengelolaan keuangan dilakukan secara ekonomis agar terhindar dari pemborosan dan tidak produktif					
4	Masyarakat mengetahui mengenai APBD					
5	Masyarakat mudah untuk mendapatkan informasi keuangan di pemerintah daerah					
6	Laporan Keuangan dibuat sesuai SAP yang terdiri dari LRA, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan					
7	Laporan Keuangan disampaikan oleh kepala daerah kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan					
8	Laporan Keuangan SKPD direview oleh inspektorat sebelum diserahkan kepada BPK					
9	Laporan Keuangan dan Laporan hasil audit BPK dipublikasikan di website resmi Pemerintah Daerah					

Indikator: Ketersediaan dokumen, Kejelasan dan kelengkapan informasi, Keterbukaan proses menjamin transparansi. (Elkha & Wahidawati, 2020).

Finance Management

Pengelolaan keuangan daerah adalah seluruh kegiatan berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah (Maria Laetitia Boliina Kromen, 2023).

No.	Pertanyaan	STS	TS	C	S	SS
1	Kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD beserta lampirannya kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan bersama					
2	Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah daerah dikelola dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)					
3	Penerimaan daerah langsung disetor ke rekening kas umum daerah pada bank pemerintah yang dituju					
4	Entitas melakukan pelaporan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk					

	pertanggungjawaban					
5	Sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), entitas menyusun laporan keuangan					
6	Seluruh elemen dalam instansi telah memenuhi syarat kejujuran dan integritas dalam bekerja					
7	Instansi melakukan evaluasi kinerja yang terkait dengan pengelolaan keuangan					
8	Terdapat pengawasan secara teratur oleh badan pengawas daerah atau inspektorat daerah.					

Indikator: perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah (Putu Ayu Puji Laksmi Dewi, 2021)

Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) *Financial Management Information System* (FMIS)

Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) merupakan program aplikasi keuangan daerah yang telah mengintegrasikan empat tahapan penyelenggaraan keuangan daerah yaitu, penganggaran, perubahan anggaran, penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban (Yudha Herlambang Cahya Pratama, 2022).

No.	Pertanyaan	STS	TS	C	S	SS
1	Kualitas pemahaman masing-masing admin atau pegawai terkait detail fungsi aplikasi SIMDA keuangan					
2	Komputer yang dipakai untuk penginputan data memadai					
3	Tidak ada kendala pada komputer yang tersedia					
4	Adanya jaringan internet memudahkan dalam menjalankan aplikasi SIMDA Keuangan tersebut					
5	Kepuasan masing-masing admin dalam mengakses aplikasi SIMDA keuangan yang disebabkan oleh jaringan dan pengembangan aplikasi					
6	Jaringan internet yang sangat cepat dalam melakukan penginputan data keuangan					
7	Adanya pelatihan sebelumnya tentang bagaimana cara menjalankan aplikasi SIMDA Keuangan tersebut					

8	Pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan yang tepat waktu dengan aplikasi SIMDA Keuangan					
9	Pengembangan aplikasi SIMDA keuangan yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan					

Indikator: Pengetahuan terkait aplikasi SIMDA F-MIS. SIMDA sudah diperbarui menjadi Sistem Informasi Manajemen Daerah-Next Generation (selanjutnya disingkat SIMDA-NG) atau SIMDA Financial Management Information System (selanjutnya disingkat SIMDA FMIS). (Rakhmawati, ANALISA SIMDA-NEXT GENERATION (SIMDA-NG), 2022).

Variabel	Kategori	Frekuensi	Persentase
Usia	20 - 25	1	0.8%
	26 - 31	23	18.9%
	32 - 37	41	33.6%
	> 37	57	46.7%
Jenis Kelamin	Laki-Laki	60	49.2%
	Perempuan	62	50.8%
Pendidikan	S2	5	4.1%
	S1	88	72.1%
	D3	11	9.0%
	SMA	18	14.8%
Pekerjaan	Pegawai Negeri Sipil	122	100%
Masa Kerja	< 5 tahun	45	36.9%
	5 - 10 tahun	32	26.2%
	> 10 tahun	45	36.9%
Instansi/Lembaga	Inspektorat	2	1.6%
	Sekretariat DPRD	2	1.6%
	Bagian	14	11.5%
	Dinas	53	43.4%
	Satpol PP	2	1.6%
	RSPP	3	2.5%
	Badan	44	36.1%
	Kecamatan	2	1.6%
Jabatan	Kepala subbagian keuangan dan perencanaan (PPK)	32	26.2%
	Bendahara Penerimaan	30	24.6%
	Bendahara Pengeluaran	30	24.6%
	Staf subbagian keuangan dan akuntansi	30	24.6%

Pengujian Instrumen

1. Uji validitas

a. Total Pertanyaan FA memenuhi syarat Correlations

		Correlations									
		FA1	FA2	FA3	FA4	FA5	FA6	FA7	FA8	FA9	FA_TOTAL
FA1	Pearson Correlation	1	.397**	.308**	.351**	.409**	.386**	.340**	.383**	.409**	.558**
	Sig. (2-tailed)		.000	.001	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122
FA2	Pearson Correlation	.397**	1	.628**	.680**	.556**	.495**	.478**	.522**	.595**	.754**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122
FA3	Pearson Correlation	.308**	.628**	1	.693**	.658**	.541**	.546**	.451**	.548**	.760**
	Sig. (2-tailed)	.001	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122
FA4	Pearson Correlation	.351**	.680**	.693**	1	.636**	.621**	.524**	.569**	.581**	.800**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122

FA5	Pearson Correlation	.409**	.556**	.658**	.636**	1	.671**	.684**	.604**	.650**	.838**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000
	N	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122
FA6	Pearson Correlation	.386**	.495**	.541**	.621**	.671**	1	.751**	.731**	.600**	.828**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122
FA7	Pearson Correlation	.340**	.478**	.546**	.524**	.684**	.751**	1	.738**	.674**	.822**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122
FA8	Pearson Correlation	.383**	.522**	.451**	.569**	.604**	.731**	.738**	1	.741**	.826**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122
FA9	Pearson Correlation	.409**	.595**	.548**	.581**	.650**	.600**	.674**	.741**	1	.833**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000
	N	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122
FA_TOTAL	Pearson Correlation	.558**	.754**	.760**	.800**	.838**	.828**	.822**	.826**	.833**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

RELIABILITY

```

/VARIABLES=FA1 FA2 FA3 FA4 FA5 FA6 FA7 FA8 FA9
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL

```

```

/MODEL=ALPHA
/STATISTICS=CORR COV
/SUMMARY=TOTAL.

```

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	122	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	122	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.921	.920	9

b. Pertanyaan Total A

CORRELATIONS
 /VARIABLES=A_1 A_2 A_3 A_4 A_5 A_6 A_7 A_8 A_9 A_TOTAL
 /PRINT=TWOTAIL NOSIG
 /MISSING=PAIRWISE.

Correlations

		A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	A_6	A_7	A_8	A_9	A_TOTAL
A_1	Pearson Correlation	1	.671**	.648**	.530**	.438**	.505**	.408**	.419**	.372**	.698**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122
A_2	Pearson Correlation	.671**	1	.766**	.692**	.588**	.695**	.497**	.569**	.442**	.830**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122
A_3	Pearson Correlation	.648**	.766**	1	.691**	.677**	.654**	.607**	.578**	.476**	.854**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122
A_4	Pearson Correlation	.530**	.692**	.691**	1	.710**	.690**	.619**	.562**	.483**	.836**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122
A_5	Pearson Correlation	.438**	.588**	.677**	.710**	1	.707**	.685**	.593**	.470**	.819**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000
	N	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122
A_6	Pearson Correlation	.505**	.695**	.654**	.690**	.707**	1	.638**	.639**	.507**	.843**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000

	N	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122
A_7	Pearson Correlation	.408**	.497**	.607**	.619**	.685**	.638**	1	.659**	.666**	.803**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122
A_8	Pearson Correlation	.419**	.569**	.578**	.562**	.593**	.639**	.659**	1	.642**	.786**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122
A_9	Pearson Correlation	.372**	.442**	.476**	.483**	.470**	.507**	.666**	.642**	1	.699**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000
	N	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122
A_TOTAL	Pearson Correlation	.698**	.830**	.854**	.836**	.819**	.843**	.803**	.786**	.699**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.928	.928	9

c. Pertanyaan T

Correlations

		T_1	T_2	T_3	T_4	T_5	T_6	T_7	T_8	T_9	T_TOTAL
T_1	Pearson Correlation	1	.587**	.442**	.421**	.485**	.377**	.325**	.342**	.403**	.659**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122
T_2	Pearson Correlation	.587**	1	.678**	.722**	.639**	.636**	.350**	.421**	.281**	.797**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.002	.000
	N	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122
T_3	Pearson Correlation	.442**	.678**	1	.770**	.701**	.524**	.308**	.262**	.149	.720**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.001	.004	.102	.000
	N	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122
T_4	Pearson Correlation	.421**	.722**	.770**	1	.755**	.679**	.406**	.453**	.258**	.816**

	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.004	.000
	N	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122
T_5	Pearson Correlation	.485**	.639**	.701**	.755**	1	.611**	.406**	.399**	.315**	.792**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000
	N	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122
T_6	Pearson Correlation	.377**	.636**	.524**	.679**	.611**	1	.599**	.586**	.441**	.814**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122
T_7	Pearson Correlation	.325**	.350**	.308**	.406**	.406**	.599**	1	.721**	.645**	.712**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.001	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122
T_8	Pearson Correlation	.342**	.421**	.262**	.453**	.399**	.586**	.721**	1	.679**	.733**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.004	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122
T_9	Pearson Correlation	.403**	.281**	.149	.258**	.315**	.441**	.645**	.679**	1	.632**
	Sig. (2-tailed)	.000	.002	.102	.004	.000	.000	.000	.000		.000
	N	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122
T_TOTAL	Pearson Correlation	.659**	.797**	.720**	.816**	.792**	.814**	.712**	.733**	.632**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.897	.898	9

d. Pertanyaan FM

Correlations

		FM_1	FM_2	FM_3	FM_4	FM_5	FM_6	FM_7	FM_8	FM_TOTAL
FM_1	Pearson Correlation	1	.776**	.711**	.674**	.672**	.627**	.632**	.554**	.840**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	122	122	122	122	122	122	122	122	122
FM_2	Pearson Correlation	.776**	1	.749**	.724**	.692**	.680**	.612**	.522**	.857**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	122	122	122	122	122	122	122	122	122
FM_3	Pearson Correlation	.711**	.749**	1	.743**	.756**	.693**	.605**	.585**	.869**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	122	122	122	122	122	122	122	122	122

FM_4	Pearson Correlation	.674**	.724**	.743**	1	.729**	.686**	.579**	.578**	.847**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000
	N	122	122	122	122	122	122	122	122	122
FM_5	Pearson Correlation	.672**	.692**	.756**	.729**	1	.742**	.698**	.562**	.871**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	122	122	122	122	122	122	122	122	122
FM_6	Pearson Correlation	.627**	.680**	.693**	.686**	.742**	1	.684**	.625**	.856**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	122	122	122	122	122	122	122	122	122
FM_7	Pearson Correlation	.632**	.612**	.605**	.579**	.698**	.684**	1	.707**	.821**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	122	122	122	122	122	122	122	122	122
FM_8	Pearson Correlation	.554**	.522**	.585**	.578**	.562**	.625**	.707**	1	.761**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000
	N	122	122	122	122	122	122	122	122	122
FM_TOTAL	Pearson Correlation	.840**	.857**	.869**	.847**	.871**	.856**	.821**	.761**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	122	122	122	122	122	122	122	122	122

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.941	.941	8

e. Pertanyaan SMF

Correlations

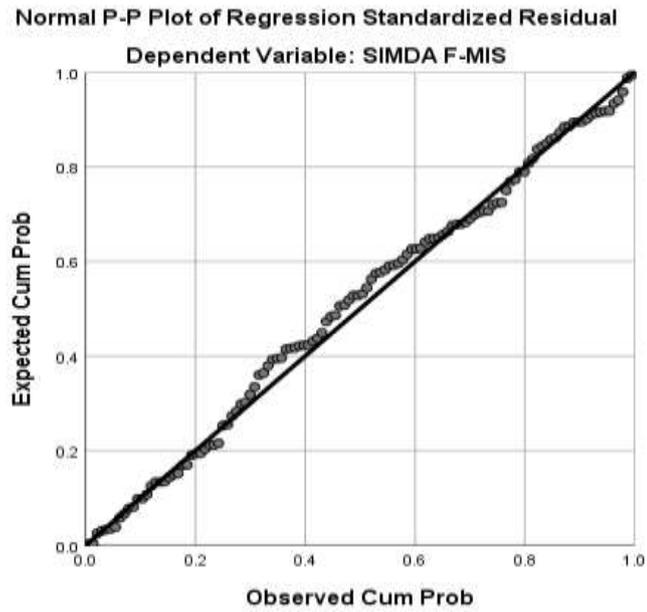
		SMF_1	SMF_2	SMF_3	SMF_4	SMF_5	SMF_6	SMF_7	SMF_8	SMF_9	SMF_TOTAL
SMF_1	Pearson Correlation	1	.715**	.644**	.575**	.496**	.448**	.384**	.465**	.341**	.717**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122
SMF_2	Pearson Correlation	.715**	1	.763**	.733**	.573**	.610**	.480**	.460**	.377**	.809**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122
SMF_3	Pearson Correlation	.644**	.763**	1	.785**	.694**	.616**	.602**	.548**	.489**	.868**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122
SMF_4	Pearson Correlation	.575**	.733**	.785**	1	.742**	.593**	.565**	.495**	.387**	.830**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122
SMF_5	Pearson Correlation	.496**	.573**	.694**	.742**	1	.668**	.630**	.546**	.482**	.820**
	Sig. (2-tailed)										
	N	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122

	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000
	N	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122
SMF_6	Pearson Correlation	.448**	.610**	.616**	.593**	.668**	1	.682**	.608**	.502**	.807**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122
SMF_7	Pearson Correlation	.384**	.480**	.602**	.565**	.630**	.682**	1	.740**	.628**	.799**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122
SMF_8	Pearson Correlation	.465**	.460**	.548**	.495**	.546**	.608**	.740**	1	.670**	.774**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122
SMF_9	Pearson Correlation	.341**	.377**	.489**	.387**	.482**	.502**	.628**	.670**	1	.680**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000
	N	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122
SMF_TOTAL	Pearson Correlation	.717**	.809**	.868**	.830**	.820**	.807**	.799**	.774**	.680**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.925	.924	9



One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

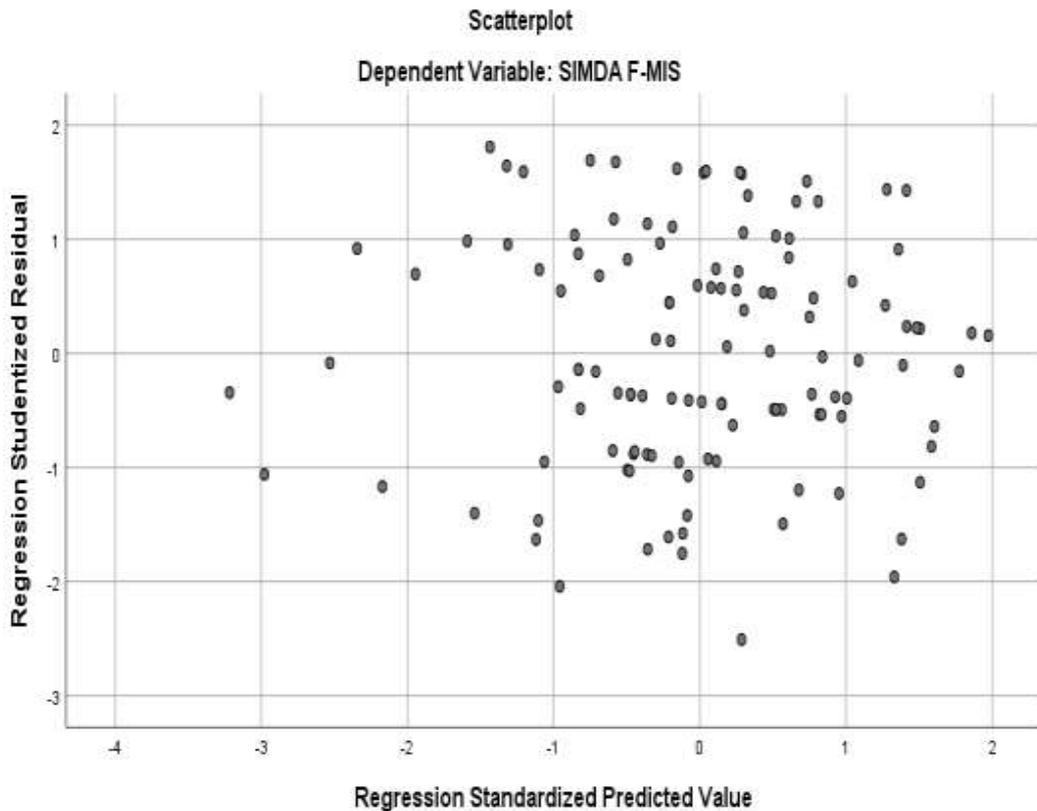
Unstandardized
Residual

N		122
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.88619041
Most Extreme Differences	Absolute	.055
	Positive	.037
	Negative	-.055
Test Statistic		.055
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Model		Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	38.311	0.174		220.609	0.000		
	Zscore: Financial Accountability (FA)	1.129	0.177	0.489	6.385	0.000	0.973	1.028
	Zscore: Accountability (A)	0.612	0.177	0.265	3.452	0.001	0.966	1.035
	Zscore: Transparency (T)	0.446	0.178	0.193	2.504	0.014	0.957	1.044
	Zscore: Finance Management (FM)	0.431	0.177	0.187	2.436	0.016	0.969	1.031

a. Dependent Variable: SIMDA F-MIS



Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	38.311	0.174		220.609	0.000		
	Zscore: Financial Accountability (FA)	1.129	0.177	0.489	6.385	0.000	0.973	1.028
	Zscore: Accountability (A)	0.612	0.177	0.265	3.452	0.001	0.966	1.035
	Zscore: Transparency (T)	0.446	0.178	0.193	2.504	0.014	0.957	1.044
	Zscore: Finance Management (FM)	0.431	0.177	0.187	2.436	0.016	0.969	1.031

a. Dependent Variable: SIMDA F-MIS

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	36.088	0.297		121.405	0.000
	Zscore: Financial Accountability (FA)	1.133	0.157	0.491	7.232	0.000
	Zscore: Accountability (A)	0.447	0.148	0.194	3.013	0.003
	Zscore: Transparency (T)	0.397	0.143	0.172	2.770	0.007
	Zscore: Finance Management (FM)	1.852	0.211	0.803	8.767	0.000
	Selisih Mutlak FA_FM	0.955	0.185	0.458	5.172	0.000
	Selisih Mutlak A_FM	0.568	0.202	0.226	2.809	0.006
	Selisih Mutlak T_FM	0.677	0.195	0.302	3.475	0.001

a. Dependent Variable: SIMDA F-MIS

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	392.676	7	56.097	25.429	.000 ^b
	Residual	251.488	114	2.206		
	Total	644.164	121			

a. Dependent Variable: SIMDA F-MIS

b. Predictors: (Constant), Selisih Mutlak T_FM, Zscore: T, Zscore: A, Zscore: FA, Selisih Mutlak A_FM, Selisih Mutlak FA_FM, Zscore: FM

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	36.088	0.297		121.405	0.000
	Zscore: Financial Accountability (FA)	1.133	0.157	0.491	7.232	0.000
	Zscore: Accountability (A)	0.447	0.148	0.194	3.013	0.003
	Zscore: Transparency (T)	0.397	0.143	0.172	2.770	0.007
	Zscore: Finance Management (FM)	1.852	0.211	0.803	8.767	0.000
	Selisih Mutlak FA_FM	0.955	0.185	0.458	5.172	0.000
	Selisih Mutlak A_FM	0.568	0.202	0.226	2.809	0.006
	Selisih Mutlak T_FM	0.677	0.195	0.302	3.475	0.001

a. Dependent Variable: SIMDA F-MIS

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.781 ^a	.610	.586	1.485

a. Predictors: (Constant), Selisih Mutlak T_FM, Zscore: T, Zscore: A, Zscore: FA, Selisih Mutlak A_FM, Selisih Mutlak FA_FM, Zscore: FM

<p>Pengaruh <i>Financial Accountability, Accountability and Transparency</i> serta <i>Finance Management</i> sebagai Variabel Moderasi terhadap Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) <i>Financial Management Information System (FMIS)</i> SIMDA F-MIS</p>	
<p>Valeria Flora Seran¹ Rusmawan Wahyu Anggoro²</p>	
<p>^{1,2,3,4}Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, Indonesia</p>	
<p>*Correspondences : rusmawan@stieykpn.ac.id</p>	
<p>ABSTRAK</p>	
<p>Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA F-MIS) mempunyai peran yang sangat penting bagi seluruh instansi pemerintahan di Indonesia untuk mempermudah dan memperlancar pengelolaan keuangan. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan peneliti menunjukkan bahwa adanya pengaruh <i>Financial Accountability, Accountability and Transparency</i> terhadap Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA F-MIS). Variabel moderasi yaitu <i>Finance Management</i> mampu memperkuat pengaruh antara <i>Financial Accountability, Accountability and Transparency</i> terhadap Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA F-MIS).</p>	
Kata Kunci:	<p><i>Financial Accountability, Accountability, Transparency, Finance Management, SIMDA-FMIS</i></p>
<p>Pengaruh <i>Financial Accountability, Accountability and Transparency</i> serta <i>Finance Management</i> sebagai Variabel Moderasi terhadap Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) <i>Financial Management Information System (FMIS)</i> SIMDA F-MIS</p>	
<p>ABSTRACT</p>	
<p><i>The Regional Management Information System (SIMDA F-MIS) has a very important role for all government agencies in Indonesia to facilitate and expedite financial management. Based on the test results that have been carried out by researchers, it shows that there is an influence of <i>Financial Accountability, Accountability and Transparency</i> on the Implementation of Regional Management Information Systems (SIMDA F-MIS). The moderating variable, namely <i>Finance Management</i>, is able to strengthen the influence between <i>Financial Accountability, Accountability and Transparency</i> on the Implementation of Regional Management Information Systems (SIMDA F-MIS).</i></p>	
Keywords:	<p><i>Financial Accountability, Accountability, Transparency, Finance Management, SIMDA-FMIS</i></p>
<p>Artikel dapat diakses : https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/index</p>	



e-ISSN 2302-8556

Vol. 32 No. 1
Denpasar, Januari 2022
Hal. 1-15

DOI:
10.24843/EJA.2022.v32.i01.pxx

PENGUTIPAN:
Amara, A. V., Agustina, I. K. R. & Wirasedana, P.W. (2022). Pengaruh Penerapan E-Filing pada Kepatuhan WPOP dengan Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Internet sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(1), 1- 15

RIWAYAT ARTIKEL:
Artikel Masuk:
(Diisi Tanggal Submit)
Artikel Diterima:
31 Desember 2021

PENDAHULUAN

Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 mengatur pengelolaan keuangan daerah yang menerangkan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud Keuangan Daerah ialah segala hak dan kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Pemerintahan Daerah yang bisa dinilai dengan uang serta semua bentuk kekayaan yang bisa dijadikan milik Daerah terkait hak dan kewajiban Daerah tersebut. Pasal 1 ayat 2 dalam Peraturan Pemerintah ini tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.

Meningkatnya globalisasi memunculkan persaingan pada masing-masing negara juga menuntut adanya persaingan setiap pemerintah daerah, dengan demikian daya saing pemerintah tersebut diharapkan dapat dicapai dengan meningkatkan kemandirian pemerintahan (Damayanti, 2018). Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah memberi wewenang luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur sumber pendanaan, penentuan tujuan dan arah hingga menetapkan target pemakaian anggaran. Namun demikian, masih terdapat kendala dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan di daerah yang perlu ditingkatkan.

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu yang sudah banyak diteliti, penerapan system informasi keuangan daerah dapat membantu pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan keuangan daerah (Dito, 2018). Faktor lainnya yang mempengaruhi implementasi sistem informasi keuangan daerah adalah pertanggungjawaban anggaran secara akuntabel dan transparansi (Fien, et.al., 2023).

Sesuai dengan hal-hal yang sudah dijelaskan tersebut, maka penelitian ini menambahkan manajemen keuangan (Finance Management) dalam model implementasi system informasi keuangan daerah. Manajemen Keuangan (Finance Management) mencakup seluruh kegiatan usaha yang berkaitan dengan bagaimana modal suatu perusahaan digunakan, dikumpulkan, dan dikelola untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Secara umum pengelolaan keuangan daerah dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu pengelolaan pendapatan daerah dan pengelolaan belanja daerah (Maria, et.al., 2023). Dalam hasil uji penelitian yang sudah dikemukakan Nasution (2018) yang menyimpulkan bahwa kinerja pemerintah harus maksimal dalam mempertanggungjawabkan anggaran daerah, agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel dengan menerapkan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). Dengan berbagai pendapat yang sudah disimpulkan, maka peneliti ingin melakukan penelitian tentang Sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) dengan menggunakan manajemen keuangan (Finance Management) sebagai variabel moderasi. Hal tersebut karena peneliti ingin melihat seberapa kuat hubungan Akuntabilitas Finansial (financial accountability) dapat mempengaruhi penerapan SIMDA.

SIMDA mempengaruhi kualitas atas laporan pertanggungjawaban keuangan secara efektif, akuntabel dan transparansi (Rahmatia & M.Irwan, 2020). Perubahan sistem akuntansi khususnya pada sektor publik terus mengalami perkembangan, peristiwa sektor publik di Indonesia ditandai semakin meningkatnya tuntutan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana publik (Inessa, 2018 dalam Adetya et.al., 2021:25). Untuk mendukung akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara, perlu dibuatkan pengembangan melalui kebijakan akuntansi pemerintah, seperti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Hal tersebut dapat diartikan pertanggungjawaban keuangan (financial accountability) daerah dilaksanakan secara sistematis, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab, dalam memperlancar kegiatan pertanggungjawaban badan pengawas keuangan dan pembangunan (BPKP) menerapkan SIMDA dalam organisasi tersebut tujuannya untuk memperlancar kegiatan pengelolaan keuangan. Pertanggungjawaban keuangan (financial accountability) merupakan tanggungjawab lembaga publik untuk menggunakan uang negara (uang publik) secara efektif, ekonomi dan efisien, tanpa pemborosan, kehilangan dana atau korupsi (Ubaidillah, 2019). Pertanggungjawaban keuangan merupakan akuntabilitas keuangan yang menggambarkan setiap transaksi moneter yang terjadi dalam suatu organisasi dicatat melalui sistem dan aturan atau suatu system untuk mencatat, mengklasifikasikan dan merangkum informasi untuk berbagai macam tujuan (Felisitas et.al., 2022).

Pertanggungjawaban keuangan (Financial Accountability) dengan efisien, tertib, efektif, bertanggungjawab dan transparan sesuai regulasi yang sudah ditetapkan. Laporan pertanggungjawaban bendahara ialah laporan yang dilakukan bendahara penerimaan/pengeluaran atas uang/surat berharga yang dikelola sebagai pertanggungjawaban pengelolaan uang. Penelitian yang dilakukan oleh Felisitas M. Wijaya, (2022) menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban keuangan (Financial Accountability) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerapan SIMDA Financial Management Information System (FMIS). Penelitian oleh Angraini, (2016) menyimpulkan pertanggungjawaban laporan keuangan daerah memegang peran krusial dalam menciptakan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang umum diterima dan memenuhi karakteristik kualitatif. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel perlu diterapkan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Penelitian ini diperkuat oleh Maria Laetitia Boliina Kromen, et.al. (2023) menyimpulkan bahwa Pengelolaan keuangan daerah mempengaruhi positif maupun krusial bagi kinerja keuangan daerah dalam mengimplementasikan sistem informasi akuntansi daerah. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan adalah:

H₁ : *Financial Accountability (FA)* berpengaruh terhadap Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) *Financial Management Information System (FMIS)*.

Akuntabilitas bisa terwujud apabila menerapkan SIMDA yang baru sesuai paradigma good governance. Salah satu dari sekian banyak Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik yang digunakan di organisasi pemerintahan adalah SIMDA. Sistem ini wajib digunakan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintahan (Gowon, Rizka, 2021). Penelitian ini diperkuat oleh Restu Agusti, et.al.(2021) akuntabilitas harus dibuat sesuai sistem informasi yang handal supaya terjamin objektivitas, keabsahan dan ketetapan waktu dalam menyampaikan informasi artinya akuntabilitas berpengaruh signifikan dan positif terhadap penerapan sistem akuntansi daerah. Dengan demikian hipotesis yang akan diuji adalah:

H₂ : Accountability (A) berpengaruh terhadap Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Financial Management Information System (FMIS).

Transparansi menekankan bahwa segala administrasi keuangan dilakukan secara terbuka, baik dalam informasi pencatatan maupun dalam mengelola anggaran. Penelitian yang dilakukan oleh Dito Aditia Darma Nasution, (2018) menyimpulkan bahwa variabel transparansi terhadap Kinerja Pemerintah dalam menerapkan SIMDA menunjukkan adanya pengaruh signifikan. Penelitian yang dilakukan oleh Elkha dan Wahidawati, (2020) memperlihatkan pengaruh positif terhadap kinerja Pemda di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Gresik dapat ditemukan melalui penerapan pengendalian internal, akuntabilitas pengelolaan keuangan, dan transparansi pengelolaan keuangan. Selanjutnya Edowati, et.al.(2021) menyebutkan akuntabilitas dan transparansi mempengaruhi secara langsung terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Deiyai. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dito Aditia Darma Nasution, (2018) ini selaras dengan penelitiannya Edowati, et.al. (2021) dan Elkha dan Wahidawati, (2020) yang menyimpulkan transparansi mempengaruhi kinerja keuangan Pemda. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan yaitu:

H₃ : Transparency (T) berpengaruh terhadap Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Financial Management Information System (FMIS).

Pemerintahan harus mampu mengontrol dan mengelola APBD dengan efisien, tertib, efektif, transparan dan bertanggungjawab sesuai regulasi, dengan cara melakukan manajemen keuangan (Finance Management) tujuannya untuk penggunaan dana dan pengalokasian dana sesuai dengan pos rekening yang telah direncanakan. Penelitian yang dilakukan oleh Maria Laetitia Boliina Kromen, et.al. (2023) menyimpulkan bahwa Manajemen keuangan daerah berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap Penerapan SIMDA Financial Management Information System (FMIS). Penelitian yang dilakukan oleh Andi Nurhaedah, et.al.(2022) menyimpulkan pengelolaan manajemen keuangan daerah mempengaruhi kinerja pemerintah dalam menerapkan sistem informasi akuntansi daerah secara positif dan signifikan. Sehingga hipotesis yang diajukan yaitu:

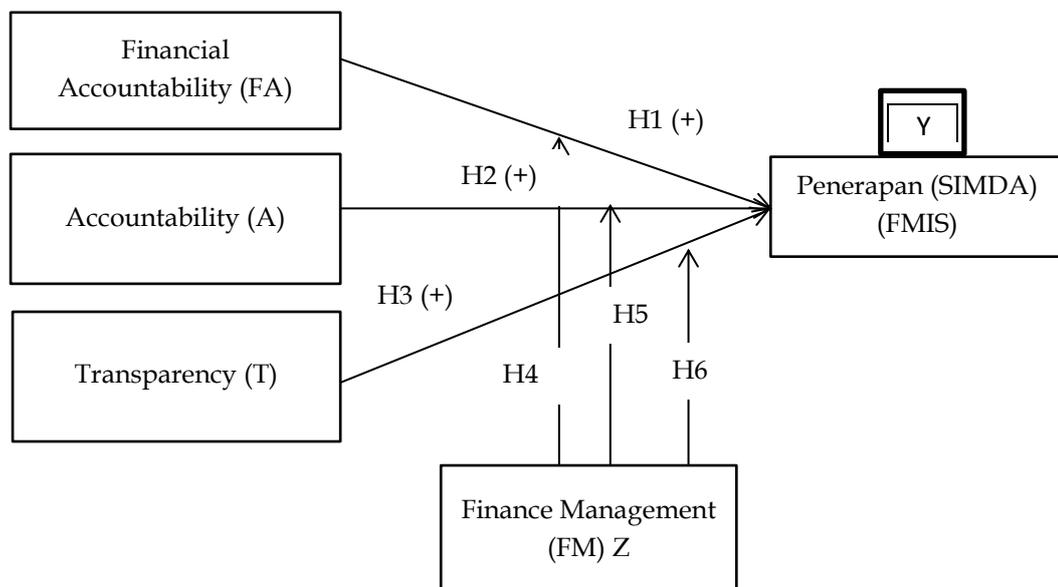
H₄ : Finance Management (FM) memperkuat pengaruh antara Financial Accountability (FA) terhadap Penerapan (SIMDA) Financial Management Information System (FMIS).

Menurut Rahmatia Azzindani, et. al.(2020) manajemen keuangan (Finance Management) semua aktifitas perusahaan terkait cara penggunaan, memperoleh, dan pengelolaan dana perusahaan dalam mencapai target dan tujuan perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Sujanadi, et. al.(2021) menyimpulkan bahwa Manajemen keuangan daerah mampu memperkuat hubungan akuntabilitas dan berpengaruh secara signifikan terhadap Penerapan SIMDA Financial Management Information System (FMIS). Penelitian yang dilakukan oleh Silvester Saman, et.al.(2020) menyimpulkan Akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Sistem Akuntansi keuangan Daerah. Sehingga hipotesis yang diajukan yaitu:

H5: Finance Management (FM) memperkuat pengaruh antara Accountability (A) terhadap Penerapan (SIMDA) Financial Management Information System (FMIS).

Menurut Fien Hapsari Somad, et. al. (2023) manajemen keuangan (Finance Management) yang dilakukan sesuai prinsip keterbukaan tanpa disembunyikan, ditutup-tutupi, atau ditunda-pengungkapannya telah menerapkan sistem akuntansi secara transparansi. Penelitian yang dilakukan oleh Asensia, et. al. (2022) menyimpulkan Akuntabilitas dan transparansi mempengaruhi Sistem Akuntansi keuangan Daerah secara positif dan signifikan. Penelitian dari Witra Maison, et.al.(2020) menyimpulkan SIMDA secara parsial mempengaruhi langsung pada kualitas laporan keuangan dan Dukungan Manajemen keuangan mampu memoderasi pengaruh Implementasi SIMDA terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Sehingga hipotesis yang diajukan yaitu:

H6: Finance Management (FM) memperkuat pengaruh antara Accountability (A) terhadap Penerapan (SIMDA) Financial Management Information System (FMIS).



Gambar 1. Model Penelitian

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif pada penelitian ini memiliki tujuan menguji teori, membuat fakta, menunjukkan pengaruh atau perbandingan, serta memberikan dan menafsir deskripsi statistik dengan meramal hasilnya. Penelitian yang diteliti menggunakan data primer dengan metode survei melalui kuesioner. Penelitian ini memakai responden pegawai negeri sipil (PNS) yang penempatannya tidak dibatasi wilayah. Sampel pada penelitian ditujukan pada pegawai negeri sipil (PNS) yang mengakses Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Financial Management Information System (FMIS) SIMDA F-MIS. Pada kuesioner, penelitian menggunakan pengukuran skala *likert* dengan kriteria penilaian skor 1 untuk pendapat sangat tidak setuju hingga 5 untuk pendapat sangat setuju.

Beberapa variabel yang digunakan antara lain variabel eksogen, variabel endogen, dan variabel moderasi. Variabel eksogen penelitian ini adalah Financial Accountability, Accountability and Transparency. Variabel endogen penelitian ini adalah Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA F-MIS). Variabel moderasi penelitian ini adalah Finance Management.

Definisi operasional dalam variabel financial accountability adalah Pertanggungjawaban keuangan (*Financial Accountability*) secara efisien, tertib, efektif, transparan dan bertanggungjawab sesuai regulasi yang sudah ditetapkan. *Financial Accountability* dalam penelitian ini memiliki indikator dengan penambahan berupa laporan pertanggungjawaban bendahara yaitu laporan dari bendahara penerimaan/pengeluaran atas uang/surat berharga untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan uang (Felisitas, 2022). Variabel *Accountability* memiliki beberapa indikator dengan penambahan seperti meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintahan (Gowon & Rizka, 2021). Variabel *Transparency* dapat diukur dengan indikator berupa informasi yang terbuka, jelas, tepat waktu dan bisa dibandingkan (Elkha & Wahidawati, 2020). Variabel *Finance Management* menggunakan beberapa indikator dengan penambahan berupa penganggaran, perencanaan keuangan, pengelolaan kas, pengelolaan investasi, pembiayaan, pengendalian biaya, dan analisis kinerja keuangan (Andi & Tenriola, 2022). Variabel Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA F-MIS) menggunakan beberapa indikator dengan penambahan antara lain kualitas pemahaman masing-masing admin atau pegawai terkait mendetail fungsi aplikasi SIMDA keuangan, ketersediaan sarana dan prasarana computer, jaringan internet, pelatihan aplikasi (Adelia, et. al.2020).

Proses menganalisis data akan diawali dengan uji statistik deskriptif, kemudian uji validitas dan reliabilitas untuk mengetahui seberapa valid dan konsisten item pernyataan pada setiap variabel. Setelah dikatakan valid dan reliabel maka lanjut uji asumsi klasik dengan uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Lalu dilanjutkan melakukan uji hipotesis regresi linear berganda dan analisis regresi moderasi dengan persamaan seperti berikut.

$$SMF = \alpha + \beta_1 FA + \beta_2 A + \beta_3 T + \epsilon$$

Keterangan:

SMF = Penerapan (SIMDA) Financial Management Information System (FMIS)

α = konstanta

FA = Financial Accountability
 A = Accountability
 T = Transparency
 $\beta_1 - \beta_3$ = Koefisien regresi berganda
 e = error

$$Y = \alpha + \beta_1 FA + \beta_2 A + \beta_3 T + \beta_4 |X1 - X2| + \dots + \varepsilon$$

Keterangan:

SMF = Penerapan (SIMDA) Financial Management Information System (FMIS)

α = Konstanta

Zscore: FA = Financial Accountability

Zscore: A = Accountability

Zscore: T = Transparency

Zscore: FM = Finance Management

$AbsZFA_FM | FA-FM |$ = Interaksi yang diukur dengan nilai absolute perbedaan antara FA dan FM (nilai mutlak dari selisih antara FA dan FM dan seterusnya)

$\beta_1 - \beta_4$ = Koefisien regresi berganda

ε = error

Setelah menguji analisis regresi linear berganda dan moderasi, maka selanjutnya akan menguji koefisien determinasi untuk mengetahui pengukuran kemampuan model dalam menjelaskan variasi pada dependen. Menguji dengan uji F untuk melihat pengaruh seluruh variabel independen secara bersamaan. Selanjutnya mengukur dengan uji t untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel independen secara terpisah terhadap dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian menggunakan responden pegawai negeri sipil (PNS) yang tersebar diseluruh Indonesia dengan total responden yang telah terkumpul sebanyak 122 orang. Kuesioner dibagikan kepada responden dengan online melalui *google form*. Waktu dalam membagikan kuesioner mulai dari tanggal 23 dan 25 November 2023, kemudian mendapat jawaban dari responden kurang lebih selama 20 hari. Seluruh responden telah mengisi kuesioner secara benar dan lengkap. Responden dikelompokkan dengan karakteristik masing-masing seperti pada tabel berikut.

Tabel 1. Karakteristik Responden

Variabel	Kategori	Frekuensi	Persentase
Usia	20 - 25	1	0.8%
	26 - 31	23	18.9%
	32 - 37	41	33.6%
	> 37	57	46.7%
Jenis Kelamin	Laki-Laki	60	49.2%
	Perempuan	62	50.8%

Pendidikan	S2	5	4.1%
	S1	88	72.1%
	D3	11	9.0%
	SMA	18	14.8%
Pekerjaan	Pegawai Negeri Sipil	122	100%
Masa Kerja	< 5 tahun	45	36.9%
	5 - 10 tahun	32	26.2%
	> 10 tahun	45	36.9%
Instansi/Lembaga	Inspektorat	2	1.6%
	Sekretariat DPRD	2	1.6%
	Bagian	14	11.5%
	Dinas	53	43.4%
	Satpol PP	2	1.6%
	RSPP	3	2.5%
	Badan	44	36.1%
	Kecamatan	2	1.6%
Jabatan	Kepala subbagian keuangan dan perencanaan (PPK)	32	26.2%
	Bendahara Penerimaan	30	24.6%
	Bendahara Pengeluaran	30	24.6%
	Staf subbagian keuangan dan akuntansi	30	24.6%

Berdasarkan data yang sudah terkumpul, dapat dilihat bahwa total 122 responden terdapat jumlah dan persentase dari karakteristik masing-masing responden.

Terdapat hasil uji statistik deskriptif yang menampilkan nilai minimal, nilai maksimal, nilai rata-rata, dan nilai deviasi standar. Dalam menganalisa deskriptif, penelitian menggunakan aplikasi IBM SPSS Statistics 26 seperti tabel berikut.

Tabel 2. Statistik Deskriptif Penelitian

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Rata-rata	Deviasi Standar
FA	122	28	45	37,47	3,573
A	122	17	45	36,20	5,730
T	122	21	45	35,95	5,931
FM	122	20	40	36,66	4,704
SMF	122	28	40	38,31	2,307

Dalam tabel 2, nilai minimum pada pertanyaan setiap variabel sebesar 17 dan nilai maksimal untuk setiap pertanyaan sebesar 45. Variabel *Financial Accountability* diukur dengan instrumen laporan pertanggungjawaban bendahara yaitu laporan dari bendahara penerimaan/pengeluaran atas uang/surat berharga untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan uang. Rata-rata jawaban responden pada pertanyaan variabel tersebut adalah 37,47 dengan deviasi standar 3,573. Variabel *accountability* diukur instrumen meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintahan dengan rata-rata jawaban

responden mendekati skor 4 yaitu 36,20 dengan deviasi standar 5,730. Setiap pertanyaan dalam variabel *Transparency* dapat diukur dengan indikator berupa informasi yang terbuka, jelas, tepat waktu dan bisa dibandingkan. Responden menjawab dengan rata-rata 35,95 dan deviasi standar 5,931. Variabel *Finance Management* menggunakan beberapa indikator dengan penambahan berupa penganggaran, perencanaan keuangan, pengelolaan kas, dan analisis kinerja keuangan dengan rata-rata jawaban responden sebesar 36,66 dan deviasi standar 4,704. Variabel Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA F-MIS) menggunakan beberapa indikator dengan penambahan antara lain kualitas pemahaman masing-masing admin terkait mendetail fungsi aplikasi SIMDA keuangan, ketersediaan sarana dan prasarana computer, jaringan internet, pelatihan aplikasi dengan deviasi standar 2,307 dan rata-rata jawaban 38,31.

Setelah uji statistik deskriptif kemudian melakukan uji validitas untuk melihat korelasi antara setiap item dengan totalnya. Pengukuran dalam uji validitas dapat dikatakan valid bisa dilihat dari nilai signifikansi setiap item pernyataan kurang dari 0,05 dan sebaliknya item tidak valid jika nilai signifikansi melebihi 0,05. Selain itu, uji validitas juga bisa ditentukan dengan melihat *r* hitung dan *r* tabel. *R* tabel pada penelitian diketahui adalah 0,1779 yang nantinya akan dibandingkan dengan nilai *r* hitung pada tabel 3.

Tabel 3. Uji Validitas

Variabel	Item Pertanyaan	Nilai <i>r</i> hitung	Kesimpulan
<i>Financial Accountability (FA)</i>	FA1	.558**	Valid
	FA2	.754**	Valid
	FA3	.760**	Valid
	FA4	.800**	Valid
	FA5	.838**	Valid
	FA6	.828**	Valid
	FA7	.822**	Valid
	FA8	.826**	Valid
	FA9	.833**	Valid
<i>Accountability (A)</i>	A1	.698**	Valid
	A2	.830**	Valid
	A3	.854**	Valid
	A4	.836**	Valid
	A5	.819**	Valid
	A6	.843**	Valid
	A7	.803**	Valid
	A8	.786**	Valid
	A9	.699**	Valid
<i>Transparency (T)</i>	T1	.659**	Valid
	T2	.797**	Valid
	T3	.720**	Valid
	T4	.816**	Valid
	T5	.792**	Valid
	T6	.814**	Valid
	T7	.712**	Valid
	T8	.733**	Valid
	T9	.632**	Valid

<i>Finance Management (FM)</i>	FM1	.840**	Valid
	FM2	.857**	Valid
	FM3	.869**	Valid
	FM4	.847**	Valid
	FM5	.871**	Valid
	FM6	.856**	Valid
	FM7	.821**	Valid
	FM8	.761**	Valid
<i>SIMDA F-MIS (SMF)</i>	SMF1	.717**	Valid
	SMF2	.809**	Valid
	SMF3	.868**	Valid
	SMF4	.830**	Valid
	SMF5	.820**	Valid
	SMF6	.807**	Valid
	SMF7	.799**	Valid
	SMF8	.774**	Valid
	SMF9	.680**	Valid

Selanjutnya uji reliabilitas pada pertanyaan masing-masing variabel menggunakan pengukuran *Cronbach's Alpha*. Agar instrument dikatakan reliabilitas baik atau tinggi maka harus memperoleh hasil lebih dari 0,70 hingga 0,89 dan hasil lebih dari 0,90 maka dapat dikatakan reliabel sempurna.

Tabel 4. Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Kesimpulan
FA	0,921	Reliabel Sempurna
A	0,928	Reliabel Sempurna
T	0,897	Reliabel Tinggi
FM	0,941	Reliabel Sempurna
SMF	0,925	Reliabel Sempurna

Tabel 4 menunjukkan bahwa setiap item pertanyaan dalam masing-masing variabel memiliki hasil *Cronbach's Alpha* lebih dari 0,70 dan lebih dari 0,90. Hal ini mengartikan bahwa indikator dalam pertanyaan setiap variabel memiliki tingkat konsisten yang tinggi dan sempurna untuk pengukuran variabel. Data-data yang telah diuji kualitasnya dapat digunakan dalam pengujian selanjutnya.

Setelah dikatakan valid dan reliabilitas, maka melakukan uji asumsi klasik untuk mengetahui keakuratan koefisien regresi. Asumsi klasik akan dilakukan mulai dari uji normalitas, multikolinearitas, hingga heteroskedastisitas.

Tabel 5. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		122
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.88619041
Most Extreme Differences	Absolute	.055

	Positive	.037
	Negative	-.055
Test Statistic		.055
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

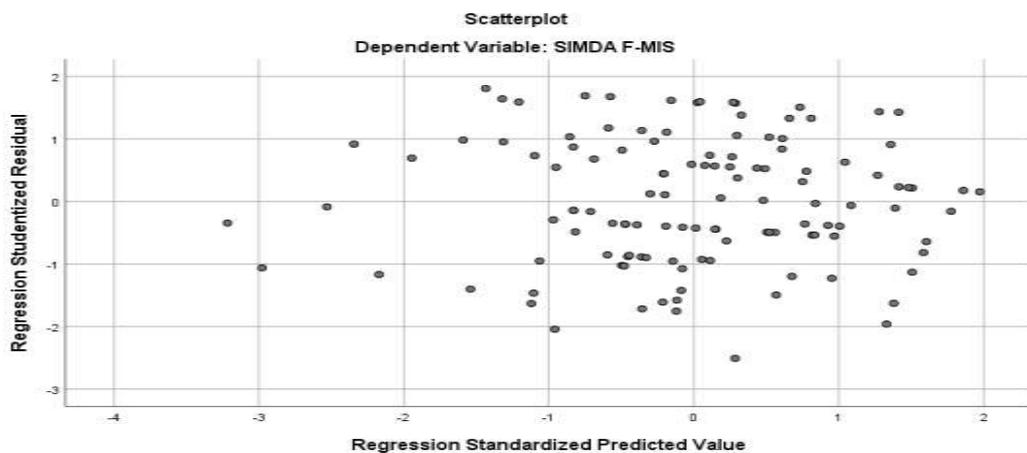
Tabel 5 merupakan ringkasan mengenai hasil uji normalitas. Pada tabel 5 menunjukkan bahwa Output di atas menunjukkan signifikansi Asymp.Sig. (2-tailed) sebesar 0,200 > 0,05 sehingga kesimpulannya adalah data untuk di uji dalam penelitian ini berdistribusi normal.

Tabel 6. Uji Multikolinearitas

Variabel	Statistik Kolinearitas	
	Tolerance	VIF
Zscore: Financial Accountability (FA)	0,973	1,028
Zscore: Accountability (A)	0,966	1,035
Zscore: Transparency (T)	0,957	1,044
Zscore: Finance Management (FM)	0,969	1,031

Berdasarkan tabel 6 menunjukkan ringkasan hasil uji multikolinearitas. Pada tabel tersebut menyatakan bahwa variabel penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas. Hal ini ditunjukkan dari hasil nilai *tolerance* lebih dari 0,1 sedangkan VIF kurang dari 10. Sehingga, dapat disimpulkan antar variabel penelitian ini bebas korelasi.

Tabel 7. Uji Heteroskedastisitas



Dari grafik scatterplot di atas, memperlihatkan titik-titik tersebar secara acak dan merata baik di atas maupun di bawah nilai 0 pada sumbu Y. Dengan demikian, kesimpulannya adalah tidak terdapat heteroskedastisitas pada model

regresi ini. Dengan demikian, dapat dianggap model regresi penelitian ini memenuhi syarat untuk dilanjutkan pada pengujian lebih lanjut.

Setelah melakukan ketiga uji asumsi klasik, maka selanjutnya akan memulai uji model yaitu uji F, koefisien determinasi, dan uji t. Pada tabel 8 dapat diketahui bahwa nilai konstanta 38.311 menunjukkan jika variabel bebas yaitu financial accountability, accountability, transparency, itu konstan atau tidak berubah maka penerapan SIMDA F-MIS bernilai positif.

Berdasarkan tabel 8 dan 9 yang menunjukkan hasil uji F, pada model 1 dengan signifikansi 0,000 dibawah 0,05. Hasil tersebut disimpulkan bahwa model penelitian baik berarti seluruh variabel (*Financial Accountability, Accountability and Transparency* dan *Finance Management*) mampu mempengaruhi variabel Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA F-MIS). Pada model 2, dengan signifikansi 0,000 yang disimpulkan model penelitian ini baik sehingga seluruh variabel independen (*Financial Accountability, Accountability and Transparency*) dengan variabel moderasi (*Finance Management*) mampu memprediksi variabel kepatuhan wajib pajak.

Pada tabel 8 dan 9 menunjukkan hasil *Adjusted R Square* nilai adjusted R² adalah 0,586 artinya variabel independen yaitu variabel Financial Accountability, Accountability, Transparency dan Finance Management sebagai variabel moderasi mempengaruhi variabel dependen yaitu Penerapan SIMDA Financial Management Information System sebesar 58,6% sedangkan 41,4% mendapat pengaruh faktor lainnya di luar model penelitian.

Hasil uji t pada tabel 8 variabel Financial Accountability (X1) sesuai hasil hitungan, maka diperoleh nilai t hitung 7.232 > dari t tabel 1.980 dan bernilai positif dengan hasil signifikan 0,000 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H1 diterima, dengan kata lain Financial Accountability berpengaruh positif terhadap Penerapan SIMDA Financial Management Information System (FMIS) karena nilai signifikansi di bawah 0,05. variabel Accountability (X2) sesuai hasil hitungan, maka diperoleh nilai t hitung 3.013 > dari t tabel 1.980 dan bernilai positif dengan hasil signifikan 0,003 < 0,05. Hal ini memperlihatkan H2 diterima, dengan kata lain Accountability berpengaruh positif terhadap Penerapan SIMDA Financial Management Information System (FMIS) karena nilai signifikansi di bawah 0,05. variabel Transparency (X3) sesuai hasil hitungan, maka diperoleh nilai t hitung 2.770 > dari t tabel 1.980 dan bernilai positif dengan hasil signifikan 0,007 < 0,05. Hal ini memperlihatkan H3 diterima, dengan kata lain Transparency berpengaruh positif terhadap Penerapan SIMDA Financial Management Information System (FMIS) karena nilai signifikansi di bawah 0,05. Variabel moderasi sesuai hasil hitungan, maka diperoleh nilai t hitung 5.172 > dari t tabel 1.980 dan bernilai positif dengan hasil signifikan 0,000 < 0,05. Hal ini memperlihatkan H4, H5, H6 diterima, dengan kata lain variabel moderasi selisih mutlak FA-FM, A-FM, T-FM mampu memoderasi dan berpengaruh signifikan terhadap Penerapan SIMDA Financial Management Information System (FMIS) karena nilai signifikansi di bawah 0,05.

Tabel 8. Hasil Regresi Linear Berganda

Model 1	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	38,311	0,174		6,385	0,000
Zscore:(FA)	1,129	0,177	0,489	3,452	0,001
Zscore:(A)	0,612	0,177	0,265	2,504	0,014
Zscore: (T)	0,446	0,178	0,193	6,385	0,000
Adjusted R Square	0,586				
Sig. F	0,000				

Tabel 9. Hasil Regresi Linear Moderasi

Model 2	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	36,088	0,297		121.405	0.000
Zscore:(FA)	1,133	0,157	0,491	7.232	0.000
Zscore:(A)	0,447	0,148	0,194	3.013	0.003
Zscore: (T)	0,397	0,143	0,172	2.770	0.007
Zscore:(FM)	1,852	0,211	0,803	8.767	0.000
FA-FM	0,955	0,185	0,458	5.172	0.000
A-FM	0,568	0,202	0,226	2.809	0.006
T-FM	0,677	0,195	0,302	3.475	0.001
Adjusted R Square	0,586				
Sig. F	0,000				

Hasil pengujian dengan IBM SPSS Statistics 26 menunjukkan signifikansi pada variabel *Financial Accountability* mempengaruhi Penerapan SIMDA *Financial Management Information System* secara positif signifikan karena tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan jika laporan pertanggungjawaban keuangan di lakukan dengan baik dan sesuai aturan maka akan meningkatkan proses kinerja SIMDA F-MIS keuangan. Dengan kata lain dijelaskan bahwa implementasi SIMDA F-MIS dapat membantu dan memperlancar dalam mepertanggungjawabkan anggaran yang sudah ditetapkan pada instansi pemerintahan di Indonesia. Pertanggungjawaban keuangan yang dilakukan oleh instansi pemerintahan membutuhkan suatu sistem keuangan yang akurat dan tingkat keabsahan yang tinggi guna menjamin suatu transaksi yang dilakukan dan memperoleh suatu laporan pertanggungjawaban yang akurat, efektif dan efisien. Pemerintah daerah pada tingkat kota/kabupaten sampai di tingkat pusat diwajibkan untuk memakai SIMDA dalam proses mengelola keuangan. Oleh

karena itu, dalam mewujudkan laporan pertanggungjawaban yang baik dan bernilai positif suatu instansi pemerintahan membutuhkan sistem akuntansi keuangan yang handal dan berdampak positif bagi organisasi. Pernyataan ini sejalan dengan penelitian Angraini, (2016) dan Felisitas M.Wijaya, (2022) yang menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban keuangan (*Financial Accountability*) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerapan Penerapan SIMDA *Financial Management Information System*.

Hipotesis kedua pada pengujian hipotesis menghasilkan nilai signifikansi variabel *accountability* mempengaruhi Penerapan SIMDA *Financial Management Information System* (FMIS) secara positif signifikan karena tingkat signifikansi $0,003 < 0,05$. Hal ini menjelaskan peranan laporan keuangan pemerintah sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah kepada publik atau masyarakat dan berguna untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta kepercayaan implementasi kebijakan publik oleh pemerintah supaya mencapai tujuan maka akan meningkatkan proses kinerja SIMDA F-MIS keuangan. Hasil ini di dukung penelitian Restu Agusti, et.al.(2021) dan Gowon, et.al.(2021) menyebutkan mewujudkan akuntabilitas harus berlandaskan kehandalan sistem informasi, supaya terjamin keabsahan, ketetapan waktu dan objektivitas penyampaian informasi artinya akuntabilitas berpengaruh signifikan dan positif terhadap penerapan sistem akuntansi daerah.

Hasil pengujian pada hipotesis ketiga yang menunjukkan variabel *transparency* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerapan SIMDA *Financial Management Information System* (FMIS) karena tingkat signifikansi ada 0,007 berada dibawah 0,05. Hal ini dapat dijelaskan jika suatu laporan dan dokumen sudah dilakukan dengan terbuka, baik dalam informasi pencatatan maupun dalam mengelola anggaran maka proses kinerja dalam menerapkan SIMDA F-MIS pada instansi pemerintahan di Indonesia telah berjalan baik dan lancar. Dengan demikian, disimpulkan bawa hipotesis ketiga terdukung. Adanya implementasi SIMDA F-MIS dapat membantu dan memperlancar pada instansi pemerintahan di Indonesia dalam mempertanggungjawabkan, melaporkan, dan mengemukakan semua kegiatan yang berhubungan dengan anggaran secara terbuka dan dipergunakan untuk memonitori dan bahan evaluasi hasil kinerja. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Dito (2018), Elkha et.al, (2020), Edowati et.al. (2021) akuntabilitas pengelolaan keuangan, pengendalian internal dan keterbukaan dalam mengelola keuangan memberikan dampak positif terhadap kinerja Pemda.

Hipotesis keempat yang menyatakan *finance management* memoderasi hubungan antara *Financial Accountability* dengan SIMDA F-MIS didukung. Nilai probabilitas $0,000 < 0,05$. Hal ini dapat dijelaskan jika suatu pemerintahan mampu mengontrol dan mengelola APBD secara tertib, dan tanggungjawab maka dapat dikatakan penerapan SIMDA F-MIS pada instansi pemerintahan di Indonesia telah sukses dan berjalan lancar. Dengan kata lain dikatakan bahwa implementasi SIMDA F-MIS dapat membantu dan memperlancar pengelolaan keuangan pada instansi pemerintahan di Indonesia, sehingga mempermudah dalam mempertanggungjawabkan anggaran yang sudah ditetapkan. Sehingga dapat dikatakan *finance management* berimplikasi positif dapat memperkuat

hubungan antara pertanggungjawaban keuangan dan Penerapan (SIMDA) Financial Management Information System (FMIS). Hasil ini selaras dengan penelitian Andi Nurhaedah, et.al.(2022) dan Laetitia Boliina, et.al. (2023) menyimpulkan pengelolaan manajemen keuangan daerah mempengaruhi kinerja pemerintah secara positif signifikan dalam menerapkan sistem informasi akuntansi daerah.

Pada hipotesis kelima hasil analisis regresi menunjukkan bahwa Finance Management (FM) mampu memoderasi dan memperkuat pengaruh positif antara Accountability (A) terhadap Penerapan (SIMDA) Financial Management Information System (FMIS) dengan nilai probabilitas $0,006 < 0,05$. Hal ini dapat dijelaskan jika Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dapat direncanakan, dilaksanakan, dipertanggungjawabkan kepada publik dan diawasi dengan baik dan tertib sesuai regulasi yang ditetapkan maka dapat dikatakan penerapan SIMDA F-MIS pada instansi pemerintahan di Indonesia telah sukses dan berjalan lancar. Dengan kata lain dikatakan bahwa implementasi SIMDA F-MIS pada instansi pemerintahan di Indonesia dapat membantu dan memperlancar segala kegiatan organisasi terkait cara menggunakan, memperoleh, dan mengelola anggaran dalam mencapai tujuan dan target tertentu. Sehingga dapat dikatakan finance management berimplikasi positif dapat memperkuat hubungan antara akuntabilitas keuangan dan Penerapan (SIMDA) Financial Management Information System (FMIS). Hal ini konsisten dengan penelitian Silvester Saman, et.al.(2020) dan Sujanadi, et. al.(2021) Manajemen keuangan daerah mampu memperkuat hubungan akuntabilitas dan berpengaruh secara signifikan terhadap SIMDA Financial Management Information System (FMIS) dan Akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Sistem Akuntansi keuangan Daerah.

Hasil uji untuk hipotesis keenam menunjukkan bahwa Finance Management (FM) mampu memoderasi dan memperkuat pengaruh positif antara transparency (T) terhadap Penerapan (SIMDA) Financial Management Information System (FMIS) dengan nilai probabilitas $0,001 < 0,05$ artinya jika transparansi dalam pengelolaan keuangan pada instansi pemerintahan di Indonesia telah dilaksanakan sesuai aturan yang ditetapkan maka dapat dikatakan penerapan SIMDA F-MIS pada instansi pemerintahan telah sukses, berjalan lancar dan dapat diandalkan. Dapat dijelaskan bahwa untuk mendorong adanya otonomi daerah dibutuhkan transparansi dalam menyusun laporan keuangan supaya menghindari sejumlah kecurangan ketika menyusun dan mengelola laporan keuangan selanjutnya transparansi laporan keuangan dimaksudkan untuk meningkatkan kredibilitas pemerintahan di mata publik. Sehingga dapat dikatakan finance management berimplikasi positif dapat memperkuat hubungan antara transparency keuangan dan Penerapan (SIMDA) Financial Management Information System (FMIS). Hal ini konsisten dengan penelitian Witra Maison, et.al.(2020), Asensia, et. al. (2022) dan Fien Hapsari Somad, et. al. (2023) menyimpulkan bahwa SIMDA secara parsial mempengaruhi signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dan Dukungan Manajemen keuangan dapat memoderasi pengaruh Implementasi SIMDA terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Hasil Penelitian yang mencerminkan hubungan positif dan signifikan antara variabel financial accountability, accountability, transparency dan Penerapan SIMDA Financial Management Information System (FMIS) bisa diketahui dari beberapa faktor yaitu kepatuhan terhadap aturan dan pertanggungjawaban keuangan, meningkatnya efektivitas pertanggungjawaban anggaran, efisiensi operasional, keandalan dan akuntabilitas sistem informasi, pentingnya keabsahan laporan, keterbukaan dalam informasi pencatatan, realisasi anggaran yang terbuka, monitoring dan evaluasi kinerja, akses mudah untuk pihak-pihak terkait, pertanggungjawaban yang diperkuat, kejelasan dalam pelaporan. Pernyataan tersebut menekankan pentingnya financial accountability, accountability, transparency dalam mendukung pelaksanaan SIMDA F-MIS untuk mencapai tujuan pertanggungjawaban anggaran yang optimal di lingkungan pemerintahan di Indonesia dan pentingnya membangun, memelihara sistem informasi yang handal seperti SIMDA F-MIS untuk mendukung praktik akuntabilitas, memastikan keabsahan serta keandalan laporan keuangan dalam lingkungan manajemen keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel finance management (FM) berfungsi sebagai variabel moderasi yang memoderasi dan memperkuat hubungan positif antara variabel financial accountability (FA), accountability (A), transparency (T) dan Penerapan SIMDA Financial Management Information System (FMIS) bisa diketahui dari beberapa poin yang mendukung yaitu optimalisasi pengelolaan keuangan, penguatan pertanggungjawaban anggaran, pengelolaan risiko keuangan, perencanaan dan pelaksanaan akuntabilitas, pertanggungjawaban publik dan pengawasan yang baik, peran sistem informasi sebagai alat pengontrol dan evaluasi, peningkatan kinerja keuangan melalui pengelolaan keuangan dan SIMDA F-MIS.

Keterbatasan pada penelitian ini adalah mengumpulkan data dengan kuesioner melalui *google form* yang memiliki kelemahan tidak dapat mengontrol secara langsung jawaban dari responden dan adanya keterbatasan waktu yang mendorong peneliti dalam memilih variabel yang dapat diukur atau diamati dengan cepat dan efisien dan penggunaan alat pengukuran yang cepat dan mudah diimplementasikan. Pada keterbatasan tersebut sebaiknya menggunakan teknik wawancara agar peneliti mengontrol jawaban secara langsung dari responden. Keterbatasan lainnya adalah penelitian ini masih menggunakan analisis regresi berganda. Oleh karena itu, disarankan untuk peneliti yang akan meneliti pada topik yang berkaitan untuk menggunakan metode PLS dan bisa meneliti variabel di luar penelitian ini terkait sistem informasi akuntansi maupun penyusunan laporan keuangan karena penelitian terkait SIMDA keuangan merupakan penelitian yang perlu pengembangan.

REFERENSI

BUKU

- Bahrullah Akbar. (2002). Fungsi Manajemen Keuangan. In *Booklet Publikasi BPK* (Nomor NO. 87, hal. Bulan Oktober, Jakarta, BPK).
- Handayani Ririn. (2020). Metodologi Penelitian Sosial. In *Yogyakarta: Trussmedia. Grafika*.
- Imam Ghozali. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26. In *Badan Penerbit Universitas Diponegoro*.
- Kasmadi & Sunariah, N. S. (2014). Panduan Modern Penelitian Kuantitatif. In *Bandung: Alfabeta*.
- Priyatno Duwi. (2013). Analisis Korelasi, Regresi dan Multivariate dengan SPSS. In *Yogyakarta : Gava Media*.
- Priyatno Duwi. (2016). Belajar Alat Analisis Data Dan Cara Pengolahannya Dengan SPSS. In *Yogyakarta : Gava Media*.
- Siregar, S. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif; Dilengkapi Dengan Perhitungan Manual & SPSS. In *Jakarta, Kencana*.
- Siregar, S. (2014). Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif. In *Jakarta, Bumi Aksara*.
- Sugiyono. (2019). Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. In *Edisi ke 2 Bandung, Alfabeta*.
- Suliyanto. (2011). Ekonometrika Terapan : Teori dan Aplikasi dengan SPSS. In *Yogyakarta: Penerbit Andi Offset. Yogyakarta*.

JURNAL

- Abidin, M Khoirul, Afifudin, dan Janaidi. 2018. "Pengaruh Implementasi Sistem Manajemen Daerah (SIMDA), Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Standar Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang." *E-Jra* 07(10).
- Ade Lestari, Baiq Anggun Hilendri Lestari, dan Lalu Takdir Jumaidi. 2022. "Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) dalam Pengelolaan Retribusi Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kota Mataram." *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi* 2(1).
- Amba Sugi, Ferdinant. 2020. "Tesis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Toraja Utara." POLITEKNIK STIA LAN MAKASSAR.

- Aminah, Albertus Daoni, Tina Miniawati, dan Kahirudin. 2022. “Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Alokasi Dana Desa (Studi Desa Merbau Mataram Kecamatan Merbau Mataram).” *Journal of the Japan Welding Society* 91(5).
- Ananda, Febryandhie, dan Mustika Permata Sari. 2020. “Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman).” *JURNAL PUNDI* 4(2).
- Angraini, D., R. Agusti, dan L. Anggraini. 2016. “Pengaruh Penerapan Sistem Keuangan Daerah, Transparansi, Aktivitas Pengendalian Dan Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir).” *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau* 3(1).
- Asensia, A, S Saman, dan D Daryanti. 2020. “Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Ditinjau Dari Sistem Akuntansi” *Accounting Journal*.
- Asih, NKSD, dan NPTW Pratiwi. 2021. “Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Sakd)” *Hita Akuntansi dan Keuangan*.
- Al Asyari, Septem;, dan Herlina Helmy. 2020. “Analisis Kualitas Pengungkapan Laporan Keuangan Dalam Website Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu).” *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 2(1).
- Auditya, Lucy, Husaini Husaini, dan Lismawati Lismawati. 2021. “Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.” *Jurnal Fairness* 3(1).
- Ayu Puji Laksmi Dewi, Putu, dan Yusli Mariadi. 2021. 19 Valid Jurnal Ilmiah *Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) untuk Pengelolaan Keuangan*.
- Ayuningsih, Listiya, M. Cholid Mawardi, dan Arista Fauzi Kartika Sari. 2022. “Pengaruh Implementasi Sistem Manajemen Daerah (SIMDA), Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang.” *E-Jra* 11(04).
- Azzindani, Rahmatia, dan Dan M Irwan. 2020. 3 Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan *Pengaruh Implementasi SIMDA dan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dimediasi Good Government Governance*. www.bpkp.go.id.

- Belzile, Bertrand. 2017. "Essentials of Management, par Joseph L. Massie, Prentice-Hall, Inc. Englewood Cliffs, N.J., 1964, 180 pages." *Relations industrielles* 19(3).
- Damayanti, Evi, dan Suwardi Bambang Hermanto. 2018. "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pemerintah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya." *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* Volume 7 N: 1–21.
- Defana, Fernanda Alivia, dan Sri Rahayu. 2023. "Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal, Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021)." *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis* 11(1).
- Diana, Patricia, Chermian Eforis, dan Maria Stefani Osesoga. 2019. "Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan." *ULTIMA Accounting* 10(2).
- Difaul Khaq, Mukhamad Iqom. 2022. "Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Dalam Rangka Kunjungan Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah." *Jurnal Lex Renaissance* 7(2).
- Dinyvia Pramesti, Aprilianggita, dan Andri Widiyanto. 2020. "Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah Pada Dinas Kesehatan Kota Tegal." *Jurnal Riset Terapan Akuntansi* Vol.4 No.: 130–36.
- Edowati, Mikael, Herminawati Abubakar, dan Miah Said. 2021. "Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai." *Indonesian Journal of Business and Management* 4(1).
- Elkha, Fatima, dan Wahidawati. 2020. "Pengaruh Pengendalian Internal, Akuntabilitas, dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah." *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 9(3).
- Erawati, T, dan A S Hamanay. 2022. "Pengaruh Sistem Keuangan Desa, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa." *Jurnal Akuntansi*.
- Fien Hapsari Somad, Naz'aina, dan Muammar Khaddafi . Razif. 2023. "Pengaruh Penyajian, Aksebilitas Dan Transparansi Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan SKPD Pada Pemerintah Kota Lhokseumawe." *Jurnal Akuntansi Malikussaleh* Volume 2,: 202–22.
- Firman, Dody. 2018. "Analisis pengaruh pengelolaan keuangan daerah,

- akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja keuangan pemerintah.” *Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan* 2(3).
- Gustyari, Wahyu et al. 2022. “Analisis Kesuksesan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Berdasarkan Model DELONE dan MCLEAN 2003 (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Langsa).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)* 7(1): 1.
- Hadiachandra, A. 2021. “Pengaruh Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah terhadap Efektivitas Kerja Bendahara di Kota Tasikmalaya.” *Literacy: Jurnal Ilmiah Sosial*.
- Hasannudin, I M. 2018. “Analisis Implementasi Sistem Akuntansi Berbasis Akrua Dan Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA).” *Ejournal KAWASA*.
- Hendri, Meisy, dan Erinors NR. 2020. “Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.” *JURNAL EKSPLORASI AKUNTANSI* 2(1): 2479–93.
- Ifdhal Adetya Rineldo, S.AP, Afrianti, S.E., M.Pd, Ardianto, Sos., M.Si. 2022. “Analisis Penerapan SIMDA dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas pada BPKPD Kabupaten Kerinci.” *JAN Maha* 4(5): 23–29.
- Kewas, Agnes MD, Herman Karamoy, dan Linda Lambey. 2019. “Analisis Kendala Pengimplementasian Pendapatan pada SIMDA Keuangan di Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.” *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING “GOODWILL”* 10(2).
- L, Lynda, Meinarni Asnawi, dan Bill J. C. Pangayow. 2019. “Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA), Kualitas Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Spip) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.” *Jurnal Akuntansi, Audit, dan Aset* 2(2).
- Laetitia, Maria, Boliina Kromen, Henny A Manafe, dan M E Perseveranda. 2023. “Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, dan Transparansi terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Keuangan Daerah).” *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* Vol. 4 No.(4): 460–68. <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.
- Meisy Hendri, Erinors NR. 2020. “Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada OPD Provinsi Sumatera Barat).” *JURNAL EKSPLORASI AKUNTANSI* Vol.2(No. 1, Seri E): 2479–93.
- Merlyn Delly Rumondor, Jantje J. Tinangon, Heince R. N. Wokas. 2023.

- “Analisis Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Terhadap Pengelolaan Keuangan Dalam Pelaksanaan Belanja Daerah Pada Bkad Provinsi Sulawesi Utara.” *Riset Akuntansi dan Auditing “GOODWILL”* 14(1): 65–86.
- Nafidah, Lina Nasehatun, dan Nur Anisa. 2017. “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang.” *Akuntabilitas* 10(2).
- Nasution, Dito Aditia Darma. 2018. “Analisis Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah.” *Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan* 2(3).
- Nasution, Muhammad Irfan, dan Nurwani M.Si. 2021. “Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan.” *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 9(2): 109.
- Nurfadilah, Y, dan S Santoso. 2022. “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.” *Surakarta Accounting Review*.
- Nurhaeda, Andi, dan Andi Tenriola. 2022. “Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai.” *Tangible Journal* 7(2): 161–70.
- Prabadewi Apsari, Ida Ayu, dan Ida Bagus Putra Astika. 2020. “Pengaruh Kualitas Informasi, Kualitas Sistem Informasi, dan Perceived Usefulness pada Kepuasan Pengguna SIMDA.” *E-Jurnal Akuntansi* 30(3): 611.
- Purnama Sari Harahap, Tri Jatmiko Wahyu Prabowo. 2023. “Analisis Kualitas Pengungkapan Laporan Keuangan pada Website Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018-2021).” *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING* Vol. 12(Nomor 2): 1–11.
- Puspitaningrum, Sinta, dan Mahirun Mahirun. 2021. “Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA), Kualitas Sumber Daya Manusia, Dan Dukungan Manajemen Puncak Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.” *Pena Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi* 35(1).
- Rachmawati, Desy Ika, Desi Yuniarti, dan Darnah Andi Nohe. 2015. “Model Regresi Variabel dengan Metode Selisih Mutlak Moderating Variable Regression Model with an Absolute Difference Method.” *Jurnal EKSPONENSIAL* 6(2): 187–92.
- Rahayu, S, dan A D Kanita. 2023. “Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas” *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah ...* 11(1).

- Rakhmawati, Intan. 2022. “Analisa SIMDA-NEXT GENERATION (SIMDA-NG).” *Jurnal Aplikasi Akuntansi* 7(1): 157–70.
- Ramadhani, Annisa. 2019. Universitas Muhammdiyah Palembang “Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Oku Timur.”
- Rizka S, Anggie, Zamzami Zamzami, dan Muhammad Gowon. 2021. “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Kesuksesan Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagai Variabel Intervening.” *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja* 6(3).
- Saputri, Novi Ria, dan Iwan Setya Putra. 2021. “Analisis Implementasi SIMDA Keuangan dengan Menggunakan Cobit untuk Melihat Efektivitas Penggunaan Teknologi Informasi di Pemerintah Kabupaten Blitar.” *RISTANSI: Riset Akuntansi* 1(1).
- Silfiani, Santi, dan Nasyiah Hasanah Purnomowati. 2021. “Efektivitas Pelaporan Keuangan Sebelum dan Sesudah Implementasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA Keuangan) Pemerintah Daerah.” *Jurnal Akuntansi dan Bisnis* 21(2).
- Sudrajat, Arip Rahman. 2021. “Akuntabilitas dan Transparansi Publik Bagaimana Pengaruh Terhadap Kinerja Satuan Perangkat Daerah di Kabupaten Sumedang.” *Jurnal Education and development* 9(4).
- Sujanadi, Arifuddin, dan Sumardi. 2021. “Analysis of the Effect of Regional Financial Management, Accountability and Transparency and Organizational Culture as Moderating Variables on Financial Performance of Mamuju Regency.” *Quest Journals Journal of Research in Business and Management* 9(8): 71–79. www.questjournals.org.
- Sulistiawan, Anggit, Budi Ispriyarso, dan Aprista Ristyawati. 2019. “Bentuk dan Mekanisme Perencanaan Keuangan Daerah yang Partisipatif Guna Mewujudkan Akuntabilitas Publik.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1(2).
- Susanti, Aprilia Dwi. 2022. “Perspektif Hukum Keuangan Negara Terhadap Mekanisme Pertanggungjawaban Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.” *El-Dusturie* 1(2): 1–16.
- Susanti, Evi Yuli, Farah Nur Fauziah, dan Nur’aini. 2021. “Fraud Triangle Theory dan Kualitas Pengelolaan Keuangan dengan Moderasi Sistem Pengendalian Internal.” *Jurnal Akuntansi* 1(1).
- Syarifuddin, Dastrianti. 2020. “Analisis Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Di Pemerintah Kabupaten Sarmi.” *KEUDA (Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah)* 5(2).

- Tampang, Elisabeth et al. 2022. "Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara." *Jurnal LPPM Bidak EkoSusBudKum* 6(1).
- Thahir, T, dan M Mariati. 2022. "Strategi Pemerintah Daerah Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan yang akan Meminta Pertanggungjawaban." *JAMDI (Jurnal Akuntansi Multi Dimensi)*.
- Ubaidillah, Moh. 2019. "Pengaruh Tata Kelola Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dengan Profesionalisme Sdm Dan Integritas Sebagai Variabel Intervening." *JIFA (Journal of Islamic Finance and Accounting)* 2(1).
- Ulya, C, dan E B Astuti. 2020. "Analisis Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Daerah terhadap Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (Studi pada Badan Pengelola Keuangan dan" *AKSES: Jurnal Ekonomi dan ...*
- Wanti, Intan Shinta, dan Ghina Fitri Ariesta Susilo. 2020. "Analisis Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kabupaten Magelang." *Accounting Global Journal* 4(2).
- Wijaya, Felisitas M., Jenny Morasa, dan Victorina Z. Tirayoh. 2022. "Analisis pelaksanaan sistem penatausahaan dan pertanggungjawaban Bendahara di Kantor Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa." *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)* 5(2).
- Witra Maison, Herlin Tasmir Vitalia. 2020. "Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Dukungan Manajemen Puncak Sebagai Variabel Moderating." *Jurnal Advanced* 14 No. 2 T: 42–67.
- Yanto, E, dan M Afkir. 2020. "Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA Keuangan) Dalam Pengolahan Data Keuangan Pada Organisasi Pemerintah Daerah" *Indonesian Journal of Strategic Management*.
- Yunita, Nissa,) ; Iqbal Noor, dan Acep Suherman. 2023. "The Effect of the Implementation of Regional Financial Management Information System (SIMDA) and Human Resource Competence on the Quality of Financial Reports (Case Study On Regional Work Units In Sukabumi Regency) Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Mana." *Journal of Management, Economic, and Accounting* 2(2): 201–12.
- Zeny Antika, Yunika Murdayanti, dan Hafifah Nasution. 2020. "Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan, dan Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah." *Jurnal Wahana Akuntansi* 15(2): 212–32.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Republik Indonesia. (2003). Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. In *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286* (Vol. 49, Nomor 0).
- Undang - Undang Republik Indonesia. (2004). UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. In *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355* (Vol. 1964, Nomor 1).
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. In *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400* (Vol. 53).
- Undang-undang Republik Indonesia. (2004). UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. In *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438*.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2008). Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 2008 Mengenai Keterbukaan Informasi Publik. In *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846, LN.2008/NO.61, TLN NO.4846, LL SETNEG : 35 HLM* (Nomor May).
- Undang-undang Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. In *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587*.
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2022). Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. In *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757* (Nomor 104172).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri. (2008). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah* (hal. 282).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2000). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. In *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022* (Nomor 1995, hal. 662).
- Pemerintah Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. In *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322*.

WEB PAGE

Suseno Bimo. (2021). *Model Moderator dengan Uji Selisih Mutlak*. MS Stat : 06 Mei 2021. <http://www.statistikolahdata.com/2021/05/model-moderator-dengan-uji-selisih.html>

Syafdillah. (2012). *Uji Nilai Selisih Mutlak*. Blog Personal tentang tips Belajar : 12 Juni 2012. <https://blogtutorialspss.blogspot.com/2012/06/uji-nilai-selisih-mutlak.html>

Untuk memastikan artikel telah sesuai template jurnal, gunakan check list berikut:

Check list artikel sebelum submit: (☐)

No	Criteria	Ada	Tidak Ada
1	TITLE	v	☐
a	Ada Judul artikel yang ditulis dengan jelas, lugas dan tidak lebih dari 15 kata.	v	
b	Ada penghindaran gaya judul skripsi, tesis, disertasi, atau hibah. Judul telah tersaji dengan pendek, menarik, mudah dipahami, dan mudah ditelusuri dengan search engine	v	
2	ABSTRACT		
a	Ada Latar belakang atau tujuan penelitian	v	
b	Ada Ringkasan metode	v	
c	Ada Hasil penelitian (termasuk temuan baru)	v	
d	Ada Kesimpulan dan implikasi (Opsional)	v	
e	Ada Kata kunci sebanyak 3-5 kata/Frasa (Mak 5 kata/frasa) dan relevan dengan inti penelitian	v	
3	PENDAHULUAN		
a	Ada Latar belakang penelitian	v	
b	Ada kajian singkat literatur primer atau sekender dari penelitian terbaru & relevan dengan tema riset	v	
c	Ada <i>Gap analysis</i> atau <i>research gap</i> terkait sisi penting atau tidaknya riset dan apa keunikan atau kebaruan riset ini dibanding riset2 sebelumnya sebagai <i>state of the art/novelty research</i> . Minimal sajikan tujuan penelitian	v	
d	Ada hipotesis yang didahului oleh kajain teori dan empiris dari riset-riset sebelumnya yang mendukung hipotesis	v	
4	METODE PENELITIAN		
a	Ada metode pengumpulan data	v	
b	Ada populasi dan sampel	v	
c	Ada definisi variable & pengukuran variabel	v	
d	Ada alat analisis utama yang dipakai memecahkan rumusan masalah atau hipotesis	v	
5	HASIL DAN PEMBAHASAN		
a	Sudah disajikan statistic deskriptif dan statistic inferensial - nya	v	
b	Apakah data yang disajikan telah diolah (<i>bukan data mentah</i>), dituangkan dalam bentuk tabel atau gambar (<i>pilih salah satu</i>), serta	v	

	diberi keterangan yang mudah dipahami? Ada dan telah dituliskan temuan atau finding-nya		
c.	Bagian pembahasan sudah disajikan kaitan antara hasil dan konsep dasar daan/ atau hipotesis	v	
d.	Ada kesesuaian atau pertentangan dengan hasil penelitian sebelumnya atau teori yang digunakan	v	
e.	Ada Pembahasan/ Alasan mendalam dari tabulasi data dan tidak hanya berisi signifikan dan tidak signifikan atau sama atau tidak sama dengan penelitian terdahulu	v	
6	SIMPULAN		
a	Simpulan terdiri dari 2 alenia. Ditulis secara singkat, hanya menjawab tujuan atau hipotesis penelitian dan ditulis dalam satu paragraph (tidak disarankan berbentuk daftar simpulan bullet/ angka)	v	
b	Ada Keterbatasan dan Saran penelitian yang ditulis dalam satu paragraf	v	
7	REFERENSI		
a	Menggunakan aplikasi referensi seperti Mendeley, Endnote, Zetero, dll	v	
b	Gaya penulisan daftar pustaka menggunakan American Psychological Association (APA) 7th edition	v	